



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS EFEKTIFITAS
PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
TAHUN 2008 - 2009**

TESIS

**FITRIA YOLANDA
0806430014**

**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
JAKARTA
JANUARI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS EFEKTIFITAS
PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP
TAHUN 2008 - 2009**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ekonomi (M.E.)**

**FITRIA YOLANDA
0806430014**

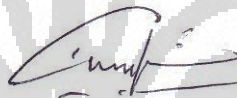
**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH
JAKARTA
JANUARI 2012**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 27 Januari 2012



(Fitria Yolanda)

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Fitria Yolanda

NPM : 0806430014

Tanda Tangan : 

Tanggal : 27 Januari 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Fitria Yolanda
NPM : 0806430014
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Efektivitas Program Pendidikan Kecakapan
Hidup Tahun 2008 - 2009

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Kekhususan Ekonomi Perencanaan Kota dan Daerah, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Nining Indroyono Soesilo, MA (.....)

Penguji : Iman Rozani, SE, M.Soc.Sc (.....)

Penguji : Dr. Sartika Djamaluddin (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 27 Januari 2012

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada setiap tahapan penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Oleh karena itu, apresiasi setinggi-tingginya saya haturkan kepada:

- (1) DR. Nining Indroyono Soesilo, MA selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan begitu banyak waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini.
- (2) Para dosen MPKP FEUI, terutama Bapak Iman Rozani, Pak Riyanto dan Pak Yudi, yang telah banyak memberikan ide dan inspirasi yang sungguh mencerahkan baik saat penyusunan proposal tesis maupun perbaikan tesis ini.
- (3) Bapak DR. Kadir, DR. Abdul Kahar, dan Abdoellah, M.Pd yang banyak memberikan masukan dalam perbaikan tesis ini di detik-detik terakhir, terima kasih atas pemikiran dan waktunya.
- (4) Suami tercinta, Salfendi Wizar, dan putri yang sangat kami sayangi dan banggakan, Zhafirah Fatin Azzah dan Aniqah Salma Hanan, yang tiada henti memberikan motivasi berlimpah, pengertian atas waktunya, sehingga akhirnya semua bisa dilalui dengan sebaik-baiknya.
- (5) Orang tua, yang dengan sabar dan penuh cinta dan kasih sayang selalu mengingatkan dan mendorong saya untuk menimba ilmu setinggi-tingginya.
- (6) Para sahabat dan rekan-rekan MPKP FEUI Angkatan XIX A. Pak Ferry, Henriko, Dwi, Mba Cuti, Mba Emie, Indro, Iwan, Robani, Doni HY, Doni Putra serta segenap penghuni kelas A lainnya, terima kasih atas segala bantuan dan kebersamaan dalam masa-masa kuliah dan penyusunan tesis ini. Khusus Pak Ferry dan Ni Eva, motivator saya yang waktunya setiap saat terganggu, *thank u very much*.
- (7) Teman-teman di Sekretariat MPKP FEUI: *Mas* Triman, *Mas* Dwi, Mba Siti dan Pak Ramiyus. *Thanks berat*, komunikasi yang begitu lancar dan baik memberikan saya kemudahan dalam menyerap segala informasi *admin* sehingga semuanya berjalan lancar.
- (8) Pimpinan dan teman-teman sejawat Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI, Kemdiknas terutama Mba Yari, Maz Lismanto, dan Novi yang banyak membantu dalam pengumpulan data dan referensi.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan kebijakan pemerintah.

Salemba, Jakarta, 27 Januari 2012

Penulis

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitria Yolanda
NPM : 0806430014
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Kekhususan : Ekonomi Perencanaan Kota dan Daerah
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Analisis Efektivitas Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2008 - 2009

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta
Pada tanggal: 27 Januari 2012

Yang menyatakan,



(Fitria Yolanda)

ABSTRAK

Nama : Fitria Yolanda
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik,
Fakultas Ekonomi
Judul : Analisis Efektifitas Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Tahun 2008 – 2009

Pengangguran merupakan salah satu masalah besar Bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan hingga saat ini. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat atau sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Salah satu upaya yang menjembatani kesenjangan pendidikan dengan dunia usaha adalah melalui pendidikan non formal dan informal. Penelitian tesis ini bertujuan mendapatkan bukti empirik keefektifan salah satu program penyalarsan pendidikan dengan dunia kerja, yaitu program berbasis Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) yang telah diselenggarakan pada tahun 2008 – 2009 oleh Direktorat Kursus dan Kelembagaan, Kementerian Pendidikan Nasional. Selain itu penelitian tesis ditujukan untuk memperoleh bukti teoritis tentang perbandingan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Data yang digunakan adalah data sekunder dari olahan kuesioner monitoring dan evaluasi di 17 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 164 orang lulusan yang terdiri dari 71 orang bekerja, 58 orang orang berwirausaha, dan 35 orang belum bekerja. Dengan metode analisis deskriptif diperoleh temuan utama berupa indikator-indikator keberhasilan program adalah sebagai berikut: (1) Indikator adanya laporan program penyelenggaraan dinilai belum efektif; (2) Indikator tingkat kelulusan peserta didik dinilai efektif; (3) Indikator penempatan kerja atau pendampingan usaha dinilai efektif. Sedangkan temuan utama lainnya adalah faktor-faktor keberhasilan sebagai berikut: (1) Faktor ketepatan sasaran; (2) Faktor kesesuaian kurikulum dan bahan ajar; (3) Faktor bentuk evaluasi hasil belajar yang dipersyaratkan; (4) Faktor tingkat kesesuaian pekerjaan yang diperoleh baik bekerja pada Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) maupun berusaha mandiri dengan keterampilan yang diberikan; (5) Faktor status kepegawaian lulusan yang bekerja pada DUDI; (6) Faktor gaji/upah yang diperoleh lulusan yang bekerja pada DUDI. Selanjutnya dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) diperoleh hirarki indikator-indikator yang mempengaruhi keberhasilan program. baik faktor internal maupun eksternal. Di bagian akhir didiskusikan beberapa rekomendasi kebijakan terkait dengan hasil penelitian ini.

Kata kunci:

Pengangguran, PKH, Kementerian Pendidikan Nasional, DUDI, Pakar, *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

ABSTRACT

Name : Fitria Yolanda
Study Program : Master of Public Planning and Policy,
Faculty of Economics
Title : An Analysis on the Effectiveness of Life Skill Education
Program year 2008 – 2009.

Unemployment has been one crucial issue in Indonesia that has not been resolved. The major factor causing the unemployment is the lack of aggregate expenditure and lack of job opportunities. One solution to bridge the gaps between the job seekers' education and the opportunities is non-formal and informal education. This thesis aims to obtain empirical data on the effectiveness of life-skills-based education program conducted in 2008 – 2009 by the Ministry of National Education through its work unit, i.e. Directorate of Institutional and Course Development, Ministry of National Education. This thesis also aims to obtain theoretical evidences on various factors that affect the program's accomplishment. The secondary data used in thesis are: monitoring questionnaires and evaluations from 17 provinces with 164 respondents. 71 of them are working, 58 of them are running their own businesses, and 35 of them are seeking for jobs. Using descriptive analysis, there are three indicators found: (1) the program implementation has not been effective yet, (2) learners' graduation rates are effective; (3) the job distribution and business guidance system is effective. Other findings related to the program achievement are (1) accuracy of target; (2) compatibility between curriculum and learning materials; (3) learners' assessment and evaluation; (4) Jobs and skills suitability with Industries, macro and micro businesses; (5) Employee status in the industries and businesses; and (6) the earnings in the industries and businesses. By implementing *Analytical Hierarchy Process* (AHP), the hierarchies of indicators that affect the entire achievement of program were obtained. The recommended policies regarding this research are discussed in the last part of this thesis.

Key word: Unemployment, Life-skill Education, National Education Ministry, Industries and Businesses, Analytical Hierarchy Process (AHP)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GRAFIK	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Batasan Penelitian	8
1.5 Metodologi Penelitian	9
1.6 Hipotesa Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan	9
2. PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	11
2.1 Struktur Organisasi pada Kementerian Pendidikan Nasional	11
2.2 Sekilas Tentang Pendidikan Nonformal	11
2.3 Pembinaan Kursus dan Pelatihan	14
2.4 Program Pendidikan Kecakapan Hidup	17

3. TINJAUAN LITERATUR	22
3.1 Arti Efektifitas	22
3.2 Pendidikan Kecakapan Hidup (life skills education)	24
3.3 Pentingnya Campurtangan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kecakapan Hidup Masyarakat	25
3.4 Studi Terdahulu Tentang Pendidikan Kecakapan Hidup	27
3.5 Teori Analytical Hierarchy Process (AHP)	28
4. METODOLOGI PENELITIAN	34
4.1 Data	34
4.2 Pendekatan Penelitian	34
5. HASIL DAN PEMBAHASAN	51
5.1 Efektivitas Program Pendidikan Kecakapan Hidup	51
5.2 Analisis Efektivitas Program Pendidikan Kecakapan Hidup	77
6. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	86
6.1 Kesimpulan	86
6.2 Keterbatasan Studi	88
6.3 Rekomendasi Kebijakan	88
DAFTAR KEPUSTAKAAN	90
LAMPIRAN	92

DAFTAR GRAFIK

Grafik 5.1	Efektivitas Indikator Adanya Laporan Penyelenggaraan Program PKH Tahun 2008-2009	52
Grafik 5.2	Kecenderungan Usia Lulusan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2008-2009	64
Grafik 5.3	Penghasilan Rata-Rata Lulusan Yang Bekerja	74
Grafik 5.4	Penghasilan Rata-Rata Lulusan Yang Usaha Mandiri	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tahapan Penyelarasan	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kementerian Pendidikan Nasional	10
Gambar 3.1	Kurva Bentuk Campurtangan Pemerintah di Bidang Pendidikan	26
Gambar 4.1	Struktur Hirarki AHP	35
Gambar 4.2	Struktur Hirarki Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program PKH	47
Gambar 4.3	Alur Penyusunan Tesis	50
Gambar 5.1	Hasil Pengolahan Data Pada Elemen Kriteria	78
Gambar 5.2	Hasil Pengolahan Data Sub Kriteria Pada Kriteria Internal	78
Gambar 5.3	Hasil Pengolahan Data Sub Sub Kriteria Pada Sub Kriteria Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional	78
Gambar 5.4	Hasil Pengolahan Data Sub Sub Kriteria Pada Sub Kriteria Proses Penentuan Lembaga Penyelenggara Program PKH	79
Gambar 5.5	Hasil Pengolahan Data Sub Kriteria Pada Kriteria Eksternal	79
Gambar 5.6	Hasil Pengolahan Data Sub Sub Kriteria Pada Sub Kriteria Peserta Didik	79
Gambar 5.7	Hasil Pengolahan Data Sub Sub Kriteria Pada Sub Kriteria Penyelenggara Program PKH	80
Gambar 5.8	Hasil Pengolahan Data Sub Sub Kriteria Pada Sub Kriteria Dunia Usaha dan Industri	80
Gambar 5.9	Performance Sensitivity for Nodes Below Tujuan: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pendidikan Kecakapan Hidup	81
Gambar 5.10	Dominasi Faktor Dari Semua Kriteria	82
Gambar 5.11	Dominasi Faktor Dari Kriteria Internal	82
Gambar 5.12	Dominasi Faktor Dari Kriteria Eksternal	83
Gambar 5.13	Struktur Hirarki Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program PKH Beserta Pembobotannya	84

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Angkatan Kerja dan Pengangguran di Indonesia Tahun 2005 – 2009	2
Tabel 2.1	Jenis Program Pendidikan Kecakapan Hidup Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Tahun 2008-2009	19
Tabel 2.2	Penyebaran Lembaga Kursus dan Pelatihan Menurut Wilayah Tahun 2010	20
Tabel 4.1	Matriks Perbandingan Berpasangan	37
Tabel 4.2	Skala Penilaian Perbandingan	38
Tabel 4.3	Random Consistency Index (RI)	41
Tabel 5.1	Tingkat Kelulusan Peserta Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2008 per Jenis Program	53
Tabel 5.2	Tingkat Kelulusan Peserta Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2009 per Jenis Program	54
Tabel 5.3	Tingkat Kelulusan Peserta Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2008 per Provinsi	55
Tabel 5.4	Tingkat Kelulusan Peserta Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2009 per Provinsi	56
Tabel 5.5	Tingkat Ketercapaian Lulusan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Memperoleh Pekerjaan atau Usaha Mandiri Tahun 2008 per Jenis Program	58
Tabel 5.6	Tingkat Ketercapaian Lulusan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Memperoleh Pekerjaan atau Usaha Mandiri Tahun 2009 per Jenis Program	59
Tabel 5.7	Tingkat Ketercapaian Lulusan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Memperoleh Pekerjaan atau Usaha Mandiri Tahun 2008-2009 per Provinsi	60
Tabel 5.8	Ketepatan Sasaran Berdasarkan Usia Lulusan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2008-2009	63
Tabel 5.9	Kesesuaian Kurikulum dan Bahan Ajar Dengan Kebutuhan Kerja	65
Tabel 5.10	Bentuk Evaluasi Hasil Belajar	67
Tabel 5.11	Jenis Keterampilan Yang Diikuti Dalam Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2008-2009	69
Tabel 5.12	Kompetensi Yang dicapai Oleh Responden Yang Bekerja dan Usaha Mandiri	69
Tabel 5.13	Kesesuaian Pekerjaan Dengan Keterampilan	70

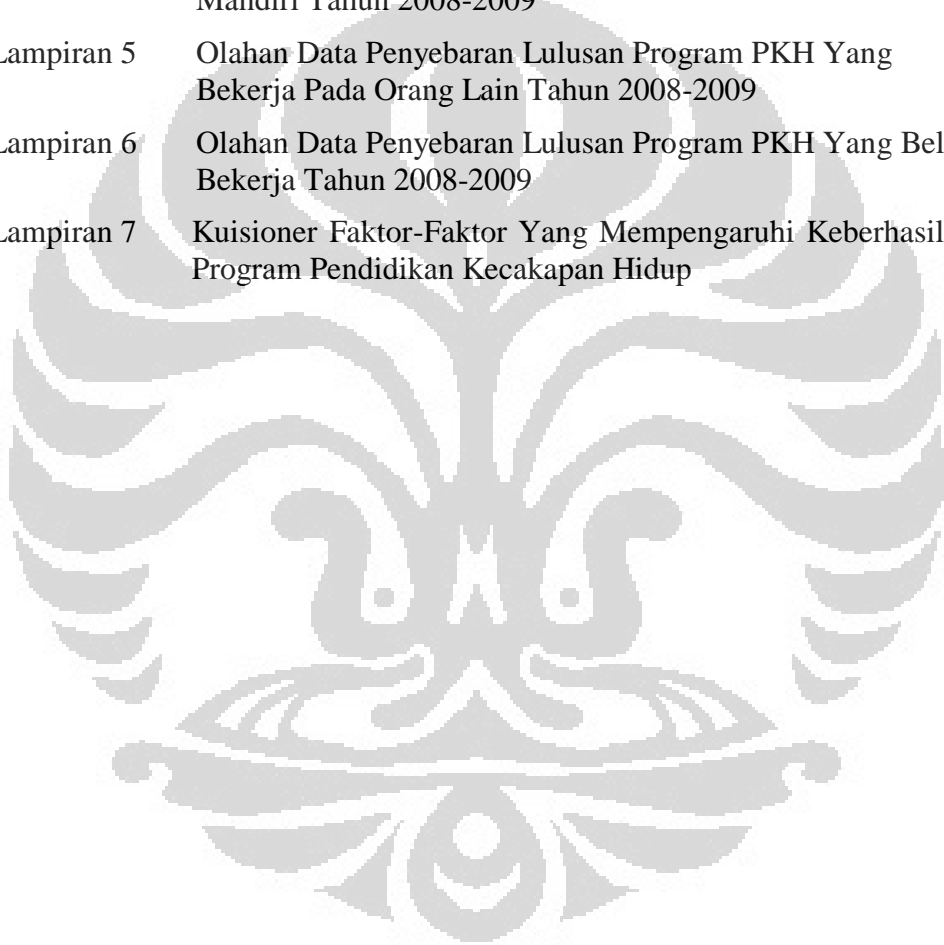
Tabel 5.14 Perhitungan Proses Penempatan Kerja Responden Yang Bekerja 71

Tabel 5.15 Persentase Upah Minimal UMR 75



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2008-2009	92
Lampiran 2	Olahan Data Penyebaran Peserta Didik Program PKH Tahun 2008-2009	93
Lampiran 3	Olahan Data Penyebaran Lulusan Program PKH Tahun 2008-2009	94
Lampiran 4	Olahan Data Penyebaran Lulusan Program PKH Yang Usaha Mandiri Tahun 2008-2009	95
Lampiran 5	Olahan Data Penyebaran Lulusan Program PKH Yang Bekerja Pada Orang Lain Tahun 2008-2009	96
Lampiran 6	Olahan Data Penyebaran Lulusan Program PKH Yang Belum Bekerja Tahun 2008-2009	97
Lampiran 7	Kuisisioner Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pendidikan Kecakapan Hidup	98



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Seseorang yang tidak bekerja, tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur.

Pengangguran dan kemiskinan merupakan masalah besar Bangsa Indonesia yang belum bisa terpecahkan hingga saat ini. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan pengeluaran agregat atau sedikitnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Sedangkan faktor-faktor lain yang menyebabkan pengangguran diantaranya: 1) adanya kesenjangan antara *supply* dan *demand*, jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia; 2) terjadinya *mis-match*, kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja; 3) *unskill labour*, masih adanya anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan yang tidak dapat berusaha secara mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang memadai; 4) terbatasnya peluang kerja yang tersedia sehingga tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja, 5) terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) karena krisis global; 6) terbatasnya kemampuan warga masyarakat dalam mengolah sumber daya alam menjadi produk yang bernilai ekonomis sebagai sumber mata pencaharian. Kondisi tersebut di atas akan berdampak pada merebaknya masalah sosial dan tidak terberdayanya sumber-sumber daya alam yang melimpah (Wartanto, 2009).

Berikut data pengangguran dan angkatan kerja tahun 2005 sampai dengan 2009.

Tabel 1.1
Angkatan Kerja dan Pengangguran di Indonesia Tahun 2005-2009

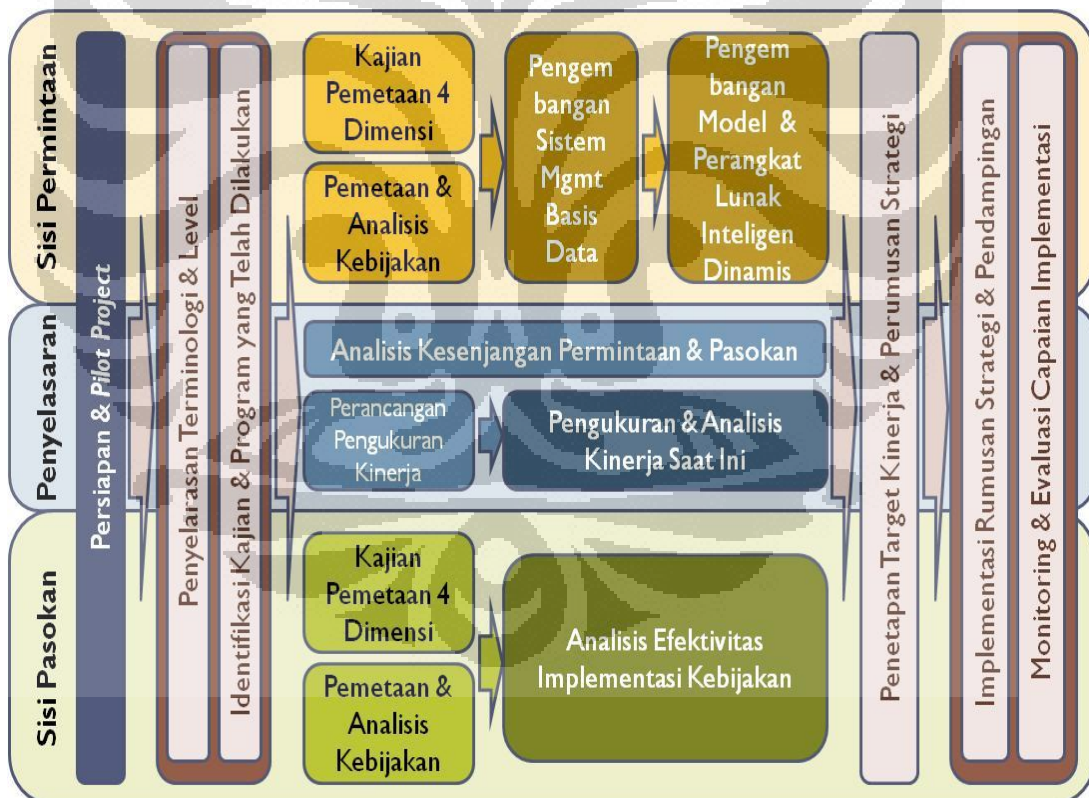
Periode	Jumlah Angkatan Kerja	Jumlah Pengangguran Terbuka	Persentase Pengangguran
Februari 2005	105,802,372	10,854,254	10.26%
November 2005	105,857,653	11,899,266	11.24%
Februari 2006	106,281,795	11,104,693	10.45%
Agustus 2006	106,388,935	10,932,000	10.28%
Februari 2007	108,131,058	10,547,917	9.75%
Agustus 2007	109,941,359	10,011,142	9.11%
Februari 2008	111,477,447	9,427,590	8.46%
Agustus 2008	111,947,265	9,394,515	8.39%
Februari 2009	113,744,408	9,258,964	8.14%
Agustus 2009	113,833,280	8,962,617	7.87%

Berdasarkan data BPS di atas tergambar bahwa jumlah angkatan kerja dari periode Februari 2005 sampai Agustus 2009 selalu mengalami kenaikan sedangkan jumlah pengangguran setiap periodenya mengalami penurunan kecuali pada bulan November 2005 naik dari 10.854.254 orang bulan Februari 2005 menjadi 11.899.266 orang. Dan pada posisi bulan Agustus 2009, jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 8.962.617 orang (7.87%) dari total angkatan kerja sekitar 113.833.280 orang. Jumlah penganggur tersebut tersebar baik di perkotaan maupun di pedesaan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan, 24,21% berpendidikan SD ke bawah, 19,76% berpendidikan SLTP, 27,58% berpendidikan SMA, 15,70% berpendidikan SMK dan 12,75% berpendidikan Diploma sampai Sarjana.

Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai keterampilan dan keahlian kerja, sehingga mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang tetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untuk menumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakan termasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung.

Untuk menindaklanjuti masalah pengangguran tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya terutama program penyelarasan pendidikan dengan dunia kerja dengan cara menyesuaikan pola pasokan/pendidikan dengan permintaan dari dunia kerja, sehingga kondisi permintaan akan bervariasi berdasarkan sektor bidang kerja pada beberapa sektor lapangan kerja.



Gambar 1.1
Tahapan Penyelarasan

Sumber: Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2010

Pada dasarnya penyalarsan merupakan upaya penyesuaian pendidikan sebagai pemasok SDM dengan dunia kerja yang memiliki kebutuhan dan tuntutan yang dinamis. Konsep penyalarsan mengisyaratkan adanya kebutuhan koordinasi yang baik antara pihak penyedia lulusan pendidikan dengan pihak yang membutuhkan tenaga lulusan. Analisis kebutuhan dunia kerja yang meliputi kualitas/kompetensi dan kuantitas pada lokasi dan waktu yang berbeda merupakan informasi awal yang perlu disediakan dalam proses penyalarsan. Informasi kebutuhan dunia kerja yang akurat dan rencana pengembangan nasional di berbagai sektor diperlukan dalam *reengineering* sistem pendidikan pada setiap level dan bidang dalam menyediakan SDM sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. *Reengineering* seluruh aspek pendidikan, baik pada aspek sarana prasarana, tenaga pendidik, maupun sistem pembelajaran, harus ditujukan untuk pencapaian keselarasan antara pendidikan dan dunia kerja. Upaya penyalarsan yang optimal melalui implementasi rangkaian program yang sistematis dan berkesinambungan sangat diperlukan adanya rasa memiliki dan keterlibatan semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat pada umumnya.

Konsep pengembangan kerangka kerja penyalarsan pendidikan harus memperhatikan tiga komponen utama yaitu sisi permintaan, sisi pasokan dan mekanisme penyalarsan. Dalam merumuskan program penyalarsan yang bersifat komprehensif dibutuhkan gambaran kedepan dari beberapa dimensi yang relevan. Proyeksi kebutuhan kedepan terhadap kompetensi yang dibutuhkan dari dunia kerja dan jumlahnya pada setiap lokasi di Indonesia sangat diperlukan dan harus mengacu pada karakteristik khusus dan potensi yang dimiliki lokasi/daerah tersebut, untuk itu informasi rencana pengembangan diperlukan sebagai dasar peramalan ke depan. Pertimbangan rencana pembangunan daerah dalam program penyalarsan memberikan diharapkan dapat mengurangi terjadinya disparitas dalam hal aksesibilitas dan mampu mendayagunakan potensi yang ada di daerah.

Model permintaan yang didisain harus mampu menghasilkan informasi kebutuhan tenaga kerja dan peluang usaha di pasar kerja dan juga dapat memberikan gambaran fungsi dan peran yang seharusnya dari Kementerian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dan semua Kementerian yang membina berbagai sektor kegiatan ekonomi antara lain sektor manufaktur dan pengolahan, sektor pertanian (pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan), sektor telekomunikasi, sektor perdagangan, sektor perhubungan, sektor PU/jasa konstruksi dan sektor keuangan dan jasa lainnya. Informasi ini dapat menjadi acuan untuk pihak penyedia pendidikan dalam merencanakan dan menetapkan kurikulum serta kebijakan pendidikan lainnya. Kebijakan pembangunan pendidikan seperti: penyediaan sarana pra sarana, peningkatan kompetensi guru atau dosen dalam mendidik siswa atau mahasiswa, dan sistem pembelajaran atau kurikulum yang berlaku harus didasarkan pada kebutuhan penyaluran dengan dunia kerja. Sementara itu, model pasokan juga harus menggambarkan interaksi antar aktivitas input-proses-output yang dikehendaki serta fungsi dan peran dari pemangku kepentingan berada pada sisi pasokan.

Penyaluran pendidikan dengan dunia kerja dilakukan dengan menyesuaikan pola pasokan/pendidikan dengan permintaan dari dunia kerja. Kondisi permintaan akan bervariasi berdasarkan sektor bidang kerja (industri barang dan jasa) pada beberapa sektor lapangan kerja. Disamping itu, juga perlu didasarkan pada peta kondisi berdasarkan empat dimensi yaitu kualitas, kuantitas, lokasi dan waktu. Kondisi permintaan akan mengendalikan sistem pendidikan di sisi pasokan. Sistem pendidikan yang termasuk didalamnya pelatihan perlu didesain sedemikian rupa sehingga mampu menjawab kebutuhan permintaan berdasarkan empat dimensi yang sama. Sehingga perlu dilakukan *deployment* untuk merancang sistem pendidikan yang berkualitas baik dari sisi sarana prasarana, pendidik dan sistem pembelajarannya. Ketiga aspek yang perlu di desain ulang tersebut dilakukan pada setiap level pendidikan pada pendidikan formal dan setiap jenis pelatihan serta aktivitas pendidikan lainnya.

Salah satu bentuk penyaluran pendidikan dengan dunia kerja telah diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional melalui unit kerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan yaitu penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup atau *life skills*.

Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan. Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan terampil menjaga kelangsungan hidup, dan perkembangannya di masa datang (Slamet PH; 2009).

Program *life skills* ini sebenarnya sudah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal¹ sejak tahun 2002. Program ini dilaksanakan dengan cara pemberian *blockgrant* bagi masyarakat, yang disalurkan melalui lembaga kursus dan pelatihan dan lembaga pendidikan nonformal lainnya².

Pada prinsipnya, program pendidikan kecakapan hidup dikembangkan dengan tujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat miskin secara ekonomi sehingga mereka dapat meningkatkan taraf hidupnya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dikembangkan program-program kursus dan pelatihan berbasis pendidikan kecakapan hidup, yang diarahkan pada pemberian pengetahuan dan keterampilan praktis yang fungsional dalam kehidupan sehari-hari, sebagai bekal untuk bekerja dan/atau pengembangan kemampuan berwirausaha.

Sejak tahun 2008, dalam rangka memenuhi kebutuhan segala lapisan masyarakat program pendidikan kecakapan hidup pada Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal (Ditjen PNFI) ini, mulai beragam. Adapun

¹ Nama Direktorat Jenderal ini sudah beberapa kali mengalami perubahan. Tahun 2002 dengan nama Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga. Sedangkan Direktorat yang menangani bidang kursus saat tersebut adalah Direktorat Pendidikan Masyarakat. Tahun 2005, Direktorat Pendidikan Masyarakat dilebur menjadi 3 Direktorat yaitu: 1) Direktorat Pendidikan Masyarakat, 2) Direktorat Pendidikan Kesetaraan, dan 3) Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Sekarang bernama Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI).

² Untuk lebih jelasnya posisi program *life skills* pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal di Kementerian Pendidikan Nasional akan dijelaskan lebih lanjut pada BAB II

program pendidikan kecakapan hidup yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 – 2009 meliputi: Kursus Wirausaha Kota (KWK), Kursus Wirausaha Desa (KWD), Kursus Para Profesi (KPP), dan Pendidikan Kecakapan Hidup Lembaga Kursus dan Pelatihan (PKH-LKP).

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup ini sangat ditentukan oleh kesiapan, kesanggupan, dan komitmen dari lembaga/organisasi penyelenggara program pendidikan kecakapan hidup dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, penyaluran dana *blockgrant* telah dilakukan melalui seleksi yang ketat³ terhadap lembaga/organisasi calon penyelenggara program pendidikan kecakapan hidup.

Proses penyaluran *blockgrant* pendidikan kecakapan hidup ini dilakukan melalui mekanisme dan prosedur yang ketat dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait. Kegiatan ini meliputi pelaksanaan sosialisasi, penerimaan proposal, penilaian proposal, penetapan, penyaluran dana, dan monitoring pelaksanaan program.

Setelah program-program ini berjalan lebih dari empat tahun belum ada evaluasi untuk mengetahui efektifitas dari program-program tersebut. Apakah benar program-program tersebut telah dapat meningkatkan kompetensi peserta didik? Apakah aksesibilitas para peserta program terhadap peluang kerja dan/atau dalam merintis usaha mandiri menjadi meningkat. Padahal evaluasi adalah penting, setidaknya untuk: 1) memperbaiki kualitas program, jika ternyata dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan; 2) atau mungkin, jika ternyata program tidak efektif atau tidak berhasil sama sekali, dapat diambil keputusan agar program dihentikan dan diganti dengan program lain yang akan lebih membawa hasil.

³ Tahapan seleksi meliputi: penilaian administrasi dan substansi proposal; penilaian lapangan melalui visitasi langsung ke lembaga yang bersangkutan; dan hasil pleno tim penilai setelah visitasi lapangan.

1.2. Perumusan Masalah

Seperti sudah dijelaskan di atas, sejauh ini program pendidikan kecakapan hidup belum dievaluasi sama sekali oleh perancang program dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, padahal evaluasi ini penting dilakukan. Berdasarkan pada alasan ini maka pertanyaan berbagai pihak seperti: Sudah berhasil dan tepat sasaran kah program pendidikan kecakapan hidup ini, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut? sama sekali belum bisa dijawab oleh perancang program. Untuk bisa menjawab pertanyaan tentang keberhasilan program ini evaluasi perlu dilakukan.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan mendapatkan bukti empirik efektifitas program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dan bukti teoritis tentang perbandingan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Adapun yang dimaksud dengan efektifitas, dalam kaitan dengan penelitian ini, adalah: tingkat keberhasilan dari program pendidikan kecakapan hidup tersebut.

Manfaat utama yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan untuk menetapkan langkah-langkah yang akan memperbaiki program dan keberlanjutan usaha menselaraskan output pendidikan dengan kebutuhan/permintaan masyarakat dan dunia usaha.

1.4. Batasan Penelitian

Penelitian ini membatasi lingkup program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan tahun 2008 dan 2009, termasuk permasalahan-permasalahan dan solusi yang diambil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.

1.5. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka seluruh data monitoring yang tersedia akan diolah dan diperiksa. Dari data itu, selanjutnya, akan dicari keterangan tentang efektif atau tidaknya program pendidikan kecakapan hidup.

Selanjutnya dalam rangka mempertajam analisis, akan diberikan masukan kepada penyelenggara program tentang hirarki faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Untuk itu penulis menggali berbagai informasi dari para ekspert serta mengolah informasi-informasi tersebut dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).

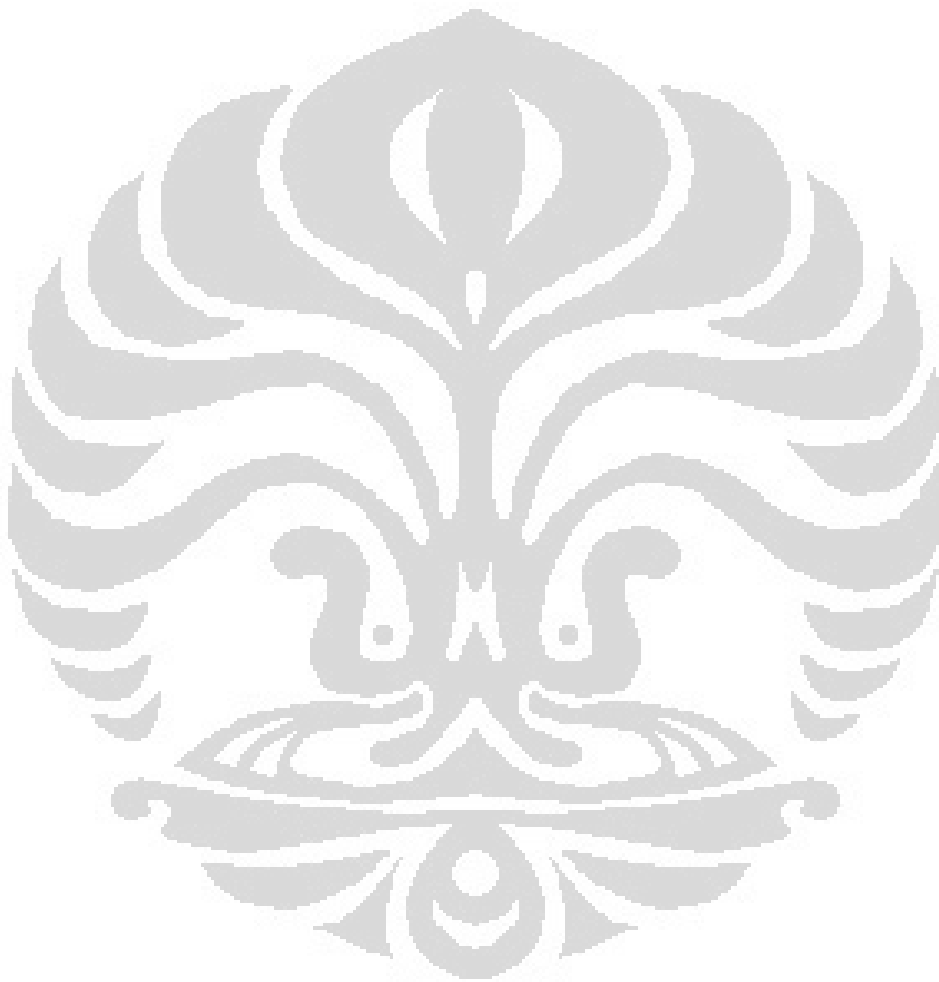
1.6. Hipotesa Penelitian

Dugaan sementara penulis terhadap pelaksanaan program ini adalah “Pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup dinilai efektif karena menjadikan orang yang tidak bekerja menjadi bekerja atau berwirausaha”.

1.7. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian tesis ini ditulis ke dalam enam bab. Bab I, Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, hipotesa penelitian dan sistematika penulisan. Bab II, Program Pendidikan Kecakapan Hidup Pada Kementerian Pendidikan Nasional, memuat tentang gambaran profil Kementerian Pendidikan Nasional, apa dan bagaimana program pendidikan kecakapan hidup. Bab III, Tinjauan Literatur, memuat tinjauan teori efektifitas program, kerangka teoritis penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup, tinjauan literatur hasil-hasil studi dan model-model pendidikan kecakapan hidup yang berhubungan dengan permasalahan penelitian serta teori-teori yang terkait dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Bab IV, Metodologi Penelitian, merupakan bagian yang menggambarkan pengumpulan data, pengolahan data, sampel dan sumber serta

koleksi data. Bab V, Hasil dan Pembahasan, berisi hasil data olahan beserta analisis data. Terakhir adalah Bab VI, Kesimpulan dan Rekomendasi, yang akan memaparkan hasil penelitian secara keseluruhan dalam bentuk kesimpulan dan implikasi maupun rekomendasi kebijakan.



BAB 2

PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

2.1. Struktur Organisasi pada Kementerian Pendidikan Nasional

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi, kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I kementerian negara, Pasal 436 mengatur susunan organisasi eselon I Kementerian Pendidikan Nasional terdiri atas:

1. Wakil Menteri Pendidikan Nasional;
2. Sekretariat Jenderal;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
4. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar;
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah;
6. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
7. Inspektorat Jenderal;
8. Badan Penelitian dan Pengembangan;
9. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
10. Badan Pengembangan Sumber Daya Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Staf Ahli Bidang Hukum;
12. Staf Ahli Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan;
13. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional;
14. Staf Ahli Bidang Organisasi dan Manajemen; dan
15. Staf Ahli Bidang Budaya dan Psikologi Pendidikan.

2.2. Sekilas Tentang Pendidikan Nonformal

Dibawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal terdapat empat Direktorat yaitu:

1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

2. Direktorat Pendidikan Masyarakat
3. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI
4. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu: 1) jalur pendidikan formal mulai Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi; 2) jalur pendidikan non formal yang lebih menekankan pada kebutuhan masyarakat luas sehingga pendidikan non formal berfungsi pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal dalam menunjang pendidikan sepanjang hayat; dan 3) jalur pendidikan informal yang cakupannya sangat luas, tidak terstruktur dan lebih berorientasi pada pendidikan keluarga dan otodidak dalam rangka pengembangan potensi diri dan membentuk pribadi individu.

Secara terminologi, pendidikan non formal adalah pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah baik yang berjenjang maupun tidak berjenjang, berkesinambungan maupun tidak berkesinambungan, dilembagakan dan belum dilembagakan, dan berlangsung sepanjang hayat.

Fungsi pendidikan non formal menurut undang-undang no.20 tahun 2003 ada dua, yaitu: (1) pendidikan non formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat, dan (2) pendidikan non formal dan informal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Tujuan inti dari pendidikan non formal adalah: (1) memberikan layanan pendidikan dan pelatihan kepada warga masyarakat luas yang kebutuhannya tidak mungkin dapat terlayani melalui jalur pendidikan formal, (2)

memberikan layanan pendidikan dan pelatihan kepada warga masyarakat yang tidak terjangkau melalui pendidikan formal meskipun pada kelompok usia sekolah (pengganti, penambah, pelengkap), dan (3) meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan profesionalitas peserta didik sesuai dengan program pembelajaran yang diikuti.

Sasaran pendidikan non formal adalah semua warga bangsa baik laki-laki maupun perempuan, sejak usia dini sampai usia lanjut sesuai dengan kebutuhannya. Secara khusus, sasaran prioritas pendidikan non formal adalah: (1) anak usia dini usia 0 - 6 tahun, (2) penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas, (3) anak usia wajib belajar 9 tahun yang tidak terlayani melalui jalur pendidikan formal, dan (4) penduduk usia produktif 18 - 35 tahun yang tidak sekolah dan tidak bekerja berasal dari keluarga kurang mampu.

Ciri utama yang membedakan pendidikan non formal dengan pendidikan formal adalah “flexibilitas” atau keluwesan, artinya: program pembelajaran yang diselenggarakan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar; program pembelajaran tidak terstruktur secara ketat dan dapat dilaksanakan dimana dan kapan saja tergantung dari waktu luang peserta didik; usia tidak dibatasi dan tergantung dari minat peserta didik; mengedepankan kompetensi dari pada kualifikasi (latar belakang pendidikan formal); dan mengutamakan pendekatan andragogi dari pada pedagogi.

Program pendidikan non formal meliputi: (1) pendidikan kecakapan hidup, (2) pendidikan anak usia dini, (3) pendidikan kepemudaan, (4) pendidikan pemberdayaan perempuan, (5) pendidikan keaksaraan, (6) pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, (7) pendidikan kesetaraan, dan (8) pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Sedangkan satuan pendidikan non formal terdiri dari: (1) lembaga kursus, (2) lembaga pelatihan, (3) kelompok belajar, (4) pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM), (5) majelis ta’lim, dan (6) satuan pendidikan sejenis.

2.3. Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Beberapa literatur menyebutkan bahwa Kursus didefinisikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Kepdirjen Diklusepora) Nomor: KEP-105/E/L/1990 sebagai berikut:

Kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat selanjutnya disebut kursus, adalah satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Kursus dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan swadana masyarakat.

Kursus sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jalur pendidikan formal. Selain memberikan kesempatan bagi peserta didik yang ingin mengembangkan keterampilannya pada jenis pendidikan tertentu yang telah ada di jalur pendidikan formal juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan pendidikan keterampilannya yang tidak dapat ditempuh dan tidak terpenuhi pada jalur pendidikan formal.

Agar penyelenggaraan kursus tetap relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta mampu memberikan kontribusi terhadap tuntutan masyarakat, penyelenggaraan kursus ini harus senantiasa mendapatkan pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan.

Pembinaan terhadap kursus ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 0151/U/1977 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat. Kepmendikbud tersebut mengatur tugas dan wewenang pembinaan Dirjen Diklusepora antara lain; 1) bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan teknis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dan 2) Menyusun pola dasar pembinaan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, baik di

pusat maupun daerah. Fungsi pembinaan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kepmendikbud Nomor 0150b/U/1981 terdiri dari merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan: 1) pembakuan dan penyelesaian kurikulum dan silabus, serta alat perlengkapan belajar, 2) pengadaan buku pelajaran, buku pedoman/petunjuk, dan alat perlengkapan, serta prasarana dan sarana belajar minimal lainnya, 3) penataran dan penyegaran pamong belajar/penyelenggara, sumber belajar/guru dan tenaga teknis lainnya, 4) penyelenggaraan dan pelaksanaan evaluasi belajar, termasuk ujian, 5) pembimbingan, dan penyuluhan, dan evaluasi, 6) penyelenggaraan dan pelaksanaan lomba tiap jenis keterampilan, 7) pengadaan Surat Tanda Selesai Belajar dan Ijazah, 8) penyusunan laporan pembinaan dan evaluasi kegiatan, 9) studi kasus survai, konsultasi, simposium, seminar, lokakarya, penataran, dan rapat kerja tiap program PLSM, dan 10) hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan program PLSM.

Selanjutnya pembinaan kursus ini dijabarkan dalam Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor: KEP-105/E/L/1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat. Di dalam keputusan ini ditegaskan bahwa pembinaan adalah usaha pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk merencanakan, mengatur, mengawasi dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengembangkan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat. Pada saat itu, pembinaan terhadap kursus tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Pembinaan pendidikan luar sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, badan, kelompok, atau perorangan merupakan tanggung jawab Menteri", ayat (2) "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri".

Ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 0151/U/1977 yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga dalam

ruang lingkup tugas dan wewenang pembinaannya: 1) Bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan teknis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat; dan 2) Menyusun pola dasar pembinaan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, baik di pusat maupun daerah.

Fungsi dan Kegiatan Pembinaan Kursus tertuang dalam Kepmendikbud Nomor: 0150b/U/1981 seperti telah disebutkan di atas, disebutkan bahwa: "Untuk setiap kegiatan dimaksud petunjuk pelaksanaannya diatur oleh Dirjen Diklusepora."

Selanjutnya Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor: KEP-105/E/L/1990 menyebutkan bahwa Pembina adalah staf jajaran Depdikbud dalam hal ini Direktorat Jenderal Diklusepora (Ditjen Diklusepora) di tingkat pusat dan daerah. Sejak terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional (terakhir dengan Keputusan Mendiknas Nomor 31 Tahun 2007) yang mewadahi terbentuknya Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, maka pembinaan kursus yang tadinya dilaksanakan oleh Subdit Pendidikan Berkelanjutan pada Direktorat Pendidikan Masyarakat secara penuh menjadi tanggung jawab Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

Secara konseptual Kursus didefinisikan sebagai proses pembelajaran tentang pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu lembaga yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industri. Sedangkan Kelembagaan Pendidikan Nonformal adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal bagi masyarakat, baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun masyarakat. Pembinaan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif, efisien, berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang lebih. Sehingga Pembinaan Kursus dan Kelembagaan adalah merupakan pembinaan

terhadap kursus dan lembaga PNF melalui proses pembelajaran dan manajemen kelembagaan PNF sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, memiliki kompetensi dan berdaya saing di kancah pasar global.

2.4. Program Pendidikan Kecakapan Hidup

Kebijakan pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dalam penyelenggaraan pendidikan nasional bertumpu pada 5 prinsip: 1) ketersediaan berbagai program layanan pendidikan; 2) biaya pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat; 3) semakin berkualitasnya setiap jenis dan jenjang pendidikan; 4) tanpa adanya perbedaan layanan pendidikan ditinjau dari berbagai segi; dan 5) jaminan lulusan untuk melanjutkan dan keselarasan dengan dunia kerja.

Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, sebagai salah-satu unit utama di Kementerian Pendidikan Nasional dalam mewujudkan prinsip tersebut menyediakan berbagai program layanan pendidikan diantaranya program kursus dan pelatihan kerja. Arah program kursus dan pelatihan tersebut adalah pembekalan kepada peserta didik dengan berbagai keterampilan untuk dapat bekerja (pekerja) atau usaha mandiri (berwirausaha). Program-program tersebut diantaranya: 1) Kursus Para Profesi; 2) Kursus Wirausaha Kota; 3) Kursus Wirausaha Desa; dan 4) Pendidikan KecakapanHidup bagi Lembaga Kursus dan pelatihan.

KPP adalah program pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pendidikan kecakapan hidup yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu seperti operator dan teknisi yang bersertifikat kompetensi sebagai bekal untuk bekerja. Program KPP dilaksanakan dengan pendekatan “4 in 1”, yaitu (1) melalui analisis kebutuhan pelatihan (*training need assessment-job order*); (2) pelatihan berbasis kompetensi (*competency based training/CBT*); (3) sertifikasi kompetensi; dan (4) jaminan

penempatan kerja (*job placement*). Keterampilan yang diselenggarakan dalam KPP adalah jenis keterampilan sesuai dengan pesanan pengguna tenaga kerja (*job order/demand letter attachment*) yang menjadi pedoman lembaga penyelenggara KPP.

Jenis keterampilan yang dapat diselenggarakan melalui program KPP, antara lain: otomotif, elektronika, spa, *cullinary*, komputer, akupunktur, PLRT plus, garmen/menjahit, *baby sitter*, *care giver*, pariwisata, perhotelan, dan jenis keterampilan lainnya sesuai *job order/demand letter attachment*.

KWK adalah program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat di bidang usaha yang berspektrum perkotaan. Program ini dilakukan guna memperoleh pengetahuan, keterampilan, menumbuh-kembangkan sikap mental berwirausaha dalam mengelola diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha. Program belajar kursus wirausaha kota berorientasi potensi perkotaan untuk dan diarahkan pada penguasaan kompetensi di bidang jasa, antara lain: tata kecantikan kulit/rambut; tata rias pengantin; jasa; tata boga; otomotif; elektronika; spa; komputer; pariwisata (perhotelan); dan jenis keterampilan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja atau peluang usaha di perkotaan.

KWD adalah program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh lembaga yang bergerak dibidang pendidikan nonformal dan informal untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum mendapat kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan menumbuhkembangkan sikap mental berwirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk berusaha atau bekerja. Yang dimaksud dengan desa dalam program kursus wirausaha desa adalah jenis kecakapan yang berspektrum pedesaan bukan wilayah pedesaan.

Pendidikan kecakapan hidup lembaga kursus dan pelatihan adalah kursus dan pelatihan berbasis pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), untuk memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat guna memperoleh pengetahuan, keterampilan, menumbuhkembangkan sikap mental profesional, serta kemampuan mengelola diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja atau berwirausaha.

Tabel 2.1
Jenis Program Pendidikan Kecakapan Hidup
Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Tahun 2008 - 2009

No.	Program	Kebijakan	Sasaran
1.	Kursus Kewirausahaan Kota	Menyiapkan pekerja di daerah perkotaan	Prioritas DO SMA/SMK
2.	Kursus Kewirausahaan Desa	Mengembangkan usaha produktif dengan spectrum pedesaan (sumber daya alam)	Prioritas lulus SMP/ sederajat tidak lanjut
3.	Kursus Para Profesi	Menyiapkan kebutuhan tenaga kerja nasional dan internasional	Warga masyarakat lulus SMA/SMK/ sederajat tidak lanjut
4.	Pendidikan Kecakapan Hidup Lembaga Kursus dan Pelatihan	Harmonisasi pendidikan vokasi	Masyarakat kota dan desa sesuai dengan vokasi yang ada

Indikator keberhasilan program-program di atas dapat dilihat dari: (1) Peserta didik yang dilatih tepat sasaran; (2) Minimal 90% peserta didik menyelesaikan program sampai tuntas; dan (3) Minimal 80% lulusan berwirausaha (usaha mandiri) atau bekerja pada dunia usaha dan industri⁴.

Kriteria sasaran program pendidikan kecakapan hidup ini adalah: (1) penduduk usia produktif (18 – 35 tahun); (2) menganggur; (3) mempunyai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung; (4) prioritas berdomisili tidak jauh dari tempat penyelenggaraan program; (5) tidak dalam proses masih sekolah; dan (6) diprioritaskan dari keluarga tidak mampu.

⁴ Merupakan indikator yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008, 2009, dan 2010.

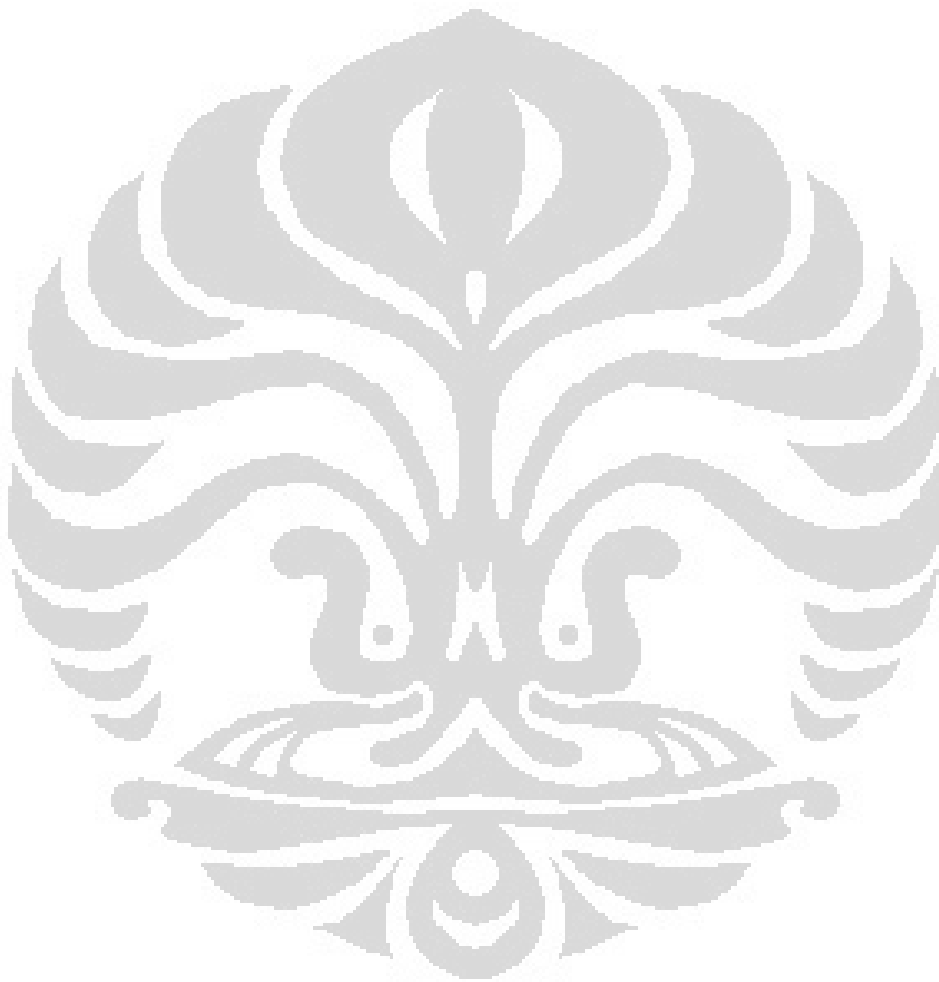
Lembaga penyelenggara program pendidikan kecakapan hidup sangat beragam mulai dari lembaga kursus dan pelatihan yang ber-NILEK (Nomor Induk Lembaga Kursus) sampai dengan lembaga pelatihan pada industri, serta lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. Berikut penyebaran lembaga kursus dan pelatihan yang teridentifikasi melalui nomor induk lembaga kursus (NILEK) menurut wilayah.

Tabel 2.2
Penyebaran Lembaga Kursus dan Pelatihan Menurut Wilayah Tahun 2010

No.	Provinsi	Jumlah
1	Nanggroe Aceh Darussalam	247
2	Sumatera Utara	1,275
3	Sumatera Barat	235
4	Riau	164
5	Kepulauan Riau	263
6	Jambi	239
7	Bengkulu	214
8	Sumatera Selatan	504
9	Kepulauan Bangka Belitung	125
10	Lampung	439
11	Banten	352
12	DKI Jakarta	609
13	Jawa Barat	2,127
14	Jawa Tengah	1,686
15	D.I. Yogyakarta	228
16	Jawa Timur	2,434
17	Bali	406
18	Nusa Tenggara Barat	329
19	Nusa Tenggara Timur	303
20	Kalimantan Barat	191
21	Kalimantan Tengah	81
22	Kalimantan Selatan	231
23	Kalimantan Timur	252
24	Sulawesi Utara	210
25	Gorontalo	84
26	Sulawesi Tengah	206
27	Sulawesi Selatan	401
28	Sulawesi Tenggara	177
29	Sulawesi Barat	75
30	Maluku	42
31	Maluku Utara	93
32	Papua	40
33	Papua Barat	14
JUMLAH		14,276

Sumber data: Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, 2011

Sebanyak 14.276 lembaga kursus dan pelatihan tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Semua lembaga ini bervariasi dalam berbagai hal seperti pengelolaan, sarana prasarana, maupun tenaga pendidik dan kependidikan. Namun distandarkan dengan standar lembaga kursus yang sama dan diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu; rintisan, berstandar nasional, dan berstandar internasional.



BAB 3

TINJAUAN LITERATUR

Karena tujuan utama tesis ini adalah ingin mengetahui efektifitas program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan Kementerian Pendidikan Nasional maka dirasa amat relevan untuk membicarakan perihal arti efektifitas, utamanya efektifitas program yang dijalankan oleh pemerintah. Selain dari pada itu, karena program yang dipermasalahkan di tesis ini adalah program di bidang pendidikan maka akan diuraikan pula, di bab ini, perihal pembenaran (justifikasi) – menurut teori ekonomi publik—campur tangan pemerintah di bidang pendidikan ini.

3.1 Arti Efektifitas

Efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti berhasil atau mencapai sasaran. Dalam ensiklopedia Administrasi, efektifitas itu merupakan suatu keadaan yang mendukung terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Menurut Stonner (1996: 9) efektifitas adalah kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai berarti melakukan hal yang tepat. Selanjutnya menurut Hersey (1996:145-147) efektifitas berkaitan erat bukan hanya dengan penggunaan sumberdaya, dana dan sarana dan prasarana kerja tetapi juga dengan pencapaian tujuan dalam batas waktu yang telah ditetapkan jangka pendek atau jangka panjang. Dengan demikian pengertian efektifitas disamping dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan, efektifitas juga dapat merupakan tolok ukur keberhasilan suatu organisasi.

Keitz (1996:70) menyebutkan bahwa efektifitas sebagai fungsi bersama dari efisiensi dan efektifitas kebijakan jangka pendek dalam rangka usaha mencapai keuntungan maksimum bagi organisasi. Dari berbagai uraian terdahulu, terlihat bahwa hal penting untuk mencapai tingkat efektifitas suatu program organisasi ditentukan oleh administratur sebagai pimpinan organisasi tersebut yang menurut Minstberg dikutip oleh Davis (1989: 204) menyatakan bahwa peran pimpinan

merupakan peran yang paling penting dari semua peran. Tanpa kepemimpinan, organisasi hanya akan merupakan kegagalan.

Selanjutnya Atmosudirjo (1996: 79) menyatakan terdapat beberapa cara pendekatan terhadap efektifitas program suatu organisasi antara lain yang terpenting adalah: pendekatan yang mencapai tujuan, pendekatan masukan- input, pendekatan biaya, pendekatan pemuasan customer, dan pendekatan daya saing.

Untuk mengukur efektifitas, menurut Steers sering dipergunakan kriteria yang terdiri dari: kemampuan penyesuaian diri, produktivitas, kepuasan kerja, kemampuan berlaba, pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Kriteria-kriteria tersebut telah diidentifikasi dengan berbagai alternatif sebagai alat ukur efektifitas. Menurut Campbell (dalam Gibson, 1996: 50) menyebutkan terdiri dari: (1) Efisiensi, meliputi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya, (2) Produksi, meliputi kemampuan menghasilkan jasa seperti yang dituntut oleh lingkungan; berkaitan dengan hasil atau manfaat program, (3) Mutu, berkaitan dengan kemampuan memenuhi harapan pengguna untuk kinerja produk dan jasa, kualitas program, manfaat program, dan (4) Fleksibilitas, kemampuan beradaptasi dalam rangka menghadapi permintaan pelanggan.

Secara umum, kata efektif menunjuk pada sampai seberapa jauh tujuan yang terlebih dahulu ditentukan dapat dicapai. Hidayat (1986) mengatakan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah tercapai. Semakin besar presentase target yang dapat dicapai maka makin tinggi efektifitas kegiatan.

Jadi, efektifitas kegiatan diukur dengan hasil/output yang dicapai dibandingkan dengan targetnya, atau yang ingin dicapai.

$$E = O^r/O^t;$$

Di mana:

E : Efektifitas;

O^r : Output/Hasil yang dicapai (*realized*);

O^t : Output/hasil yang ingin dicapai (*targeted*)

Semakin mendekati 1 (satu) maka semakin efektif; dan semakin jauh dari 1 (satu), semakin tidak efektif.

3.2 Pendidikan Kecakapan Hidup (*life skills education*)

Brolin (1989) mengatakan bahwa *life skills* adalah interaksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting dimiliki seseorang sehingga mereka dapat hidup mandiri. Menurut beliau, *life skills* dikelompokkan ke dalam tiga yaitu: (1) kecakapan hidup sehari-hari (*daily living skill*), yang meliputi pengelolaan kebutuhan pribadi, keuangan pribadi, rumah pribadi, kesadaran kesehatan, kesadaran keamanan, makanan-gizi, pakaian, kesadaran pribadi sebagai warga negara, waktu luang, rekreasi, dan kesadaran lingkungan; (2) kecakapan hidup pribadi/sosial (*personal/social skill*) meliputi kesadaran diri (minat, bakat, sikap, kecakapan), percaya diri, komunikasi dengan orang lain, tenggang rasa dan kepedulian terhadap sesama, hubungan antar personal, pemahaman dan pemecahan masalah, menemukan dan mengembangkan kebiasaan positif, kemandirian dan kepemimpinan; dan (3) kecakapan hidup bekerja (*accupational skill*) meliputi kecakapan memilih pekerjaan, perencanaan kerja, kesiapan keterampilan kerja, latihan keterampilan, penguasaan kompetensi, menjalankan suatu profesi, kesadaran untuk menguasai berbagai keterampilan dan kemampuan dalam menguasai dan menerapkan teknologi, merancang dan melaksanakan proses pekerjaan, dan menghasilkan produk barang dan jasa.

Berbeda dengan Brolin, WHO (1997) memberikan pengertian bahwa kecakapan hidup adalah berbagai keterampilan/kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku positif yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam hidup sehari-hari secara

efektif. WHO mengelompokkan kecakapan hidup kedalam lima kelompok yaitu; (1) kecakapan mengenai diri (*self awareness*) atau kecakapan pribadi (*personal skill*), (2) kecakapan sosial (*social skill*), (3) kecakapan berfikir (*thinking skill*), (4) kecakapan akademik (*academic skill*), dan (5) kecakapan kejuruan (*vocational skill*).

Di lain pihak, Malik Fajar (2002), Mantan Menteri Pendidikan Nasional di era Presiden Abdurrahman Wahid, mendefinikan kecakapan hidup sebagai kecakapan untuk bekerja selain kecakapan untuk berorientasi ke jalur akademik.

3.3 Pentingnya Campurtangan Pemerintah Dalam Upaya Meningkatkan Kecakapan Hidup Masyarakat

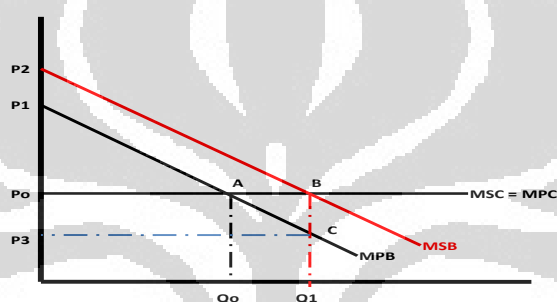
Karena kecakapan hidup itu penting bagi semua orang, sementara semua orang tidak berkemampuan sama untuk meraih kecakapan hidup maka perlu ada pihak lain yang membantu orang-orang yang kurang/tidak mampu untuk menggapai kecakapan hidup agar mereka pun akhirnya dapat menggapai kecakapan hidup. Pihak lain itu bisa saja saudaranya, tetangganya, perusahaan swasta yang menyadari tanggungjawabnya terhadap kehidupan sosial (*social respionsibility awareness*), atau pemerintah. Tetapi, mengingat manfaat sosial dari kepemilikan kecakapan hidup ini pada masyarakat demikian besar maka pada pundak pemerintahlah tanggungjawab membantu mereka yang kurang/tidak mampu ini terutama terletak.

Di negara-negara berkembang, seperti Indonesia, jumlah yang tidak/kurang mampu umumnya sangat banyak,⁵ maka bila hanya mengandalkan pihak saudara atau tetangga, dan bahkan perusahaan, untuk membantu yang tidak/kurang mampu tadi niscaya akan amat sedikit yang terbantu. Karena itu, agar yang terbantu ini bisa berjumlah banyak, bantuan dari pemerintah yang sangat diperlukan.

⁵ Setidaknya ini terlihat dari cukup banyaknya penduduk yang tergolong miskin dan rentan miskin.

Bahwa manfaat sosial dari kecakapan hidup itu demikian besar sudah banyak dikemukakan di berbagai tulisan dan studi pakar. Kerap kali dikatakan bahwa kecakapan hidup masyarakat yang dicerminkan oleh capaian tingkat pendidikan, kesehatan, keterampilan dan penguasaan teknologi berjalan searah dengan kehandalan bangsa dan Negara.

Berikut di bawah ini adalah argumentasi yang kerap diajukan di ilmu kebijakan publik tentang pentingnya campurtangan pemerintah di bidang pendidikan, termasuk pendidikan untuk menggapai kecakapan hidup.



Gambar 3.1
Kurva Bentuk Campurtangan Pemerintah di Bidang Pendidikan

Katakan, MPB adalah manfaat privat (pribadi) marjinal dari pendidikan untuk meraih kecakapan hidup, dan MSB adalah manfaat sosial marjinalnya. Jarak antara kurva MSP dengan MSB menunjukkan besarnya eksternalitas dari pendidikan untuk kecakapan hidup ini. Eksternalitas yang paling nyata dari pendidikan kecakapan hidup tentunya adalah produktivitas yang tinggi, yang dibutuhkan bagi kehandalan bangsa dan Negara. Kurva MSP, yang diasumsikan sama dengan MSC, adalah kurva biaya privat dan sosial dari pendidikan untuk kecakapan hidup. Dalam gambar ini kurva MPC atau MSC datar, artinya biaya untuk menambah/mengurangi setiap jasa pendidikan kecakapan hidup konstan (*constant marginal cost*).

Andai pendidikan untuk kecakapan hidup ini sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat (swasta) maka jumlah yang akan terdidik hanya sebesar Q_0 , karena pada biaya marjinal P_0 permintaan dan penawaran berpotongan di titik A, pada Q_0 . Bagi masyarakat keseluruhan, sesungguhnya permintaan terhadap jasa pendidikan untuk kecakapan hidup ini pada P_0 adalah Q_1 , namun karena sebagian masyarakat tidak memiliki kemampuan ekonomi maka hanya Q_0 saja yang dapat menikmati pendidikan itu; sejumlah Q_0-Q_1 tidak dapat menikmati atau akses ke pendidikan seperti itu. Agar pendidikan untuk kecakapan hidup ini bisa sama dengan Q_1 perlu ada subsidi pemerintah kepada penyelenggara pendidikan. Subsidi itu adalah sebesar segiempat P_3P_0BC . Dengan adanya subsidi itu, biaya untuk mengikuti pendidikan tidak lagi sebesar P_0 melainkan P_3 .

3.4 Studi Terdahulu Tentang Pendidikan Kecakapan Hidup

Beberapa studi tentang Pendidikan Kecakapan Hidup pernah dilakukan oleh beberapa orang, diantaranya adalah penelitian oleh Hiryanto dan Lutfi Wibawa, 2009. Penelitian tersebut bertujuan untuk menggali informasi mengenai efektifitas program Kursus Para Profesi (KPP) dalam mengurangi angka pengangguran di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari *Context, Input, Process, dan Product*.

Penelitian tersebut merupakan penelitian Evaluasi dengan pendekatan Deskriptif kualitatif. Subyek penelitiannya adalah penyelenggara program KPP, Instruktur program, warga belajar atau peserta didik dan mitra kerja yang terdiri dari LPK Desanta Yogyakarta, LPK Mahkota Bina Karya dan LPK MaCell Education Center. Penelitian dilakukan bulan Mei sampai September 2009, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data dilakukan dengan tahapan reduksi data, tahap *display* data dan tahap Pengumpulan keputusan dan verifikasi. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh hasil sebagai berikut: Kriteria input pada program KPP dapat diungkapkan secara umum seluruh unsur yang terlibat dalam program sudah sesuai dan efektif. Process pembelajaran pada program KPP di 3 LPK termasuk kategori baik dan efektif. Dilihat dari product dapat disimpulkan bahwa program KPP yang diselenggarakan oleh lembaga mitra pemerintah sudah efektif dan sesuai dengan kriteria yang disyaratkan walaupun belum mendapat sertifikat secara nasional. Hal ini dapat diungkapkan bahwa jumlah peserta yang mampu menyelesaikan program pelatihan yaitu mencapai 90 %, kehadiran sesuai kriteria lebih dari 90 %, lulusan yang dapat ditempatkan lebih dari 80 %. Sehingga dapat diungkapkan bahwa penyelenggaraan program KPP mampu mengurangi angka pengangguran di Daerah Istimewa.

3.5 Teori Analytical Hierarchy Process (AHP)

Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an. Metode ini merupakan salah satu model pengambilan keputusan multi kriteria yang dapat membantu kerangka berpikir manusia di mana faktor logika, pengalaman, pengetahuan, emosi, dan rasa dioptimalkan ke dalam suatu proses sistematis.

AHP adalah metode pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk menentukan prioritas dari beberapa alternatif yang ada ketika beberapa kriteria harus dipertimbangkan, serta mengizinkan pengambil keputusan (*decision makers*) untuk menyusun masalah yang kompleks ke dalam suatu bentuk hirarki atau serangkaian level yang terintegrasi.

Pada dasarnya AHP merupakan metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan tidak terstruktur ke dalam kelompok-kelompoknya, dengan mengatur kelompok tersebut ke dalam suatu hirarki, kemudian memasukkan nilai numerik sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif. Dengan suatu sintesis maka akan dapat ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi.

AHP banyak digunakan untuk pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hal perencanaan, penentuan alternatif, penyusunan prioritas, pemilihan kebijakan, alokasi sumber daya, penentuan kebutuhan, peramalan hasil, perencanaan hasil, perencanaan sistem, pengukuran performansi, optimasi, dan pemecahan konflik.

The Analytic Hierarchy Process adalah salah satu bentuk model pengambilan keputusan yang pada dasarnya berusaha menutupi semua kekurangan dari model-model sebelumnya⁶. Saaty menyebutkan *the analytic hierarchy process (AHP) is a theory of measurement*⁷.

Peralatan utama dari model ini adalah sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia. Dengan menyusun hirarki suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur kemudian dipecah ke dalam kelompok-kelompok untuk diatur menjadi suatu bentuk hirarki.

Perbedaan AHP dengan model pengambilan keputusan yang lain adalah terletak pada jenis inputnya. Model yang sudah ada umumnya memakai input data kuantitatif atau data sekunder, sedang model AHP memakai persepsi manusia yang dianggap “ekspert” sebagai input utamanya. Ekspert disini lebih mengacu pada orang yang mengerti benar permasalahan yang diajukan, merasakan akibat suatu masalah atau punya kepentingan terhadap masalah tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa model AHP adalah suatu model pengambilan keputusan yang komprehensif, karena dapat memperhitungkan hal-hal kuantitatif dan kualitatif sekaligus (Bambang, 1992).

⁶ Bambang Permadi S, “AHP”, PAU-EK-UI, Jakarta, 1992

⁷ Disampaikan Prof. Saaty pada symposium PAU-EK-UI Jakarta bulan Desember 1989 (Dr. Iwan Jaya Azis, Laporan penelitian : pendekatan “multicriteria decision making” : analytic hierarchy process, PAU-EK-UI, 1990/1991)

3.5.1 Prinsip-prinsip Pokok AHP

Empat Prinsip-prinsip pokok AHP, yaitu:

1. *Decomposition*

Setelah persoalan didefinisikan, tahapan yang perlu dilakukan adalah *decomposition* yaitu memecah persoalan-persoalan yang utuh menjadi unsur-unsurnya.

Melalui proses dekomposisi, persoalan yang utuh dipecah ke dalam unsur-unsur yang homogen hingga menjadi terpisah dan menghasilkan suatu hirarki. Jika hasil yang diperoleh ingin lebih akurat, maka pemecahan dilakukan sampai unsur-unsur tadi tidak mungkin dipecah lagi. Ada dua jenis hirarki yaitu lengkap dan tak lengkap. Disebut hirarki lengkap jika semua unsur ada pada tingkat berikutnya, jika tidak demikian, hirarki yang terbentuk dinamakan hirarki tidak lengkap.

2. *Comparative Judgement*

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan kriteria di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena ia akan berpengaruh dalam menentukan prioritas dari elemen-elemen yang ada sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil dari penilaian ini disajikan dalam bentuk matriks yang dinamakan matriks perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*).

3. *Synthesis of Priority*

Dari setiap matriks *pairwise comparison* (perbandingan berpasangan) kemudian dicari *eigenvector* dari setiap matriks perbandingan berpasangan untuk mendapatkan *local priority* karena matriks perbandingan berpasangan terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan *global priority* harus dilakukan sintesis di antara *local priority*. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut hirarki. Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui prosedur sintesis dinamakan *priority setting*. *Global priority* adalah

prioritas/bobot subkriteria maupun alternatif terhadap tujuan hirarki secara keseluruhan/level tertinggi dalam hirarki. Cara mendapatkan *global priority* ini dengan cara mengalikan *local priority* subkriteria maupun alternatif dengan prioritas dari *parent criterion* (kriteria level di atasnya).

4. *Logical Consistency*

Konsistensi memiliki dua makna. Pertama adalah objek-objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman dan relevansi. Contohnya, anggur dan kelereng dapat dikelompokkan sesuai dengan himpunan yang seragam jika “bulat” merupakan kriterianya. Tetapi tidak dapat jika “rasa” sebagai kriterianya. Arti kedua adalah menyangkut tingkat hubungan antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Contohnya jika manis merupakan kriteria dan madu dinilai 5 kali lebih manis dibanding gula, dan gula 2 kali lebih manis dibanding sirup, maka seharusnya madu dinilai 10 kali lebih manis dibanding sirup. Jika madu dinilai 4 kali manisnya dibanding sirup, maka penilaian tidak konsisten dan proses harus diulang jika ingin memperoleh penilaian yang lebih tepat.

Dalam menggunakan keempat prinsip tersebut, AHP menyatukan dua aspek pengambilan keputusan yaitu:

1. Secara kualitatif AHP mendefinisikan permasalahan dan penilaian untuk mendapatkan solusi permasalahan.
2. Secara kuantitatif AHP melakukan perbandingan secara numerik dan penilaian untuk mendapatkan solusi permasalahan.

3.5.2 Kelebihan dan kelemahan AHP

Kelebihan dari metode AHP dalam pemecahan persoalan dan pengambilan keputusan adalah:

1. Kesatuan:

AHP memberi satu model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk aneka ragam persoalan tak terstruktur.

2. Kompleksitas:

AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.

3. Saling ketergantungan :

AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.

4. Penyusunan hirarki:

AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.

5. Pengukuran:

AHP memberi suatu skala untuk mengukur hal-hal dan wujud suatu model untuk menetapkan prioritas.

6. Konsistensi:

AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menentukan prioritas.

7. Sintesis:

AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.

8. Tawar-menawar:

AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan mereka.

9. Penilaian dan konsensus:

AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil yang representatif dari berbagai penilaian yang berbeda-beda.

10. Pengulangan proses:

AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan.

Di samping kelebihan-kelebihan di atas, terdapat pula beberapa kesulitan dalam menerapkan metode AHP ini. Apabila kesulitan-kesulitan tersebut tidak dapat diatasi, maka dapat menjadi kelemahan dari metode AHP dalam pengambilan keputusan. Kesulitan-kesulitan dalam menerapkan metode ini ialah:

1. AHP tidak dapat diterapkan pada suatu perbedaan sudut pandang yang sangat tajam/ekstrim di kalangan responden.
2. Metode ini mensyaratkan ketergantungan pada sekelompok ahli sesuai dengan jenis spesialis terkait dalam pengambilan keputusan.
3. Responden yang dilibatkan harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang permasalahan serta metode AHP.

Menurut Bambang (1992), kelebihan dan kelemahan metode AHP bisa dijelaskan apabila dibandingkan dengan metode pengambilan keputusan lain. Kelebihan dan kelemahan tersebut adalah:

1. Kelebihan
 - a. Dapat mengolah hal-hal yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
 - b. Mampu memecahkan masalah yang *multiobjectives* dan *multicriterias* karena fleksibilitasnya yang tinggi terutama dalam pembuatan hirarkinya;
 - c. Bentuknya yang sederhana, cocok untuk para pengambil keputusan tingkat tinggi yang biasanya orang-orang sibuk, karena AHP dapat dengan cepat dimengerti dan mudah melakukan analisis sensitivitasnya;
 - d. Sifatnya demokratis karena masyarakat dimungkinkan turut serta dalam proses perencanaan yang dibangun dengan menggunakan model ini.
2. Kelemahan
 - a. Hasil akhir model ini sangat tergantung kepada ekspert sedang kriteria yang jelas untuk seorang ekspert belum ada (subyektif);
 - b. Karena bentuknya terlalu sederhana, para pengambil keputusan yang terbiasa dengan model kuantitatif yang rumit menganggap model ini kurang cocok untuk pengambilan keputusan.

BAB 4

METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Data

Data yang digunakan untuk mengukur efektifitas program meliputi: (1) rekapitulasi laporan penyelenggaraan program dari 318 lembaga penyelenggara program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008 – 2009 yang tersebar di 25 provinsi di Indonesia, (2) rekapitulasi jumlah lulusan program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008 – 2009, (3) rekapitulasi data lulusan yang bekerja dan usaha mandiri, dan (4) data olahan hasil monitoring pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup untuk dana APBN Pusat di 17 provinsi kepada 164 orang lulusan yang terdiri dari 71 orang bekerja, 58 orang orang berwirausaha, dan 35 orang belum bekerja dan usaha mandiri yang dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2010.

4.2. Pendekatan Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam menganalisis efektifitas program pendidikan kecakapan hidup terdiri dari metode pengumpulan data, metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP), metode penghitungan efektifitas, dan metode analisis deskriptif. Sebelum metode analisis deskriptif ini digunakan penulis sudah mencoba dengan metode ekonometrik dengan memakai program *e-views* tapi tidak relevan dengan data yang tersedia. Kemudian juga telah dicoba dengan analisa logit probit, namun hanya menghasilkan peluang dari berbagai variabel yang digunakan.

4.2.1 Metode pengumpulan data

Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang diperoleh dari data Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Kementerian Pendidikan Nasional. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah kembali oleh penulis

untuk dijadikan dasar dalam menghitung efektifitas program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008 – 2009.

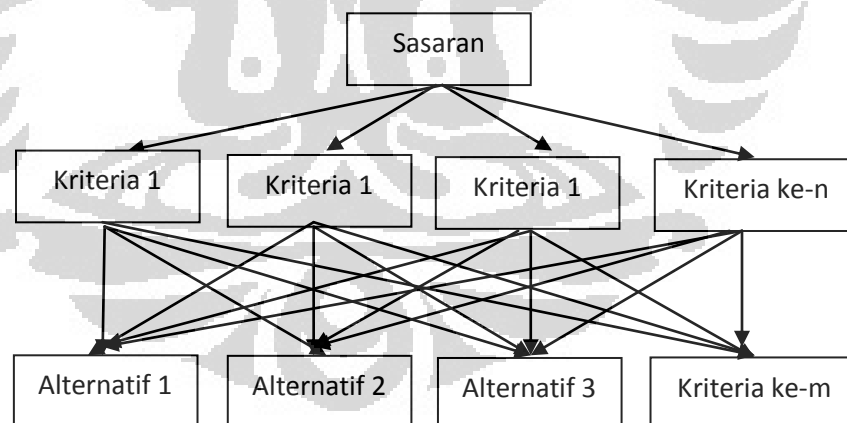
4.2.2 Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)

Metode AHP digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup dan menentukan faktor-faktor yang dominan mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Pembobotan masing-masing faktor tersebut menjadi dasar dalam membuat rumusan efektifitas program pendidikan kecakapan hidup.

4.2.2.1 Tahapan Penggunaan AHP

1. Penyusunan Hirarki Permasalahan

Permasalahan yang kompleks dapat dipecahkan atau dengan mudah dipahami apabila kita mampu mengurai permasalahan tersebut menjadi elemen-elemen tertentu yang disusun menjadi sebuah struktur hirarki.



Gambar 4.1 Struktur Hirarki AHP

Sumber : Thomas L. Saaty, 1994

Hirarki permasalahan disusun untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan dengan memperhatikan seluruh elemen yang terdapat dalam susunan hirarki tersebut. Pada tingkat tertinggi dalam suatu susunan hirarki ialah tujuan atau sasaran dimana tujuan ini merupakan solusi

pemecahan masalah. Selanjutnya adalah elemen yang merupakan penjabaran dari sasaran tersebut. Sebuah elemen menjadi patokan dari elemen-elemen dibawahnya yang sejenis. Penyusunan hirarki tersebut dalam hal ini elemen-elemen yang berada didalamnya disusun tergantung pada kemampuan pengguna dalam memahami permasalahan. Agar kriteria-kriteria yang dibentuk sesuai dengan tujuan permasalahan, maka kriteria-kriteria tersebut harus memenuhi sifat-sifat sebagai berikut:

a. Minimum

Jumlah kriteria diusahakan optimal atau tidak terlalu banyak untuk memudahkan analisis.

b. Independen

Setiap kriteria tidak saling tumpang tindih dan bukan merupakan suatu pengulangan kriteria untuk maksud yang sama.

c. Lengkap

Kriteria harus mencakup seluruh aspek penting dalam permasalahan.

d. Operasional

Kriteria harus dapat diukur dan dianalisis baik secara kuantitatif dan kualitatif.

2. Penentuan Prioritas

a. *Relative Measurement*

Dasar dari penghitungan model AHP dalam menetapkan prioritas dalam suatu pengambilan keputusan adalah dengan melakukan perbandingan terhadap dua hal berdasarkan kriteria yang sama dengan menggunakan skala rasio yang selanjutnya akan menjadi input dasar model ini. Batas skala yang dianggap mewakili persepsi manusia dalam model AHP adalah 1 sampai 9.

Dalam perbandingan berpasangan ini digunakan matriks untuk membantu perbandingan ini serta memberikan kerangka untuk

menguji konsistensinya. Rancangan matriks ini mencerminkan dua segi prioritas yaitu mendominasi dan didominasi.

Apabila seseorang telah memasukkan persepsinya untuk setiap perbandingan antara elemen-elemen yang berada dalam satu level atau yang dapat diperbandingkan, maka untuk mengetahui elemen mana yang paling disukai atau paling penting maka disusun sebuah matriks perbandingan (*pairwise comparison*).

Misalkan terdapat suatu subsistem hirarki dengan kriteria X dan sejumlah n subkriteria dibawahnya, A_1 sampai A_n . Perbandingan antara subkriteria dalam sebuah bentuk hirarki itu dapat dibuat dalam bentuk matriks $n \times n$, seperti tabel dibawah ini

Tabel 4.1
Matriks Perbandingan Berpasangan

X	A_1	A_2	A_3	A_n
A_1	a_{11}	a_{12}	a_{13}		a_{1n}
A_2	A_{21}	A_{22}	A_{23}		A_{2n}
A_3	a_{13}	A_{23}	A_{33}		A_{3n}
.....				
A_n	a_{n1}	a_{n2}	a_{n3}	a_{nn}

Sumber : Thomas L. Saaty, 1994

Nilai a_{11} adalah nilai perbandingan elemen A_1 (baris) terhadap A_1 (kolom) yang menyatakan hubungan:

- 1) Seberapa jauh tingkat kepentingan A_1 (baris) terhadap kriteria X dibandingkan dengan A_1 (kolom), atau
- 2) Seberapa jauh dominasi A_1 (baris) terhadap A_1 (kolom), atau
- 3) Seberapa banyak sifat kriteria X terdapat pada A_1 (baris) dibandingkan dengan A_1 (kolom).

Nilai numerik yang dikenakan untuk seluruh perbandingan diperoleh dari skala perbandingan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Skala Penilaian Perbandingan

Skala Tingkat Kepentingan	Definisi	Keterangan
1	Sama Pentingnya	Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama
3	Sedikit lebih penting	Pengalaman dan penilaian sedikit memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
5	Lebih Penting	Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya
7	Sangat Penting	Satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata dibandingkan dengan pasangannya
9	Mutlak lebih penting	Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya pada tingkat keyakinan yang tertinggi
2,4,6,8	Nilai Tengah	Diberikan bila terdapat keraguan penilaian antara dua penilaian yang berdekatan
Kebalikan	$A_{ij} = 1/A_{ji}$	Bila aktivitas i memperoleh suatu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j , maka j memiliki nilai kebalikannya bila dibandingkan i

Sumber : Thomas L. Saaty, 1994

Setelah matriks perbandingan untuk sekelompok elemen terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah mengukur bobot prioritas setiap elemen tersebut dengan dasar persepsi seorang ekspert yang telah dimasukkan dalam matrik tersebut. Perhitungan bobot dapat dilakukan secara manual (apabila matriksnya berukuran 2×2) ataupun dengan cara operasi matematis berdasarkan operasi matriks dan vector yang dikenal dengan *eigenvector* dengan menggunakan suatu program komputer. Dalam penelitian ini software yang digunakan adalah expert choice windows.

b. *Eigenvector* dan *Eigenvalue*

Apabila seseorang yang sudah memasukkan persepsinya untuk setiap perbandingan antara kriteria-kriteria yang berada dalam satu level atau yang dapat diperbandingkan maka untuk mengetahui

kriteria mana yang paling disukai atau yang paling penting disusun sebuah matriks perbandingan. Bentuk matrik ini adalah simetris atau biasa disebut matriks bujur sangkar dimana jumlah baris dan kolomnya tergantung pada banyaknya elemen dalam satu level.

Sebagai contoh apabila ada tiga elemen yang dibandingkan dalam satu level, maka matriks yang terbentuk adalah matrik 3 X 3.

Ciri utama matrik pada AHP ini adalah elemen diagonal dari kiri atas ke kanan bawah adalah satu, karena yang diperbandingkan adalah dua elemen yang sama. Selanjutnya matriks ini disesuaikan dengan logika manusia dimana apabila kriteria A lebih disukai dengan skala 3 dibandingkan kriteria B maka dengan sendirinya kriteria B lebih disukai dengan skala 1/3 dibandingkan A atau bersifat resiprokal.

Setelah matriks perbandingan untuk sekelompok kriteria perbandingan untuk sekelompok kriteria telah selesai dibentuk maka langkah berikutnya adalah mengukur bobot prioritas setiap kriteria tersebut dengan dasar persepsi seorang ahli yang telah dimasukkan dalam matriks tersebut. Hasil akhir perhitungan bobot prioritas tersebut merupakan suatu bilangan desimal dibawah satu dengan total prioritas untuk kriteria-kriteria dalam satu kelompok sama dengan satu. Dalam penghitungan bobot prioritas dipakai cara yang paling akurat untuk matriks perbandingan yaitu operasi matematis berdasarkan operasi matriks dan *vector* yang dikenal dengan nama *eigenvector*.

Eigenvector adalah sebuah *vector* yang apabila dikalikan dengan sebuah matriks hasilnya adalah *vector* itu sendiri dikalikan dengan sebuah bilangan skalar atau parameter yang tidak lain adalah *eigenvalue*. *Vector* ini bersama-sama dengan suatu matriks digunakan dalam operasi matematis untuk mencari bobot prioritas yang lebih akurat pada suatu matriks perbandingan. Persamaan yang digunakan dalam operasi ini adalah:

$$A.w = \lambda.w$$

dimana :

A = Matrik Pairwise Comparison

λ = Eigenvalue

w = Eigenvector

Eigenvector ini biasa disebut sebagai *vector* karakteristik dari sebuah matriks bujursangkar, sedangkan *eigenvalue* merupakan akar karakteristik dari matriks tersebut. Metode inilah yang akhirnya dipakai sebagai alat pengukur bobot prioritas setiap matriks perbandingan dalam model AHP karena sifatnya yang lebih akurat dan memperhatikan semua interaksi antara elemen dan matriks. Kelemahan metode ini adalah sulit dikerjakan secara manual terutama apabila matriksnya terdiri dari tiga kriteria atau lebih sehingga memerlukan bantuan program komputer untuk memecahkannya.

c. Konsistensi

Salah satu asumsi utama model AHP yang membedakannya dengan model-model pengambilan keputusan yang lain adalah tidak adanya syarat konsistensi mutlak. Hal ini dikarenakan dalam model AHP yang memakai persepsi manusia sebagai inputnya, maka ketidakkonsistenan itu mungkin terjadi karena manusia mempunyai keterbatasan dalam menyatakan persepsinya secara konsisten terutama kalau harus membandingkan banyak elemen.

Pengukuran konsistensi dalam model AHP dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah mengukur konsistensi setiap matriks perbandingan, dan tahap kedua mengukur konsistensi keseluruhan hirarki.

Pengukuran konsistensi dari suatu matriks itu sendiri didasarkan atas *eigenvalue* maksimum. Dengan *eigenvalue* maksimum,

inkonsistensi yang biasa dihasilkan matriks perbandingan dapat diminimumkan.

Rumus dari indeks konsistensi (*Consistency Index/CI*) adalah :

$$CI = \frac{(\lambda \text{ maks} - n)}{(n - 1)}$$

dengan

CI	=	Indeks Konsistensi
λ maks	=	<i>eigenvalue</i> maksimum
n	=	ukuran/orde matriks

Dengan λ merupakan *eigenvalue* dan n ukuran matriks, *eigenvalue* maksimum suatu matriks tidak akan lebih kecil dari nilai n sehingga tidak mungkin ada nilai CI negative. Makin dekat *eigenvalue* maksimum dengan besarnya matriks, makin konsisten matriks tersebut dan apabila sama besarnya maka matriks tersebut konsisten 100 persen atau inkonsisten 0 persen. Dalam pemakaian sehari-hari CI tersebut biasa disebut indeks inkonsistensi.

Indeks inkonsistensi di atas kemudian diubah ke dalam bentuk rasio inkonsistensi dengan cara membaginya dengan suatu indeks random. Indeks random menyatakan rata-rata konsistensi dari matriks perbandingan berukuran 1 sampai 10 yang didapatkan dari suatu eksperimen oleh Oak Ridge National Laboratory dan kemudian dilanjutkan oleh Wharton School

Tabel 4.3
Random Consistency Index (RI)

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RI	0	0	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51

Sumber : Thomas L. Saaty, 1994

CR	=	CI/RI
CR	=	Rasio Konsistensi
RI	=	Indeks Random (<i>Random Consistency Index</i>)

Selanjutnya konsistensi responden dalam mengisi kuesioner diukur. Pengukuran konsistensi ini dimaksudkan untuk melihat ketidakkonsistenan respon yang diberikan. Jika $CR < 0,1$ maka nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan konsisten. Jika $CR > 0,1$ maka nilai perbandingan berpasangan pada matriks kriteria yang diberikan tidak konsisten. Sehingga jika tidak konsisten, maka pengisian nilai-nilai pada matriks berpasangan pada unsur kriteria maupun alternatif harus diulang.

d. Sintesis Prioritas

Untuk memperoleh perangkat prioritas yang menyeluruh bagi suatu persoalan keputusan, diperlukan suatu pembobotan dan penjumlahan untuk menghasilkan suatu bilangan tunggal yang menunjukkan prioritas suatu elemen.

Langkah yang pertama adalah menjumlahkan nilai-nilai dalam setiap kolom kemudian membagi setiap entri dalam setiap kolom dengan jumlah pada kolom tersebut untuk memperoleh matriks yang dinormalisasi. Normalisasi ini dilakukan untuk mempertimbangkan unit kriteria yang tidak sama. Yang terakhir adalah merata-ratakan sepanjang baris dengan menjumlahkan semua nilai dalam setiap baris dari matriks yang dinormalisasi tersebut dan membaginya dengan banyak entri dari setiap baris sehingga sintesis ini menghasilkan persentase prioritas relatif yang menyeluruh.

4.2.2.2 Aksioma-Aksioma AHP

Dalam menggunakan model AHP perlu diperhatikan aksioma-aksioma yang dimiliki model ini. Pengertian aksioma sendiri adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah kebenarannya atau pasti terjadi. Ada empat buah aksioma yang harus diperhatikan dalam model AHP karena pelanggaran dari tiap aksioma berakibat tidak validnya model yang dipakai. Keempat aksioma tersebut adalah :

1. *Reciprocal comparison*, pengambil keputusan harus bisa membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Preferensinya harus memenuhi syarat resiprokal yaitu kalau A lebih disukai dari B dengan skala x , maka B lebih disukai dari A dengan skala $1/x$;
2. *Homogeneity*, preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemen dapat dibandingkan satu sama lain. Kalau aksioma ini tidak dipenuhi maka elemen-elemen yang dibandingkan tersebut tidak homogen dan harus dibentuk suatu *cluster* (kelompok elemen-elemen) yang baru;
3. *Independence*, preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan oleh pilihan obyektif secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pola ketergantungan atau pengaruh dalam model AHP adalah searah keatas, artinya perbandingan antara elemen-elemen dalam suatu level dipengaruhi atau tergantung pada elemen-elemen dalam level di atasnya.
4. *Expectations*, maksudnya adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hirarki diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka si pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria dan atau obyektif yang tersedia atau diperlukan sehingga keputusan yang diambil dapat dianggap lengkap.

Tidak terpenuhinya aksioma 1 menunjukkan bahwa pertanyaan yang digunakan untuk menyatakan preferensi dari sepasang elemen yang dibandingkan tidak tepat atau tidaki jelas. Aksioma 2 menjelaskan keterbatasan otak manusia

dalam membuat perbandingan-perbandingan terutama untuk elemen-elemen yang kurang jelas hubungannya satu sama lain atau perbedaan yang terlalu besar. Pelanggaran terhadap aksioma 3 tidak seperti aksioma lainnya dimungkinkan dalam AHP dengan bentuk hirarki non linier. Dalam hirarki non linier ini mungkin terjadi hubungan timbal balik antara kriteria dan alternatif, sehingga mungkin saja pemilihan kriteria dipengaruhi oleh alternatif. Pemecahan masalah ini adalah dengan generalisasi model AHP dengan metode super matriks. Aksioma 4 menyiratkan ekspektasi dan persepsi manusia yang lebih menonjol dari rasionalitas dalam menyatakan preferensi.

4.2.2.3 Penyusunan Hirarki

Struktur hirarki faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup disusun berdasarkan hasil diskusi dengan beberapa pakar dan penyelenggara program pendidikan kecakapan hidup sehingga diperoleh susunan hirarki yang terdiri dari empat level.

Level I, merupakan tujuan dari penyusunan hirarki ini adalah untuk menentukan dominasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup.

Level II merupakan kriteria dari faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup dibagi dalam dua kriteria yaitu internal dan eksternal. Kedua kriteria ini menjadi dasar pertimbangan yang disusun secara lebih makro dan saling terkait satu dengan lainnya dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk bidang nonformal.

Selanjutnya level III merupakan sub kriteria yang diturunkan dari kriteria-kriteria, dan pada level IV sub kriteria ini diturunkan kembali secara lebih detail menjadi sub-sub kriteria yang berisi elemen kelompok faktor yang menjelaskan

kelompok faktor di atasnya yang terdiri dari sub-sub kriteria yang berisi faktor-faktor yang ada dalam penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup tersebut yang juga menjadi alternatif atau pilihan dalam menentukan faktor-faktor yang dominan mempengaruhi keberhasilan program. Faktor-faktor tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Untuk kriteria internal hanya ada dua sub kriteria faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup yaitu kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional dan proses penentuan lembaga penyelenggara program PKH.

Untuk kriteria internal dengan sub kriteria kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional, faktor-faktornya adalah:

- 1) Ketepatan sasaran program;
- 2) Kesesuaian kurikulum dengan penerapan kerja; dan
- 3) Bentuk evaluasi hasil belajar.

Untuk kriteria internal dengan sub kriteria proses penentuan lembaga penyelenggara program PKH, faktor-faktornya adalah:

- 1) Penilaian proposal blocgrant;
- 2) Verifikasi lapangan; dan
- 3) Kualitas tim penilai.

Untuk kriteria eksternal ada tiga sub kriteria faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup yaitu peserta didik, penyelenggara program PKH, dan dunia usaha dan industri.

Untuk kriteria eksternal dengan sub kriteria peserta didik, faktor-faktornya adalah:

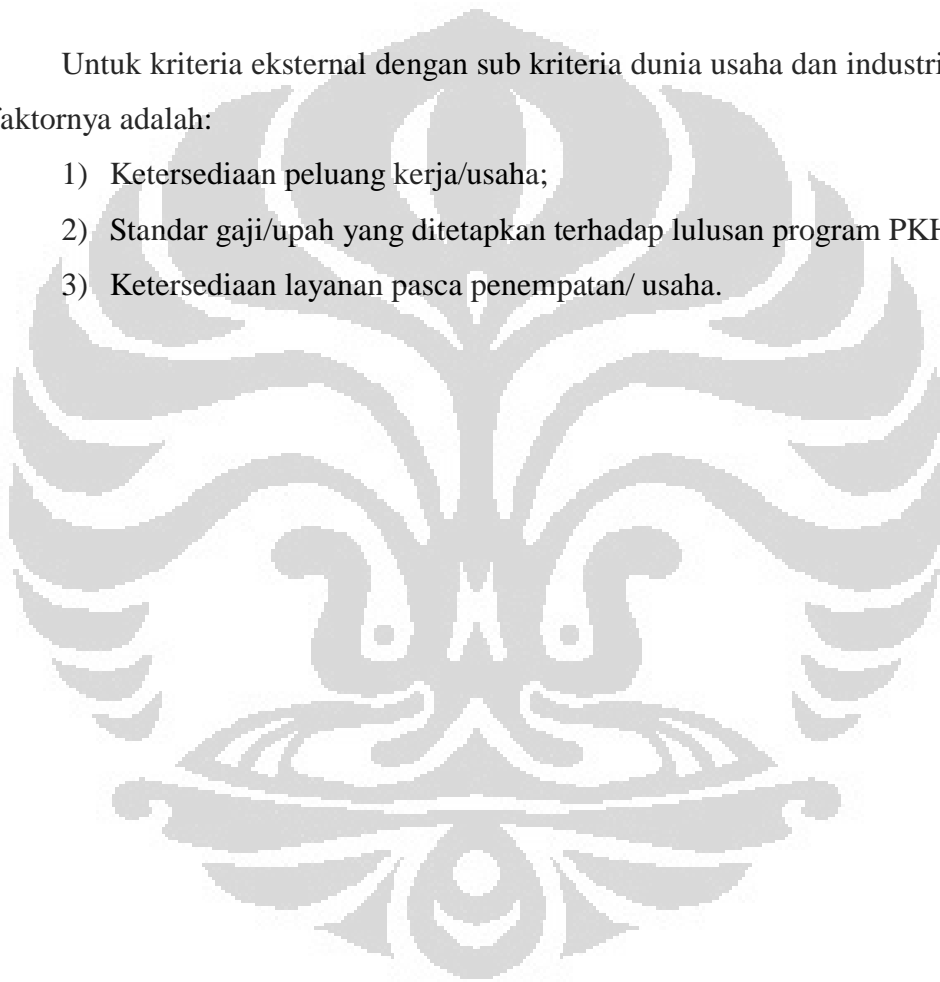
- 1) Usia produktif;
- 2) Pengangguran/miskin;
- 3) Tingkat pendidikan; dan
- 4) Minat terhadap bidang yang diajarkan.

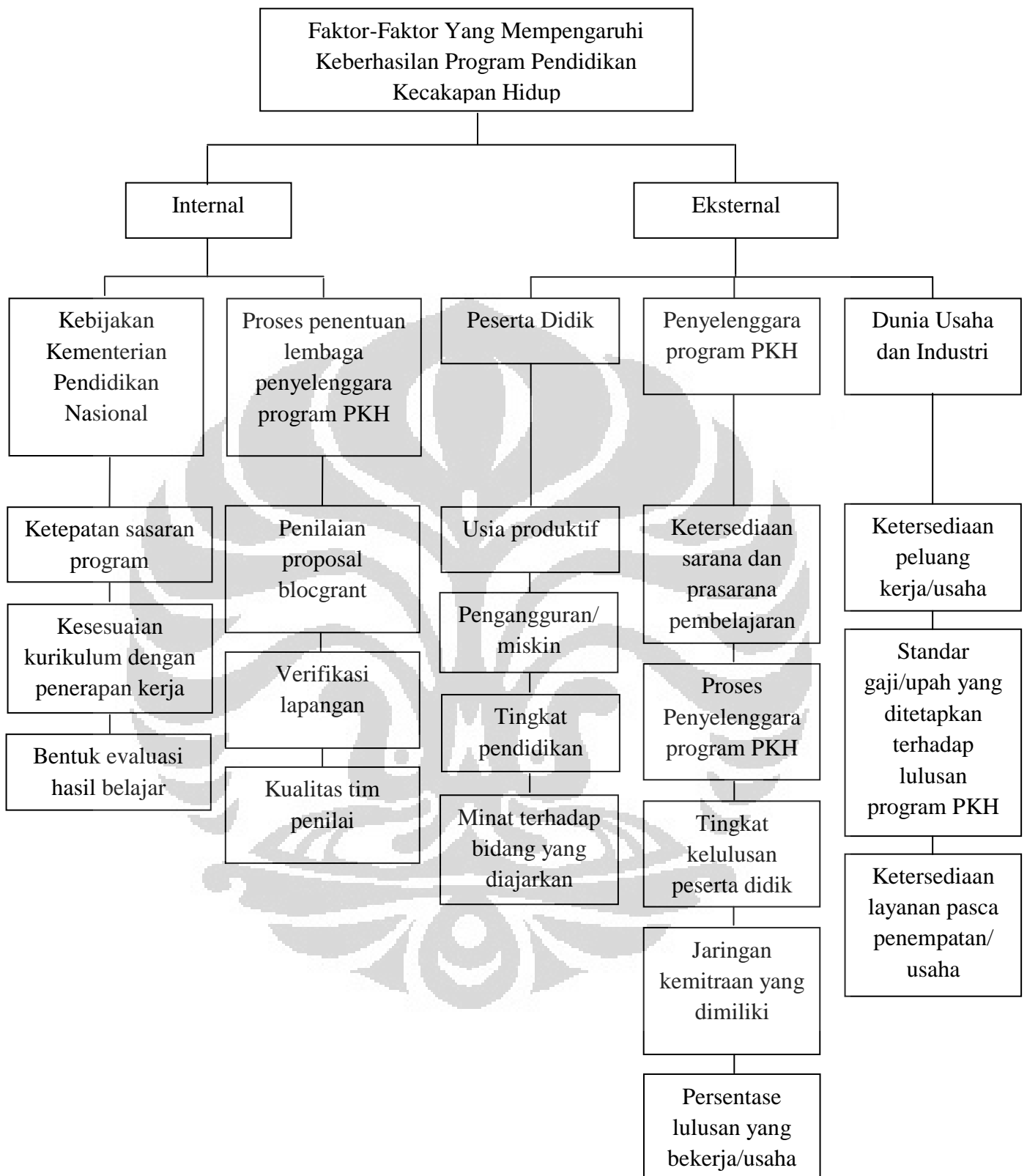
Untuk kriteria eksternal dengan sub kriteria penyelenggara program PKH, faktor-faktornya adalah:

- 1) Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- 2) Proses penyelenggaraan program PKH;
- 3) Tingkat kelulusan peserta didik;
- 4) Jaringan kemitraan yang dimiliki; dan
- 5) Persentase lulusan yang bekerja/usaha.

Untuk kriteria eksternal dengan sub kriteria dunia usaha dan industri, faktor-faktornya adalah:

- 1) Ketersediaan peluang kerja/usaha;
- 2) Standar gaji/upah yang ditetapkan terhadap lulusan program PKH; dan
- 3) Ketersediaan layanan pasca penempatan/ usaha.





Gambar 4.2
Struktur Hirarki Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program PKH

4.2.2.4 Penyusunan kuisiomer

Kuisiomer adalah daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan responden jawab, biasanya dalam alternatif yang didefinisikan dengan jelas (Sekaran, 2006). Bentuk kuisiomer yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada contoh kuisiomer dalam saaty, 1994. Sedangkan item-item yang dibandingkan dalam kuisiomer adalah kriteria dan sub kriteria yang digunakan dalam menentukan prioritas faktor.

Kuisiomer yang telah dibuat diisi oleh beberapa orang pakar bidang pendidikan untuk kemudian diolah dengan menggunakan software AHP.

4.2.3 Metode Penghitungan Efektifitas

Perhitungan efektifitas program pendidikan kecakapan hidup dilakukan dengan dua metode yaitu:

1. Berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam pedoman penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup.

Adapun kriteria efektif disini adalah: (1) Adanya laporan penyelenggaraan program dari lembaga penyelenggara, (2) 90% peserta didik menyelesaikan program sampai tuntas, artinya minimal 90% peserta lulus dalam evaluasi belajar, dan (3) 80% lulusan berwirausaha (usaha mandiri) atau bekerja pada dunia usaha dan industri.

Jika semua lembaga memberikan laporan penyelenggaraan program maka program ini dinyatakan efektif dari sisi tertib administrasi penyelenggaraan, sebaliknya jika laporan yang diberikan kurang dari 100% maka penyelenggaraan program dinyatakan tidak efektif.

Jika jumlah lulusan 90% atau lebih maka proses pembelajaran program dinilai efektif, sebaliknya jika jumlah lulusan kurang dari 90% maka keberhasilan program dalam proses pembelajaran kurang efektif.

Jika jumlah lulusan yang bekerja dan usaha mandiri 80% atau lebih maka program ini dinyatakan efektif dalam mengurangi angka pengangguran, sebaliknya jika jumlah lulusan yang bekerja/berusaha mandiri kurang dari 80% maka keberhasilan program dalam rangka mengurangi pengangguran dinyatakan kurang efektif.

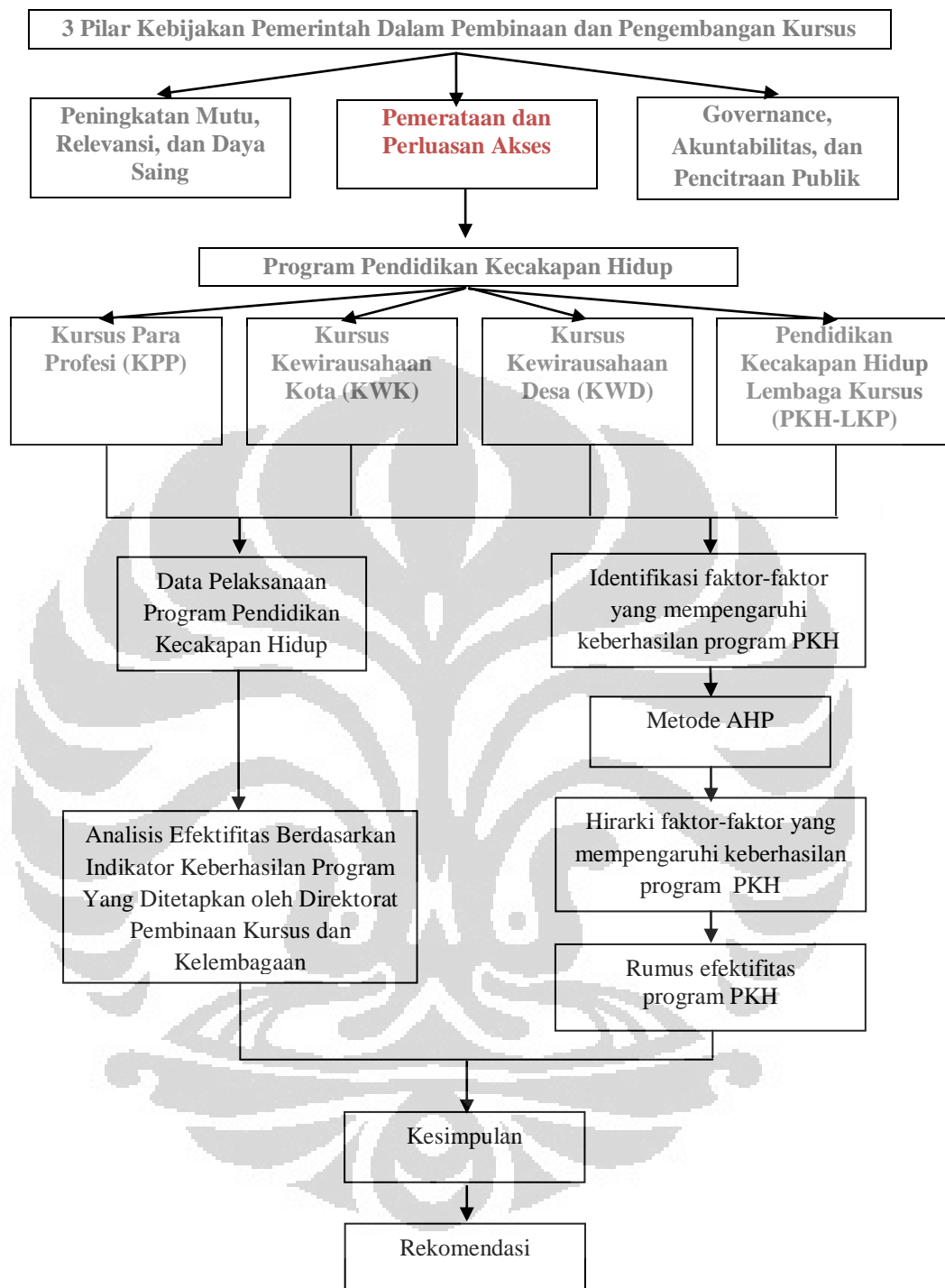
2. Berdasarkan rumusan pembobotan masing-masing faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup yang diperoleh dari penggunaan metode AHP.

4.2.4 Metode Analisis Deskriptif

Hasil perhitungan efektifitas program pendidikan kecakapan hidup dijabarkan dan dianalisis tingkat efektifitasnya dengan menggunakan kriteria keberhasilan program yang dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu:

- (2) 0% - 60% = tidak efektif
- (3) 61% - 70% = kurang efektif
- (4) 71% - 80% = cukup efektif
- (5) 81% - 90% = efektif
- (6) 91% - 100% = sangat efektif

Berdasarkan uraian di atas dapat disusun alur penyusunan tesis analisis efektifitas program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008 – 2009 sebagai berikut:



Gambar 4.3
Alur Penyusunan Tesis

BAB 5

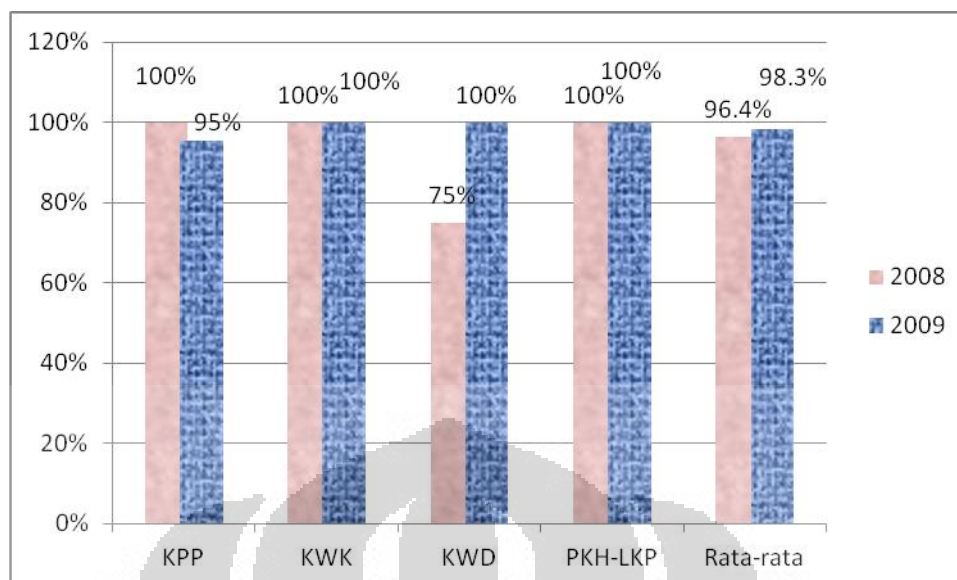
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Efektifitas Program Pendidikan Kecakapan Hidup

Sesuai dengan pedoman penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, diperoleh hasil sebagai berikut:

5.1.1 Indikator Adanya Laporan Penyelenggaraan Program Dari Lembaga Penyelenggara

Dari laporan penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008 – 2009 di 25 provinsi di Indonesia dapat diketahui bahwa penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008-2009 dilakukan oleh 318 lembaga kursus dan pelatihan. Adapun penyebaran lembaga penyelenggara adalah sebanyak 237 lembaga atau 74.53% di wilayah pulau jawa dan hanya 25.47% di luar pulau jawa. Penyebaran lembaga penyelenggara ini belum terstruktur dan belum dipetakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah dan data tingkat pengangguran yang ada. Pemberian bantuan penyelenggaraan program baru sebatas seleksi lembaga yang mengajukan program. Kurang meratanya penyebaran disebabkan oleh belum tersosialisasinya program pendidikan kecakapan hidup beserta petunjuk teknis pemberian bantuan dan penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup ke seluruh lembaga kursus dan pelatihan di Indonesia.



Grafik 5.1

Efektifitas Indikator Adanya Laporan Penyelenggaraan Program PKH Tahun 2008 - 2009

Tahun 2008 dan 2009 program pendidikan kecakapan hidup dilaksanakan masing-masing di 84 lembaga, dan 234 lembaga. Dari 318 lembaga penyelenggara terdapat tujuh lembaga yang belum memberikan laporan penyelenggaraan program sampai dengan adanya pemeriksaan, baik dari pihak internal maupun eksternal.

Ditahun 2008 terdapat 81 lembaga yang telah menyerahkan laporan penyelenggaraan program yaitu sebesar 96.4%, dan sisanya sebanyak 3 lembaga yang tidak menyerahkan laporan penyelenggaraan, yaitu 1 lembaga dari daerah Sumatera Utara dan 2 lembaga dari daerah Jawa Tengah, sehingga efektifitas penyelenggaraan program pendidikan tahun 2008 dari indikator adanya laporan penyelenggaraan program dinilai belum efektif.

Ditahun 2009 juga belum semua lembaga yang menyerahkan laporan penyelenggaraan program, terdapat 230 (98.3%) lembaga yang menyerahkan dan sisanya 4 lembaga tidak menyerahkan laporan penyelenggaraan program yaitu 2 lembaga dari Jawa Barat, 1 lembaga dari Jawa Tengah, dan 1 lembaga dari DKI Jakarta. Karena belum semua lembaga menyerahkan laporan penyelenggaraan program maka ditahun 2009, indikator ini dianggap juga belum efektif.

Indikator ini dianggap hal yang penting dalam menghitung ukuran keberhasilan program. Tidak adanya laporan penyelenggaraan program merupakan suatu temuan yang berindikasi tidak baik terhadap penilaian kinerja Kementerian Pendidikan Nasional.

Ketidakefektifan indikator ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) lembaga yang diberikan *blockgrant* tidak memiliki tanggungjawab penuh terhadap dana yang diberikan, (2) lembaga penyelenggara tidak bisa dan tidak terbiasa membuat laporan (perlu dilakukan penilaian ulang terhadap lembaga), dan (3) pihak pemberi dana, dalam hal ini Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan belum maksimal melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga penyelenggara program untuk mensosialisasikan pentingnya laporan penyelenggaraan program.

5.1.2 Indikator Tingkat Kelulusan Peserta Didik

Indikator kedua keberhasilan program adalah tingkat kelulusan peserta didik 90%. Hasil pengolahan data dari laporan penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup dari lembaga-lembaga penyelenggara tahun 2008 untuk lulusan program seperti pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tingkat Kelulusan Peserta Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2008 per Jenis Program

No	Program	Peserta Didik	Kelulusan	% Kelulusan
1	KPP 2008	750	744	99.20%
2	KWK 2008	380	309	81.32%
3	KWD 2008	151	151	100.00%
4	PKH-LKP 2008	803	803	100.00%
	Rata-rata	2,084	2,007	96.31%

Sumber data: Diolah dari Data Direktorat pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2010

Rata-rata lulusan setiap program sebesar 96.31% yang artinya bahwa proses pembelajaran kursus dan pelatihan dalam rangka pendidikan kecakapan hidup

dinilai efektif atau berhasil. Namun jika dilihat dari data lulusan per masing-masing program, terdapat program yang belum mencapai target keberhasilannya, yaitu program kursus wirausaha kota (KWK) tahun 2008, yang mana tingkat kelulusannya baru mencapai 81.32%.

Tabel 5.2
Tingkat Kelulusan Peserta Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2009 per Jenis Program

No	Program	Peserta Didik	Kelulusan	% Kelulusan
1	KPP 2009	6,481	5,723	88.30%
2	KWK 2009	1,877	1,877	100.00%
3	KWD 2009	516	516	100.00%
4	PKH-LKP 2009	455	425	93.41%
	Jumlah	9,329	8,541	91.55%

Sumber data: Diolah dari Data Direktorat pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2010

Tingkat kelulusan tahun 2009 dinilai efektif yaitu sebesar 91.55%, angka ini lebih dari 90% yang ditargetkan. Namun masih terdapat program yang belum mencapai target yaitu kursus para profesi (KPP) yang tingkat kelulusannya 88.30%.

Penyebab dari ketidaktercapaian target kelulusan program KWK 2008 dan KPP 2009 lebih cenderung kepada kurang selektifnya lembaga penyelenggara program dalam menyeleksi calon peserta didik yang akan mengikuti program pendidikan kecakapan hidup ini, dimana tidak semua peserta dapat mengikuti kursus dan pelatihan sampai dengan selesai. Ketidaktuntasan belajar dari peserta didik di atas disebabkan juga beberapa faktor, diantaranya komitmen mengikuti program, alasan sudah memperoleh pekerjaan, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, dan pindah tempat domisili.

Selain itu, terdapat juga peserta didik yang tidak mampu menguasai materi teori dan praktik yang diberikan dalam proses pembelajaran, sehingga pada waktu dilaksanakannya evaluasi akhir pembelajaran, mereka tidak lulus.

Tabel 5.3
Tingkat Kelulusan Peserta Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2008
per Provinsi

No.	Provinsi	Peserta Didik	Kelulusan	Persentase	
				Peserta Didik	Kelulusan
1	D.K.I. Jakarta	243	241	11.7%	99.2%
2	Jawa Barat	360	336	17.3%	93.3%
3	Banten	70	70	3.4%	100.0%
4	Jawa Tengah	494	474	23.7%	96.0%
5	D.I. Yogyakarta	60	60	2.9%	100.0%
6	Jawa Timur	361	339	17.3%	93.9%
7	Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	0.0%	-
8	Sumatera Utara	60	56	2.9%	93.3%
9	Sumatera Barat	30	30	1.4%	100.0%
10	Riau	20	20	1.0%	100.0%
11	Kepulauan Riau	-	-	0.0%	-
12	Jambi	-	-	0.0%	-
13	Sumatera Selatan	20	20	1.0%	100.0%
14	Bangka Belitung	-	-	0.0%	-
15	Bengkulu	35	30	1.7%	85.7%
16	Lampung	25	25	1.2%	100.0%
17	Kalimantan Barat	55	55	2.6%	100.0%
18	Kalimantan Tengah	-	-	0.0%	-
19	Kalimantan Selatan	-	-	0.0%	-
20	Kalimantan Timur	-	-	0.0%	-
21	Sulawesi Utara	40	40	1.9%	100.0%
22	Gorontalo	-	-	0.0%	-
23	Sulawesi Tengah	45	45	2.2%	100.0%
24	Sulawesi Selatan	65	65	3.1%	100.0%
25	Sulawesi Barat	-	-	0.0%	-
26	Sulawesi Tenggara	30	30	1.4%	100.0%
27	Maluku	-	-	0.0%	-
28	Maluku Utara	-	-	0.0%	-
29	Bali	-	-	0.0%	-
30	Nusa Tenggara Barat	26	26	1.2%	100.0%
31	Nusa Tenggara Timur	45	45	2.2%	100.0%
32	Papua	-	-	0.0%	-
33	Papua Barat	-	-	0.0%	-
	Jumlah/Rata-rata	2,084	2,007	100.0%	96.3%

Sumber data: Diolah dari Data Direktorat pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2010

Tingkat kelulusan peserta didik tahun 2008 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 96.3%, sehingga indikator ini dinilai efektif/berhasil. Dari 19 provinsi tempat lokasi penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008 terdapat satu provinsi yang tidak mencapai target indikator keberhasilan, yaitu provinsi Bengkulu dengan tingkat kelulusan sebesar 85.7%.

Tabel 5.4
Tingkat Kelulusan Peserta Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2009
per Provinsi

No.	Provinsi	Peserta Didik	Kelulusan	Persentase	
				Peserta Didik	Kelulusan
1	D.K.I. Jakarta	2,154	1,906	23.1%	88.5%
2	Jawa Barat	2,222	2,138	23.8%	96.2%
3	Banten	175	164	1.9%	93.7%
4	Jawa Tengah	900	818	9.6%	90.9%
5	D.I. Yogyakarta	60	60	0.6%	100.0%
6	Jawa Timur	2,593	2,258	27.8%	87.1%
7	Nanggroe Aceh Darussalam	40	40	0.4%	100.0%
8	Sumatera Utara	130	130	1.4%	100.0%
9	Sumatera Barat	219	219	2.3%	100.0%
10	Riau	20	20	0.2%	100.0%
11	Kepulauan Riau	-	-	0.0%	-
12	Jambi	40	40	0.4%	100.0%
13	Sumatera Selatan	115	98	1.2%	85.2%
14	Bangka Belitung	-	-	0.0%	-
15	Bengkulu	70	70	0.8%	100.0%
16	Lampung	20	20	0.2%	100.0%
17	Kalimantan Barat	96	96	1.0%	100.0%
18	Kalimantan Tengah	-	-	0.0%	-
19	Kalimantan Selatan	-	-	0.0%	-
20	Kalimantan Timur	60	60	0.6%	100.0%
21	Sulawesi Utara	30	30	0.3%	100.0%
22	Gorontalo	50	50	0.5%	100.0%
23	Sulawesi Tengah	50	50	0.5%	100.0%
24	Sulawesi Selatan	-	-	0.0%	-
25	Sulawesi Barat	-	-	0.0%	-
26	Sulawesi Tenggara	40	40	0.4%	100.0%
27	Maluku	-	-	0.0%	-
28	Maluku Utara	-	-	0.0%	-
29	Bali	105	100	1.1%	95.2%

(Sambungan tabel 5.4)

No.	Provinsi	Peserta Didik	Kelulusan	Persentase	
				Peserta Didik	Kelulusan
30	Nusa Tenggara Barat	95	89	1.0%	93.7%
31	Nusa Tenggara Timur	20	20	0.2%	100.0%
32	Papua	25	25	0.3%	100.0%
33	Papua Barat	-	-	0.0%	-
	Jumlah/Rata-rata	9,329	8,541	100.0%	91.6%

Penyebaran peserta didik dominan berada di daerah Pulau Jawa seperti DKI Jakarta 23.1%, Jawa Barat 23.8%, Jawa Tengah 9.6%, dan Jawa Timur 27.8%. Sisanya 15.7% tersebar merata di 24 provinsi lainnya seperti tertera pada tabel 5.4. Tingkat ketercapaian lulusan tahun 2009 rata-rata sebesar 91.6%, sedikit lebih tinggi dari target sebesar 90%.

Jawa Timur merupakan daerah yang peserta didiknya terbanyak diberikan blockgrant pendidikan kecakapan hidup, namun tingkat kelulusannya belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 87.1%, begitu juga dengan provinsi DKI Jakarta, dimana tingkat kelulusan sebesar 88.5%. Selain itu, provinsi Sumatera Selatan dengan tingkat kelulusan 85.2% juga belum mencapai target kelulusan yang ditetapkan sebesar 90%.

Dengan demikian proses pembelajaran pada program pendidikan kecakapan hidup di provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan tahun 2008 dianggap belum efektif. Penyebab ketidakefektifan tersebut diantaranya adalah manajemen lembaga penyelenggara dalam merekrut peserta didik belum terstandar, dan tidak semua peserta didik mampu menguasai dan memahami materi pelatihan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam bentuk kurikulum berbasis kompetensi.

5.1.3 Indikator Penempatan Kerja atau Pendampingan Usaha Bagi Lulusan Program Pendidikan Kecakapan Hidup

Indikator penempatan kerja atau pendampingan usaha bagi lulusan program pendidikan kecakapan hidup dilihat dari persentase lulusan yang dapat ditempatkan bekerja atau melakukan usaha mandiri. Berikut data lulusan yang sudah bekerja atau berusaha mandiri dilihat dari jenis program pendidikan kecakapan hidup dan berdasarkan provinsi tempat penyelenggaraan program.

Tabel 5.5
Tingkat Ketercapaian Lulusan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Memperoleh Pekerjaan atau Usaha Mandiri Tahun 2008 per Jenis Program

No	Program	Kelulusan	Usaha Mandiri	% Usaha Mandiri	Bekerja	% Bekerja	% Usaha Mandiri dan Bekerja
1	KPP 2008	744	66	8.87%	491	65.99%	74.87%
2	KWK 2008	309	111	35.92%	155	50.16%	86.08%
3	KWD 2008	151	15	9.93%	105	69.54%	79.47%
4	PKH-LKP 2008	803	5	0.62%	798	99.38%	100%
	Jumlah/Rata-rata	2,007	197	9.82%	1,549	77.18%	87.00%

Sumber data: Diolah dari Data Direktorat pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2010

Tingkat ketercapaian hasil dari lulusan yang memperoleh pekerjaan (bekerja dan usaha mandiri) tahun 2008 rata-rata sebesar 87%, sehingga secara rata-rata program pendidikan kecakapan hidup untuk indikator ini dinilai berhasil dan melampaui target sebesar 80%. Namun jika dilihat per program, terdapat dua program yang dianggap belum berhasil, yaitu kursus para profesi (KPP) sebesar 74.87% dan kursus wirausaha desa (KWD) 2008 sebesar 79.47%.

Tingkat ketercapaian lulusan untuk memperoleh pekerjaan (bekerja dan usaha mandiri) tahun 2009 semua program dinilai berhasil dan melampaui target lebih dari 80%. Rata-rata keberhasilannya sebesar 96.59%.

Tabel 5.6
Tingkat Ketercapaian Lulusan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Memperoleh
Pekerjaan atau Usaha Mandiri Tahun 2009
per Jenis Program

No	Program	Kelulusan	Usaha Mandiri	% Usaha Mandiri	Bekerja	% Bekerja	% Usaha Mandiri dan Bekerja
1	KPP 2009	5,723	46	0.80%	5,540	96.80%	97.61%
2	KWK 2009	1,877	441	23.49%	1,396	74.37%	97.87%
3	KWD 2009	516	160	31.01%	316	61.24%	92.25%
4	PKH-LKP 2009	425	162	38.12%	189	44.47%	82.59%
	Jumlah/Rata-rata	8,541	809	9.47%	7,441	87.12%	96.59%

Sumber data: Diolah dari Data Direktorat pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2010

Jika dibandingkan tingkat ketercapaian hasil dari lulusan yang memperoleh pekerjaan (bekerja dan usaha mandiri) tahun 2008 dengan 2009 terdapat kenaikan angka yang signifikan yaitu dari 87% menjadi 96.59%, ini mencerminkan bahwa program yang dilaksanakan dari tahun ke tahun semakin bagus dan dapat diterima oleh masyarakat dan dunia usaha dan industri. Namun program KPP yang mana arah program ini adalah untuk menjadikan masyarakat yang menganggur dapat bekerja di dunia usaha dan industri belum tercapai, dimana masih terdapat lulusan program yang melakukan usaha mandiri (berwirausaha) dan belum bekerja. Perlu diteliti kembali keabsahan *job order* dari lembaga penyelenggara serta proses pencapaian kompetensi peserta didik yang dibutuhkan.

Demikian juga dengan program KWK, KWD, dan PKH LKP masih berorientasi pada hasil lulusan yang bekerja pada orang lain, bukan berwirausaha. Jadi dengan tingkat keberhasilan lulusan pada tabel 5.5 dan tabel 5.6 di atas tidak terlihat perbedaan antara program yang satu dengan program yang lainnya.

Selanjutnya, tingkat keberhasilan lulusan secara keseluruhan lebih cenderung pada bekerja daripada usaha mandiri. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh: (1) adanya kesulitan yang lebih besar dalam mendidik calon wirausahawan dibandingkan dengan menyalurkan bekerja ke dunia usaha dan industri. (2) sulitnya penyelenggara program pendidikan kecakapan hidup dalam melakukan

pembinaan untuk merubah *mindset* peserta didik, dan membangun sikap-mental sebagai seorang wirausaha.

Sementara itu, target program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008-2009 dalam hal mendistribusikan lulusannya untuk bekerja dan usaha mandiri di seluruh provinsi penyelenggara program dapat tercapai mulai pencapaian 80% di provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan pencapaian 100% di sembilan provinsi seperti pada tabel 5.7. Persentase lulusan yang berwirausaha terbanyak ada di provinsi Kalimantan Timur sebesar 91.7% lulusan memulai usaha mandiri, sedangkan provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Jambi, dan Nusa Tenggara Timur tidak ada lulusannya yang membuka usaha mandiri atau 100% bekerja pada orang lain.

Tabel 5.7
Tingkat Ketercapaian Lulusan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Memperoleh Pekerjaan atau Usaha Mandiri Tahun 2008-2009 per Provinsi

No.	Provinsi	Kelulusan	Persentase		
			Usaha Mandiri	Bekerja	Usaha Mandiri dan Bekerja
1	D.K.I. Jakarta	2,147	2.1%	95.5%	97.58%
2	Jawa Barat	2,474	9.7%	83.8%	93.49%
3	Banten	234	6.8%	85.0%	91.88%
4	Jawa Tengah	1,292	10.4%	79.3%	89.71%
5	D.I. Yogyakarta	120	16.7%	81.7%	98.33%
6	Jawa Timur	2,597	3.4%	92.9%	96.30%
7	Nanggroe Aceh D	40	-	100%	100.00%
8	Sumatera Utara	186	41.4%	44.1%	85.48%
9	Sumatera Barat	249	37.8%	59.8%	97.59%
10	Riau	40	-	100%	100.00%
11	Jambi	40	-	100%	100.00%
12	Sumatera Selatan	118	16.9%	83.1%	100.00%
13	Bengkulu	100	37.0%	53.0%	90.00%
14	Lampung	45	46.7%	53.3%	100.00%
15	Kalimantan Barat	151	15.2%	83.4%	98.68%
16	Kalimantan Timur	60	91.7%	8.3%	100.00%
17	Sulawesi Utara	70	21.4%	67.1%	88.57%
18	Gorontalo	50	40.0%	60.0%	100.00%
19	Sulawesi Tengah	95	36.8%	57.9%	94.74%

(Sambungan tabel 5.7)

No.	Provinsi	Kelulusan	Persentase		
			Usaha Mandiri	Bekerja	Usaha Mandiri dan Bekerja
20	Sulawesi Selatan	65	21.5%	58.5%	80.00%
21	Sulawesi Tenggara	70	21.4%	74.3%	95.71%
22	Bali	100	13.0%	87.0%	100.00%
23	Nusa Tenggara Barat	115	8.7%	78.3%	86.96%
24	Nusa Tenggara Timur	65	-	100%	100.00%
25	Papua	25	56.0%	44.0%	100.00%
	Jumlah	10,548	9.5%	85.2%	94.77%

Sumber data: Diolah dari Data Direktorat pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2010

Perbedaan yang relatif ekstrim dalam penyaluran lulusan program yang terjadi, kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: (1) Peluang untuk berwirausaha di provinsi dengan persentase lulusan berwirausaha tinggi masih tinggi, sebaliknya area bisnis di provinsi dengan persentase lulusan berwirausaha rendah sangat kecil. Hal ini menyebabkan lulusan program yang berminat untuk berwirausaha mengalami kesulitan untuk merintis usahanya. (2) Pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup oleh lembaga-lembaga penyelenggara di provinsi dengan persentase lulusan program yang berwirausaha rendah tidak berjalan dengan baik. Program pembelajaran kurang bahkan mungkin tidak ada materi kewirausahaan, sehingga kemampuan lulusan dalam berwirausaha sangat rendah. (3) Kesempatan bekerja di provinsi dengan persentase lulusan bekerja relatif tinggi, relatif masih terbuka lebar, seiring dengan berkembangnya industri-industri baru dan area usaha-usaha baru di provinsi tersebut yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Sementara itu, di provinsi dengan persentase lulusan yang bekerja rendah, kesempatan kerja di provinsi tersebut sangat minim karena masih menjadi provinsi yang terbelakang, baik SDM maupun infrastrukturnya. (4) Provinsi dengan persentase lulusan bekerja yang tinggi kemungkinan karena lembaga penyelenggara program telah memiliki *job order* sebelum menyelenggarakan programnya, sehingga tidak mengalami kesulitan dalam menyalurkan lulusannya untuk bekerja. Sementara itu, di provinsi dengan persentase lulusan yang bekerja rendah, kemungkinan karena

tidak memiliki *job order*, walaupun ada hanya sekedar persyaratan untuk mendapat bantuan saja, sehingga mengalami kesulitan dalam menyalurkan lulusannya untuk bekerja.

Hal ini menunjukkan bahwa persaingan untuk bekerja di pulau Jawa lebih tinggi dibanding luar Jawa dan peluang untuk usaha mandiri lebih tinggi di luar pulau Jawa dibanding di pulau Jawa.

Rata-rata lulusan yang tidak jelas (apakah bekerja atau berwirausaha), mencapai 13% untuk tahun 2008 dan 3.41% untuk tahun 2009. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh: (1) Tidak adanya program pendampingan yang jelas dari penyelenggara sehingga tidak semua lulusan program dapat dipantau, dan (2) data lulusan program tidak teradministrasi dengan baik.

Selanjutnya, dari data isian kuisioner monitoring program yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010, dimana sampel responden dalam kuisioner ini adalah lulusan program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008 s.d. 2009 beserta dunia usaha dan industri tempat lulusan ditempatkan bekerja diperoleh data sebagai berikut:

5.1.4 Ketepatan Sasaran Program

Data responden pada tabel 5.8 menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 136 orang atau 82.93% yang berusia 18 – 35 tahun dan 28 orang (17.07%) berusia selain 18 – 35 tahun. Dapat disimpulkan bahwa peserta didik program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008 – 2009 dari segi batasan usia tidak tepat sasaran sebesar 17.07%. Angka tersebut cukup tinggi penyimpangannya dan mengindikasikan bahwa lembaga penyelenggara program kurang selektif dalam melakukan rekrutmen peserta didik yang memperoleh dana bantuan program pendidikan kecakapan hidup dan terkesan hanya melengkapi jumlah yang mereka inginkan dalam memperoleh *blockgrant* pendidikan kecakapan hidup.

Tabel 5.8
Ketepatan Sasaran Berdasarkan Usia Lulusan
Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2008-2009

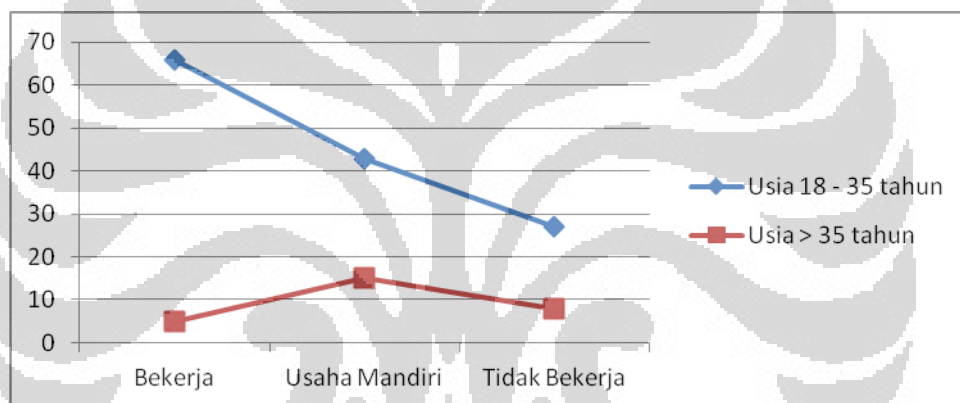
No.	Provinsi	Usia 18 - 35 tahun	Selain Usia 18 - 35 tahun	Persentase Ketepatan Sasaran
1	Jawa Barat	13	7	65.00%
2	Banten	6	2	75.00%
3	Jawa Tengah	8	0	100.00%
4	D.I. Yogyakarta	12	2	85.71%
5	Jawa Timur	16	7	69.57%
6	Nanggroe Aceh Darussalam	2	3	40.00%
7	Sumatera Utara	16	1	94.12%
8	Sumatera Barat	4	0	100.00%
9	Riau	8	1	88.89%
10	Bengkulu	11	0	100.00%
11	Lampung	6	1	85.71%
12	Kalimantan Barat	5	2	71.43%
13	Kalimantan Timur	3	1	75.00%
14	Sulawesi Tengah	7	1	87.50%
15	Sulawesi Tenggara	8	0	100.00%
16	Bali	7	0	100.00%
17	Nusa Tenggara Barat	4	0	100.00%
	Jumlah	136	28	82.93%

Dalam rekrutmen peserta didik program pendidikan kecakapan hidup hampir semua provinsi kurang selektif, terbukti dari 17 provinsi yang diambil sampelnya, hanya 6 provinsi yang melakukan rekrutmen peserta sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yaitu Jawa Tengah, Sumatera Barat, Bengkulu, Sulawesi Tenggara, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara provinsi lainnya tidak semua peserta didik usianya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang sangat tidak sesuai kriteria adalah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mana angka kesesuaiannya sebesar 40%, artinya 60% peserta didik usianya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

Peserta didik yang tidak tepat sasaran tersebut sebanyak 15 orang membuka usaha mandiri, 5 orang bekerja, dan 8 orang tidak bekerja. 3 orang dari peserta didik yang tidak tepat sasaran berusia 17 tahun yang merupakan usia sekolah,

sedangkan 25 orang lainnya berusia 36 – 55 tahun. Pengangguran di usia 36 – 55 tahun pada umumnya bukanlah disebabkan karena kurangnya keterampilan yang dimiliki, tapi lebih cenderung kepada keinginan dan mental kerja yang kurang baik dari yang bersangkutan. Jadi masih diragukan, apakah peserta didik yang tidak tepat sasaran itu adalah pengangguran atau orang yang sudah bekerja dan hanya berniat menambah pengetahuan saja dalam mengikuti program pendidikan kecakapan hidup ini. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut.

Kecenderungan peserta didik yang berusia 18 – 35 tahun adalah bekerja dibandingkan berusaha mandiri, sedangkan peserta didik yang berusia 35 tahun ke atas cenderung untuk berusaha mandiri dibandingkan bekerja pada orang lain.



Grafik 5.2

Kecenderungan Usia Lulusan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2008-2009

Ketidaktepatan sasaran program dapat menghambat tujuan dan target yang ingin dicapai oleh program tersebut. Namun dalam hal program ini, faktor usia tidak terlalu mempengaruhi berhasil atau tidaknya program pendidikan kecakapan hidup. Dari hasil ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk meneliti kembali indikator usia masing-masing program yang mana orientasi lulusannya juga berbeda.

5.1.5 Kesesuaian Kurikulum Yang Diajarkan Dengan Penerapan Dalam Pekerjaan

Adapun kurikulum yang dipakai oleh masing-masing lembaga penyelenggara program pendidikan kecakapan hidup harus sudah mengacu kepada kurikulum berbasis kompetensi yang disusun oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Memang belum semua jenis keterampilan memiliki kurikulum berbasis kompetensi, karena masih terbatasnya program Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan dalam penyusunan kurikulum tersebut.

Kurikulum berbasis kompetensi tersebut disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan masing-masing jenis keterampilan yang terdiri dari tiga aspek, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Masing-masing aspek tersebut melebur dalam berbagai kriteria unjuk kerja yang ditetapkan dalam standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI). Adapun penyusunan SKKNI melibatkan berbagai unsur, termasuk didalamnya para praktisi, pendidik, lembaga penyelenggara pendidikan, asosiasi profesi terkait, serta perusahaan-perusahaan terkait yang akan menampung tenaga kerja tersebut.

Berikut adalah kesesuaian kurikulum dan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran program pendidikan kecakapan hidup dengan kebutuhan kerja pada dunia usaha dan industri.

Tabel 5.9
Kesesuaian Kurikulum Dan Bahan Ajar Dengan Kebutuhan Kerja

No.	Provinsi	Kesesuaian Kurikulum dengan kebutuhan kerja		Persentase Kesesuaian Kurikulum
		Sesuai	Tidak sesuai	
1	Jawa Barat	11	1	91.67%
2	Banten	2	2	50.00%
3	Jawa Tengah	6	0	100.00%
4	D.I. Yogyakarta	12	0	100.00%
5	Jawa Timur	16	0	100.00%
6	Nanggroe Aceh Darussalam	4	1	80.00%
7	Sumatera Utara	13	2	86.67%

(Sambungan tabel 5.9)

No.	Provinsi	Kesesuaian Kurikulum dengan kebutuhan kerja		Persentase Kesesuaian Kurikulum
		Sesuai	Tidak sesuai	
8	Sumatera Barat	4	0	100.00%
9	Riau	9	0	100.00%
10	Bengkulu	7	0	100.00%
11	Lampung	7	0	100.00%
12	Kalimantan Barat	5	0	100.00%
13	Kalimantan Timur	4	0	100.00%
14	Sulawesi Tengah	7	0	100.00%
15	Sulawesi Tenggara	5	0	100.00%
16	Bali	6	1	85.71%
17	Nusa Tenggara Barat	4	0	100.00%
	Jumlah	122	7	94.57%

Pada tabel 5.9 dapat diketahui bahwa belum semua provinsi penyelenggara program pendidikan kecakapan hidup menggunakan kurikulum berbasis kompetensi yang telah disusun oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan sehingga masih terdapat ketidaksesuaian kurikulum dengan kebutuhan kerja.

Ketidaksesuaian ini adalah di beberapa provinsi, yaitu: provinsi Jawa Barat, Banten, Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, dan Bali. Sedangkan 12 provinsi lainnya telah menggunakan kurikulum berbasis kompetensi.

Penyebab dari belum digunakannya secara keseluruhan kurikulum berbasis kompetensi oleh 5 provinsi ini belum diketahui secara jelas, namun yang pasti perlu adanya sosialisasi kurikulum berbasis kompetensi yang lebih intens di provinsi-provinsi ini.

5.1.6 Bentuk Evaluasi Hasil Belajar

Bentuk evaluasi hasil belajar peserta didik kursus dan pelatihan yang dipersyaratkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah uji kompetensi. Uji kompetensi ini hanya bisa

diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri-yang didirikan oleh asosiasi profesi yang diakui pemerintah. Evaluasi melalui uji kompetensi mengacu kepada standar kompetensi lulusan dan kurikulum berbasis kompetensi. Idealnya, proses pembelajaran yang diberikan harus sama dengan evaluasinya, sehingga dapat diketahui ketuntasan dari belajar peserta didik tersebut.

Tabel 5.10
Bentuk Evaluasi Hasil Belajar

No.	Provinsi	Ujian lokal	Uji Kompetensi	% Uji Kompetensi
1	Jawa Barat	0	12	100.00%
2	Banten	2	2	50.00%
3	Jawa Tengah	1	5	83.33%
4	D.I. Yogyakarta	7	5	41.67%
5	Jawa Timur	9	7	43.75%
6	Nanggroe Aceh Darussalam	3	2	40.00%
7	Sumatera Utara	10	5	33.33%
8	Sumatera Barat	1	3	75.00%
9	Riau	4	5	55.56%
10	Bengkulu	6	1	14.29%
11	Lampung	4	3	42.86%
12	Kalimantan Barat	2	3	60.00%
13	Kalimantan Timur	0	4	100.00%
14	Sulawesi Tengah	5	2	28.57%
15	Sulawesi Tenggara	4	1	20.00%
16	Bali	2	5	71.43%
17	Nusa Tenggara Barat	3	1	25.00%
	Jumlah	63	66	51.16%

Bentuk evaluasi hasil belajar yang diharapkan melalui uji kompetensi juga belum tercapai di seluruh daerah penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup. Hanya provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Timur yang 100% telah menyelenggarakan uji kompetensi sebagai bentuk evaluasi hasil belajar peserta didiknya. Selanjutnya 15 provinsi yang pelaksanaan uji kompetensinya kurang dari 100%, sebahagian besar kurang dari 50%, sehingga secara keseluruhan evaluasi hasil belajar melalui uji kompetensi baru tercapai sebesar 51.16%.

Hasil jawaban dari 129 responden yang bekerja dan usaha mandiri menyatakan bahwa sebanyak 48.84% masih mengikuti uji kompetensi lokal yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan pelatihan yang belum terakreditasi karena sampai saat ini belum ada lembaga kursus yang terakreditasi lembaganya, baru menjalankan akreditasi program. Selanjutnya yang mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) sebesar 36.43% dan mengikuti uji kompetensi yang dilakukan dunia usaha dan industri (DUDI) sebesar 14.73%.

Masih rendahnya angka pemilihan uji kompetensi sebagai bentuk evaluasi hasil belajar tidak terlepas dari masih sedikitnya jumlah lembaga sertifikasi kompetensi yang telah terbentuk dan beroperasi. Sampai saat ini baru dua belas bidang keahlian yang melakukan uji kompetensi melalui LSK, yaitu: (1) akupunktur, (2) bahasa Inggris, (3) hantaran, (4) otomotif, (5) seni merangkai bunga & desain floral, (6) spa, (7) tata boga, (8) tata busana, (9) tata kecantikan kulit dan rambut, (10) tata rias pengantin, (11) teknisi akuntansi, dan (12) teknologi informasi dan komunikasi.

Dari 16 jenis keterampilan yang diikuti oleh peserta didik program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008-2009, hanya 5 bidang keahlian yang tidak ada uji kompetensinya, yaitu tour & travel, modeling, operator, agrobisnis, dan teknisi handphone dan hanya 6.1% peserta didik yang memilih keterampilan ini. Artinya sebesar 93.9% peserta didik haruslah mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSK. Dengan demikian terdapat selisih sebesar 66.73% peserta didik yang belum mengikuti uji kompetensi. Dapat dinilai bahwa pelaksanaan uji kompetensi belum sepenuhnya dilakukan oleh lembaga kursus dan pelatihan karena masih kurangnya pemahaman tentang makna uji kompetensi tersebut.

Tabel 5.11
Jenis Keterampilan Yang Diikuti
Dalam Program Pendidikan Kecakapan Hidup Tahun 2008-2009

No.	Jenis Keterampilan	Bekerja	Usaha Mandiri	Tidak Bekerja	Jumlah
1	Komputer	21	8	12	41
2	Desain Grafis	1	5	3	9
3	Tata boga	2	2	1	5
4	Otomotif	12	6	2	20
5	Tata Rias Pengantin	8	11	6	25
6	Tata Kecantikan Rambut	8	4	0	12
7	Menjahit	9	10	8	27
8	Spa	7	4	2	13
9	Tour & Travel	1	0	0	1
10	Operator	1	0	0	1
11	Modeling	0	0	0	0
12	Kraf Tangan/Hantaran	1	1	1	3
13	Agrobisnis	0	2	0	2
14	Bahasa	0	1	0	1
15	Tata Kecantikan Kulit	0	3	0	3
16	Teknisi Handphone	0	1	0	1
	Jumlah	71	58	35	164

5.1.7 Kesesuaian Pekerjaan Dengan Keterampilan Yang Diajarkan Dalam Program Pendidikan Kecakapan Hidup

Tabel 5.12
Kompetensi Yang Dicapai Oleh Responden Yang Bekerja Dan Usaha Mandiri

No.	Kompetensi yang dicapai	Bekerja	Usaha Mandiri
1	Sesuai dengan pekerjaan	71	56
2	Tidak sesuai dengan pekerjaan	0	2

Semua lulusan program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008-2009 yang bekerja menyatakan bahwa kompetensi/keterampilan yang telah dicapai melalui kursus dan pelatihan sesuai dengan bidang pekerjaan yang mereka lakukan. Berikutnya sebanyak 96.55% lulusan yang berusaha mandiri menyatakan bahwa kompetensi yang mereka peroleh dari kursus dan pelatihan juga sesuai dengan bidang usaha yang mereka tekuni sekarang, hanya 3.45% yang menyatakan tidak sesuai.

Tingginya angka kesesuaian ini mengindikasikan bahwa tujuan akhir program pendidikan kecakapan hidup ini berhasil dan efektif mengurangi angka pengangguran, dimana semakin tinggi kesesuaian kompetensi dengan pekerjaan, semakin berhasil program pendidikan kecakapan hidup yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan.

Penyebaran data kesesuaian di atas seperti tertera pada tabel 5.13 berikut.

Tabel 5.13
Kesesuaian Pekerjaan Dengan Keterampilan

No.	Provinsi	Sesuai	Tidak sesuai	Efektifitas Kesesuaian Kerja
1	Jawa Barat	11	1	91.67%
2	Banten	4	0	100.00%
3	Jawa Tengah	6	0	100.00%
4	D.I. Yogyakarta	12	0	100.00%
5	Jawa Timur	16	0	100.00%
6	Nanggroe Aceh Darussalam	4	1	80.00%
7	Sumatera Utara	15	0	100.00%
8	Sumatera Barat	4	0	100.00%
9	Riau	9	0	100.00%
10	Bengkulu	7	0	100.00%
11	Lampung	7	0	100.00%
12	Kalimantan Barat	5	0	100.00%
13	Kalimantan Timur	4	0	100.00%
14	Sulawesi Tengah	7	0	100.00%
15	Sulawesi Tenggara	5	0	100.00%
16	Bali	7	0	100.00%
17	Nusa Tenggara Barat	4	0	100.00%
	Jumlah	127	2	98.45%

Kesesuaian pekerjaan dengan keterampilan yang diperoleh dalam pembelajaran program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008 – 2009 sebesar 98.45%. Masih terdapat 2 provinsi yang kesesuaian pekerjaannya kurang dari 100% yaitu Jawa Barat dan Nanggroe Aceh Darussalam yang masing-masing sebesar 91.67% dan 80%.

5.1.8 Proses Penempatan Kerja dan Status Kepegawaian

Penempatan kerja dan pendampingan usaha merupakan bentuk tanggungjawab lembaga penyelenggara program pendidikan kecakapan hidup dalam menindaklanjuti hasil kursus dan pelatihan yang diselenggarakannya. Berikut proses penempatan kerja dan status kepegawaian dari lulusan program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008 – 2009 yang bekerja pada dunia usaha dan industri.

Tabel 5.14
Perhitungan Proses Penempatan Kerja Responden Yang Bekerja

No.	Provinsi	Persentase Proses Penempatan	Persentase Status Kepegawaian	Persentase Bekerja
1	Jawa Barat	100.00%	75.00%	87.50%
2	Banten	100.00%	50.00%	75.00%
3	Jawa Tengah	100.00%	100.00%	100.00%
4	D.I. Yogyakarta	100.00%	100.00%	100.00%
5	Jawa Timur	100.00%	93.75%	96.88%
6	Nanggroe Aceh Darussalam	100.00%	60.00%	80.00%
7	Sumatera Utara	100.00%	80.00%	90.00%
8	Sumatera Barat	100.00%	100.00%	100.00%
9	Riau	100.00%	100.00%	100.00%
10	Bengkulu	100.00%	85.71%	92.86%
11	Lampung	71.43%	71.43%	71.43%
12	Kalimantan Barat	100.00%	80.00%	90.00%
13	Kalimantan Timur	100.00%	100.00%	100.00%
14	Sulawesi Tengah	100.00%	85.71%	92.86%
15	Sulawesi Tenggara	100.00%	80.00%	90.00%
16	Bali	100.00%	100.00%	100.00%
17	Nusa Tenggara Barat	100.00%	100.00%	100.00%
	Jumlah	98.45%	86.82%	92.64%

Tabel 5.14 menjelaskan bahwa 98.45% lulusan memperoleh pekerjaan dan pendampingan usaha melalui bantuan lembaga penyelenggara program pendidikan kecakapan hidup. Hanya 1.55% yang lulusan yang bekerja tidak mendapat bantuan fasilitasi dari lembaga penyelenggara program yaitu lulusan yang berasal dari provinsi Lampung.

50.70% lulusan yang bekerja mendapatkan pekerjaan langsung setelah pelatihan melalui lembaga penyelenggara program. Disini lembaga penyelenggara program telah memiliki *job order* atau permintaan kerja dari perusahaan-perusahaan terkait. 46.48% lainnya tidak dapat langsung ditempatkan bekerja, namun lembaga tetap bertanggungjawab memfasilitasi mereka untuk memperoleh pekerjaan, baik melalui bursa kerja maupun informasi lainnya.

Semakin banyak *job order* lembaga penyelenggara program pendidikan kecakapan hidup, semakin besar peluang lulusan untuk memperoleh pekerjaan langsung setelah mengikuti pembelajaran kursus dan pelatihan, dan sebaliknya jika lembaga penyelenggara tidak memiliki *job order*, semakin rendah pula peluang lulusan untuk langsung mendapatkan pekerjaan. Jadi untuk penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup perlu adanya *job order* baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sementara itu, lulusan yang berusaha mandiri 100% memperoleh pendampingan dari lembaga penyelenggara program. Pendampingan dapat berupa dalam pengembangan rintisan usaha, pemasaran, ataupun peningkatan mutu produk/jasa.

Selanjutnya status kepegawaian lulusan yang bekerja juga perlu dikaji karena merupakan satu kesatuan dari penilaian keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup. Semakin banyak lulusan yang bekerja berstatus pegawai tetap, semakin tinggi keberhasilan program dalam rangka mengurangi angka pengangguran karena jika mereka sudah berstatus pegawai tetap maka semakin kecil kemungkinan mereka untuk menganggur kembali.

Status kepegawaian seseorang di tempat bekerja tentulah sangat dipengaruhi oleh kebijakan manajemen perusahaan itu sendiri dalam mengikat pegawai atau buruhnya hal ini bisa kita maklumi mengingat banyaknya pertimbangan-pertimbangan yang harus diperhitungkan oleh perusahaan tersebut. Status kepegawaian dapat menunjukkan bahwa lulusan tersebut kompeten atau tidak.

Dari 71 orang responden yang telah bekerja sebanyak 40 orang (56.34%) sudah menjadi pegawai tetap, 19.72% masih berstatus pegawai kontrak yang mana kontraknya adalah satu sampai dua tahun dan dapat dilanjutkan jika perusahaan masih membutuhkan, 2.82% berstatus magang dan belum menjadi pegawai tetapi sudah diberikan gaji/upah oleh perusahaan, selanjutnya 21.13% adalah pegawai harian lepas. Lulusan yang berstatus pegawai magang dan pegawai lepas, dalam jangka pendek masih dikhawatirkan statusnya, apakah masih bekerja atau dapat kembali menganggur.

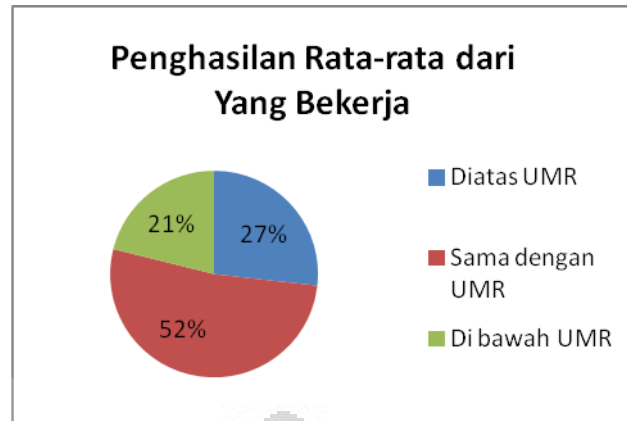
Hasilnya adalah status kepegawaian yang tetap dan kontrak sebesar 86.82%. Persentase terendah ada di provinsi Banten dan Nanggroe Aceh Darussalam yaitu sebesar 50% dan 60%. Sedangkan provinsi Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, persentase status kepegawaiannya sebesar 100%, artinya semua lulusan yang bekerja berstatus pegawai baik pegawai tetap maupun pegawai kontrak. Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki lulusan yang bekerja, karena 100% lulusannya berusaha mandiri.

Persentase bekerja merupakan penggabungan rata-rata dari persentase proses penempatan dan persentase status kepegawaian.

Pada tabel 5.14 dapat dibaca bahwa provinsi Jawa Tengah, D.I.Yogyakarta, Sumatera Barat, Riau, Bali, dan Nusa Tenggara Barat adalah daerah yang persentase bekerjanya maksimal yaitu sebesar 100%. Sedangkan persentase terendah ada di provinsi Lampung sebesar 71.43%.

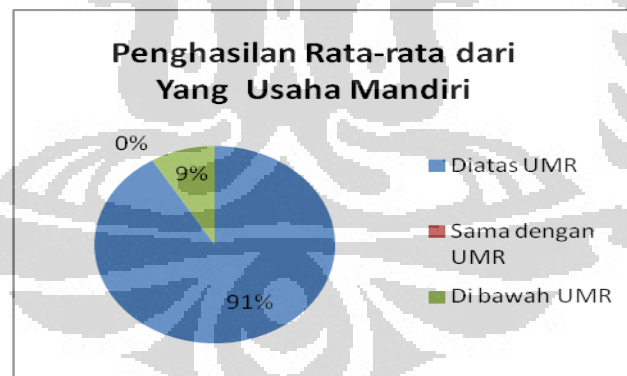
5.1.9 Gaji/upah yang diperoleh minimal sebesar upah minimum regional (UMR)

Aspek penilaian terhadap penghasilan rata-rata dari yang bekerja atau usaha mandiri. Pertanyaan ini tidak ada atau tidak diberikan kepada responden yang tidak bekerja



Grafik 5.3
Penghasilan Rata-Rata Lulusan Yang Bekerja

Penghasilan atau gaji yang diterima responden yang bekerja terlihat cukup bagus dimana 52% sama dengan UMR dan 27% di atas UMR. Memang masih ada 21% yang berpenghasilan dibawah UMR namun hal ini bukanlah indikasi bahwa lulusan program tidak dianggap kompeten oleh perusahaan, karena seperti halnya status kepegawaian yang sudah dibahas sebelumnya bahwa perusahaan mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang lain dalam menetapkan gaji karyawannya.



Grafik 5.4
Penghasilan Rata-Rata Lulusan Yang Usaha Mandiri

Di dalam kuisisioner responden yang usaha mandiri tidak ada pertanyaan berapa penghasilan bersih dalam satu bulan menjalankan usaha, yang ada adalah pertanyaan rata-rata omset 1 bulan serta rata-rata persentase keuntungan dari omset. Disini penulis coba mengasumsikan bahwa yang beromset dibawah Rp 5 juta sebulan dengan persentase keuntungan kurang dari 10% dianggap

berpenghasilan dibawah UMR, sedangkan yang beromset lebih dari Rp 5 juta sebulan serta persentase keuntungannya antara 10-50% atau diatasnya dianggap berpenghasilan sama atau diatas UMR.

Dengan asumsi seperti yang dijelaskan diatas terlihat bahwa penghasilan 91% lulusan yang usaha mandiri diatas UMR dan hanya 9% dibawah UMR, ini mengindikasikan bahwa yang usaha mandiri mempunyai peluang lebih tinggi dalam mendapatkan penghasilan yang lebih baik dibandingkan lulusan yang bekerja pada DUDI. Tingginya peluang ini juga memiliki efek multiplier terhadap pengangguran yang lainnya, dimana para lulusan yang usaha mandiri dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi pengangguran yang lainnya. Namun sayang, program ini hanya baru dapat menghasilkan 9.54% lulusan yang berusaha mandiri.

Berikut adalah efektifitas gaji/upah yang diterima oleh lulusan program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008 – 2009 yang bekerja dan berusaha mandiri.

Tabel 5.15
Persentase Upah Minimal UMR

No.	Provinsi	Minimal UMR	Di Bawah UMR	Persentase Upah Minimal UMR
1	Jawa Barat	11	1	91.67%
2	Banten	3	1	75.00%
3	Jawa Tengah	6	0	100.00%
4	D.I. Yogyakarta	8	4	66.67%
5	Jawa Timur	11	5	68.75%
6	Nanggroe Aceh Darussalam	3	2	60.00%
7	Sumatera Utara	14	1	93.33%
8	Sumatera Barat	3	1	75.00%
9	Riau	9	0	100.00%
10	Bengkulu	7	0	100.00%
11	Lampung	7	0	100.00%
12	Kalimantan Barat	3	2	60.00%
13	Kalimantan Timur	4	0	100.00%
14	Sulawesi Tengah	7	0	100.00%
15	Sulawesi Tenggara	4	1	80.00%
16	Bali	7	0	100.00%
17	Nusa Tenggara Barat	2	2	50.00%
	Jumlah	109	20	84.50%

Persentase gaji/upah yang diterima oleh lulusan program pendidikan kecakapan hidup secara keseluruhan dinilai efektif yaitu sebesar 84.5%, namun masih ada daerah yang gaji/upah yang diterima lulusan tidak efektif seperti provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, dan Nanggroe Aceh Darussalam. Artinya, secara ekonomi, daerah ini belum mampu memberikan gaji/upah yang layak untuk lulusan program pendidikan kecakapan hidup. Bertolak belakang dengan 7 provinsi lainnya yaitu: Jawa Tengah, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Bali, daerah-daerah ini tingkat efektifitas gaji/upah yang diberikan untuk lulusan sebesar 100%. Artinya, dengan kemampuan yang dibekali dari proses pembelajaran program pendidikan kecakapan hidup mampu mengangkat kesejahteraan lulusannya yang awalnya menganggur jadi bekerja dan dapat menghidupi keluarganya dengan layak.

Adapun alasan lulusan program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008-2009 tidak bekerja dan tidak usaha mandiri bermacam-macam. Dari jawaban responden sebanyak 35 orang lulusan yang tidak bekerja diperoleh data sebagai berikut: (1) 26.47% lulusan menyatakan bahwa syarat dari perusahaan terlalu tinggi, pernyataan ini menyiratkan bahwa lulusan tersebut belum kompeten dalam bidang keahlian yang diikutinya pada program pendidikan kecakapan hidup. Penyebab tidak kompeten ini juga beragam, mulai dari kurikulum dan materi ajar yang tidak sesuai dengan pekerjaan, kemampuan instruktur dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilannya, sampai dengan kemampuan peserta didik dalam memahami dan mempraktikkan keterampilan yang diajarkan tersebut. (2) 23.53% lulusan menyatakan bahwa mereka menolak untuk ditempatkan bekerja oleh lembaga penyelenggara, padahal di awal rekrutmen sudah disampaikan bahwa lulusan dari program ini akan disalurkan bekerja, berarti para peserta program ini masih memilih-milih tempat untuk bekerja-pengangguran disebabkan oleh kemauan sendiri bukan karena tidak adanya lapangan pekerjaan. (3) 20.59% lulusan menyatakan bahwa mereka melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, artinya mereka bukanlah sasaran yang tepat untuk program ini. (4) 14.71% lulusan menyatakan bahwa modal usaha belum

cukup, artinya lulusan ini berniat untuk berusaha mandiri, tapi belum cukup memiliki modal. Padahal usaha mandiri tidak hanya membutuhkan modal tetapi juga semangat kerja dan mau menanggung resiko, namun hal inilah yang belum dimiliki oleh lulusan tersebut, sehingga sangat susah untuk mengangkat status mereka dari pengangguran menjadi pekerja ataupun usahawan. (5) Sisanya sebesar 14.71% lainnya menyatakan alasannya ikut suami, mengurus keluarga, keterampilan yang dipelajari tidak sesuai minat, dan lembaga penyelenggara tidak menyalurkan lulusannya bekerja.

5.2 Analisis Efektifitas Program Pendidikan Kecakapan Hidup

Perhitungan efektifitas program pendidikan kecakapan hidup berdasarkan indikator-indikator keberhasilan program yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dinilai masih sangat umum dan belum mencakup berbagai aspek yang mempengaruhi keberhasilan program. Disamping itu untuk menentukan efektifitas program secara keseluruhan indikator belum dapat dilakukan karena belum adanya rumusan efektifitas program.

Untuk menganalisis efektifitas program pendidikan kecakapan hidup lebih lanjut, perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program. Dalam menentukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup digunakan metode AHP.

5.2.1 Hasil Pengolahan Data

Data berdasarkan kuesioner yang telah disebar setelah dilakukan perataan terhadap keseluruhan nilai kemudian data tersebut di input kedalam perangkat expert choice.

Data yang didapat merupakan data dalam bentuk kuesioner yang mana dalam mengisi kuesioner digunakan metode penilaian perbandingan berpasangan dengan skala 1 sampai 9. Pertanyaan dalam kuesioner ini dibuat sedemikian rupa

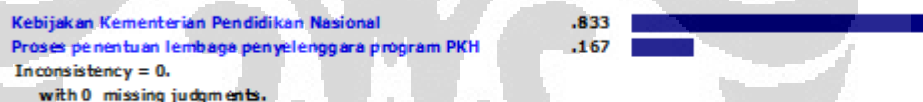
sehingga para ahli dapat menilai perbandingan relatif dan mengkuantitatifkan penilaian.

Hasil dari input data tersebut dapat terlihat seperti gambar hasil pengolahan dibawah ini.



Gambar 5.1
Hasil Pengolahan Data Pada Elemen Kriteria

Dalam menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, para ahli berpendapat bahwa faktor internal memiliki bobot lebih tinggi dari faktor eksternal, dimana bobot untuk faktor internal 0.750 dan bobot faktor eksternal 0.250.



Gambar 5.2
Hasil Pengolahan Data Sub Kriteria Pada Kriteria Internal

Pada level III sub kriteria pada kriteria internal, faktor kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional memiliki bobot 0.833 sedangkan bobot faktor proses penentuan lembaga penyelenggara program PKH sebesar 0.167.



Gambar 5.3
Hasil Pengolahan Data Sub Sub Kriteria Pada Sub Kriteria Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional

Pada level IV, bobot masing-masing sub sub kriteria pada sub kriteria kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional kriteria internal, adalah 0.105 untuk faktor ketepatan sasaran program, 0.637 untuk faktor kesesuaian kurikulum dengan penerapan kerja, dan 0.258 untuk faktor bentuk evaluasi hasil belajar.



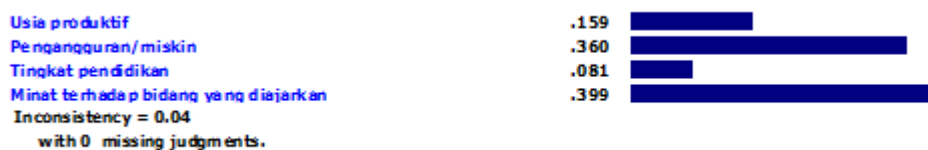
Gambar 5.4
Hasil Pengolahan Data Sub Sub Kriteria Pada Sub Kriteria Proses Penentuan Lembaga Penyelenggara Program PKH

Pada level IV, bobot masing-masing sub sub kriteria pada sub kriteria kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional kriteria internal, adalah 0.143 untuk faktor penilaian proposal blockgrant, 0.429 untuk faktor verifikasi lapangan, dan 0.429 untuk faktor kualitas tim penilai.



Gambar 5.5
Hasil Pengolahan Data Sub Kriteria Pada Kriteria Eksternal

Pada level III sub kriteria pada kriteria eksternal, bobot masing-masing faktor adalah 0.200 untuk faktor peserta didik, 0.600 untuk faktor penyelenggara program PKH, dan 0.200 untuk faktor dunia usaha dan industri.



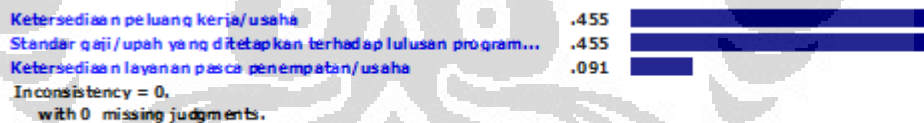
Gambar 5.6
Hasil Pengolahan Data Sub Sub Kriteria Pada Sub Kriteria Peserta Didik

Pada level IV, bobot masing-masing sub sub kriteria pada sub kriteria peserta didik kriteria eksternal, adalah 0.159 untuk faktor usia produktif, 0.360 untuk faktor pengangguran/miskin, 0.081 untuk faktor tingkat pendidikan, dan 0.399 untuk faktor minat terhadap bidang yang diajarkan.



Gambar 5.7
Hasil Pengolahan Data Sub Sub Kriteria Pada Sub Kriteria Penyelenggara Program PKH

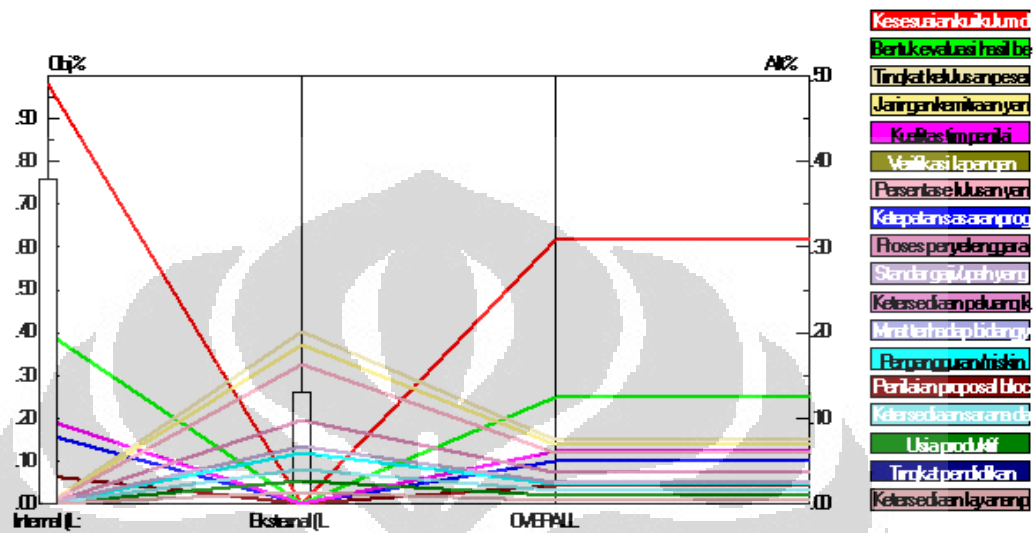
Pada level IV, bobot masing-masing sub sub kriteria pada sub kriteria penyelenggara program PKH kriteria eksternal, adalah 0.058 untuk faktor ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran, 0.143 untuk faktor proses penyelenggaraan program PKH, 0.292 untuk faktor tingkat kelulusan peserta didik, 0.270 untuk faktor jaringan kemitraan yang dimiliki, dan 0.237 untuk faktor persentase lulusan yang bekerja/usaha.



Gambar 5.8
Hasil Pengolahan Data Sub Sub Kriteria Pada Sub Kriteria Dunia Usaha dan Industri

Pada level IV, bobot masing-masing sub sub kriteria pada sub kriteria dunia usaha dan industri kriteria eksternal, adalah 0.455 untuk faktor ketersediaan peluang kerja/usaha, 0.455 untuk faktor standar gaji/upah yang ditetapkan terhadap lulusan program PKH, dan 0.091 untuk faktor ketersediaan layanan pasca penempatan/usaha.

5.2.2 Ujicoba Analisis Sensitivitas



Gambar 5.9
Performance Sensitivity for Nodes Below Tujuan: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pendidikan Kecakapan Hidup

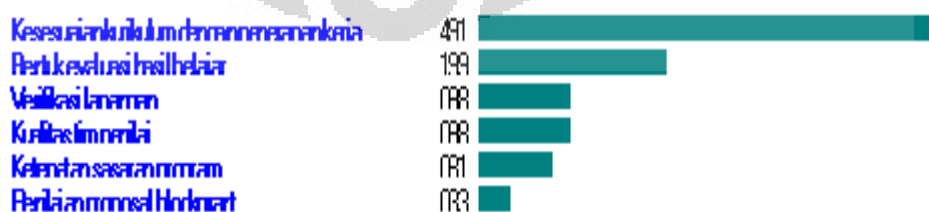
5.2.3 Ujicoba Data

Data yang telah didapat dari setiap bagian diuji coba ke dalam software expert choice, dan nilai rasio inkonsistensi harus dibawah 0,1. Jika rasio inkonsistensi lebih besar dari 0,1 maka harus dilakukan survey ulang (Thomas L. Saaty, 1990). Dari hasil pengolahan data diperoleh nilai rasio inkonsistensi sebesar 0.03, artinya survey ini masih dianggap konsisten sehingga tidak perlu dilakukan survey ulang. Gambar-gambar dibawah ini merupakan nilai prioritas masing-masing kriteria.



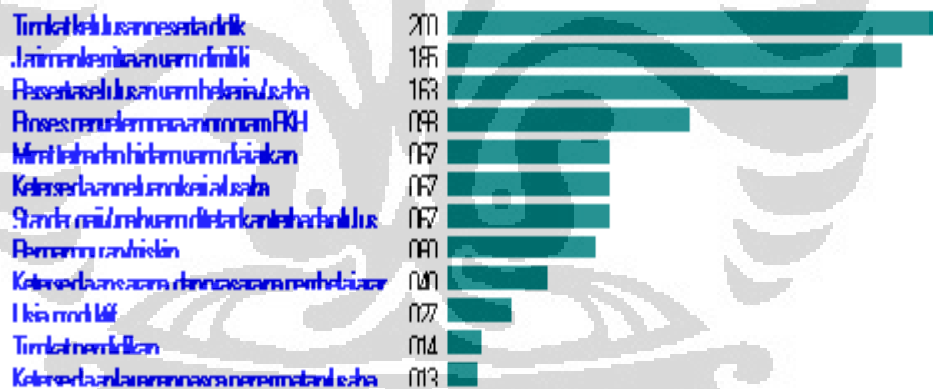
Gambar 5.10
Dominasi Faktor Dari Semua Kriteria

Dari gambar 5.11 dapat dilihat urutan faktor-faktor yang dominan mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup yang masing-masing urutannya sebagai berikut: kesesuaian kurikulum dengan penerapan kerja 0.398, bentuk evaluasi hasil belajar 0.161, ketepatan sasaran program 0.065, verifikasi lapangan 0.054, kualitas tim penilai 0.054, tingkat kelulusan peserta didik 0.044, jaringan kemitraan yang dimiliki 0.040, persentase lulusan yang bekerja/usaha 0.036, ketersediaan peluang kerja/usaha 0.023, standar gaji/upah yang ditetapkan terhadap lulusan program PKH 0.023, proses penyelenggaraan program PKH 0.021, minat terhadap bidang yang diajarkan 0.020, penilaian proposal blockgrant 0.018, pengangguran/miskin 0.018, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran 0.009, usia produktif 0.008, ketersediaan layanan pasca penempatan/usaha 0.005, dan tingkat pendidikan 0.004.



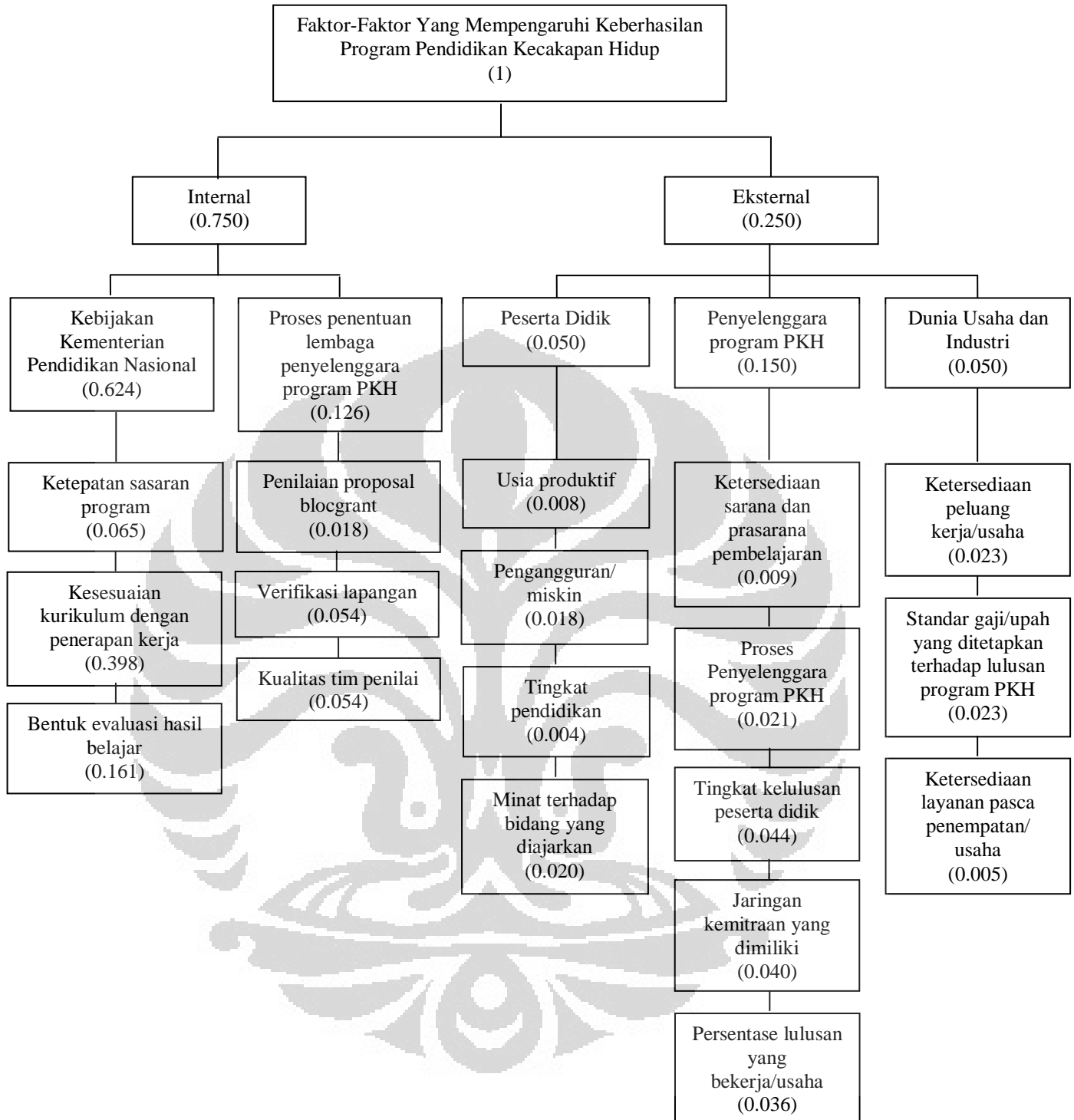
Gambar 5.11
Dominasi Faktor Dari Kriteria Internal

Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup pada kriteria faktor internal dapat diurutkan pembobotannya mulai dari kesesuaian kurikulum dengan penerapan kerja 0.491, bentuk evaluasi hasil belajar 0.199, verifikasi lapangan 0.098, kualitas tim penilai 0.098, ketepatan sasaran program 0.081 sampai penilaian proposal blockgrant 0.033. Selanjutnya untuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup pada kriteria eksternal diurutkan dari yang sangat berpengaruh sampai yang sedikit mempengaruhi adalah tingkat kelulusan peserta didik 0.200, jaringan kemitraan yang dimiliki 0.185, persentase lulusan yang bekerja/usaha 0.163, proses penyelenggaraan program PKH 0.098, minat terhadap bidang yang diajarkan 0.067, standar gaji/upah yang ditetapkan terhadap lulusan program PKH 0.067, pengangguran/miskin 0.060, ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran 0.040, usia produktif 0.027, tingkat pendidikan 0.014, dan ketersediaan layanan pasca penempatan/usaha 0.013.



Gambar 5.12
Dominasi Faktor Dari Kriteria Eksternal

Hasil hirarki secara keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup seperti gambar 5.14.



Gambar 5.13
Struktur Hirarki Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program PKH
Beserta Pembobotannya

5.2.4 Rumus Efektifitas Program Pendidikan Kecakapan Hidup

Dari pembobotan hirarki faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup dapat dibuat rumusan efektifitas program pendidikan kecakapan hidup berdasarkan faktor-faktor tersebut.

$$E_f = 0.75 \text{ Internal} + 0.25 \text{ Eksternal} \quad (1)$$

Rumus diatas masih dapat diuraikan sebagai berikut:

$$E_f = 0.624A + 0.126B + 0.050C + 0.150D + 0.050E \quad (2)$$

Keterangan: E_f : Efektifitas program pendidikan kecakapan hidup

A : Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional

B : Proses penentuan lembaga penyelenggara program PKH

C : Peserta Didik

D : Penyelenggara program PKH

E : Dunia usaha dan industri

Untuk lebih lanjutnya, rumusan ini digunakan untuk menghitung efektifitas program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

BAB 6

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Pengukuran efektifitas program pendidikan kecakapan hidup berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional masih per indikator, belum ada ukuran efektifitas secara keseluruhan dari pelaksanaan program pendidikan kecakapan hidup tersebut. Hasilnya adalah:

1. Indikator adanya laporan program penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008 sebesar 96.4% dan tahun 2009 sebesar 98.3% dinilai belum efektif karena belum mencapai indikator keberhasilan sebesar 100%.
2. Indikator tingkat kelulusan peserta didik program pendidikan kecakapan hidup tahun 2008 sebesar 96.31% dan tahun 2009 sebesar 91.55% dinilai efektif. Persentase tersebut melebihi dari target keberhasilan yang ditetapkan yaitu sebesar 90%. Tetapi tidak semua jenis program PKH untuk indikator ini dinilai efektif, dimana jenis program KWK tahun 2008 tingkat kelulusan peserta didiknya sebesar 81.32% dan jenis program KPP tahun 2009 tingkat kelulusannya sebesar 88.30%. Selain itu dari 20 provinsi lokasi penyelenggaraan program tahun 2008 terdapat satu provinsi yang belum mencapai indikator yaitu provinsi Bengkulu yang mana tingkat kelulusannya sebesar 85.7%. Dan dari 24 provinsi lokasi penyelenggaraan program tahun 2009 terdapat 3 provinsi yang belum mencapai indikator yaitu DKI Jakarta 88.5%, Jawa Timur 87.1%, dan Sumatera Selatan 85.2%.
3. Indikator penempatan kerja atau pendampingan usaha bagi lulusan yang dapat ditempatkan bekerja atau melakukan usaha mandiri tahun 2008 sebesar 87% dan tahun 2009 sebesar 96.59% dinilai efektif, lebih dari target indikator sebesar 80%. Untuk jenis program KPP tahun 2008 dinilai belum efektif karena tingkat keberhasilannya sebesar 74.87%, begitu juga dengan jenis program KWD tahun 2008 sebesar 79.47%.

4. Penilaian beberapa faktor keberhasilan program yang telah didata oleh Kementerian Pendidikan Nasional adalah:
 - a. Sasaran program tidak semuanya tepat sasaran, dari sampel yang ada ketepatan sasaran sebesar 82.93%.
 - b. Kesesuaian kurikulum dan bahan ajar yang digunakan lembaga penyelenggara dalam pembelajaran belum 100% sesuai dengan kebutuhan kerja. Angka kesesuaian sudah mencapai 94.57%.
 - c. Bentuk evaluasi hasil belajar yang dipersyaratkan adalah uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi. Hasil dilapangan diperoleh bahwa baru 51.16% peserta didik program pendidikan kecakapan hidup yang mengikuti uji kompetensi, sisanya 48.84% masih mengikuti ujian lokal yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara lokal dengan standar yang ditetapkan oleh lembaga itu sendiri.
 - d. Tingkat sesuaian pekerjaan yang diperoleh baik bekerja pada DUDI maupun berusaha mandiri dengan keterampilan yang diberikan dalam program pendidikan kecakapan hidup sebesar 96.55%, yang artinya hanya 3.45% lulusan yang bekerja atau berusaha mandiri yang pekerjaannya tidak sesuai dengan keterampilan yang mereka peroleh dari program pendidikan kecakapan hidup.
 - e. Status kepegawaian lulusan yang bekerja pada DUDI 56.34% pegawai tetap, 19.72% pegawai kontrak, 2.82% berstatus magang, dan 21.13% pegawai harian/lepas.
 - f. Gaji/upah yang diperoleh lulusan yang bekerja pada DUDI sebesar 27% diatas UMR, 52% sama dengan UMR, dan 21% dibawah UMR. Sedangkan lulusan yang berusaha mandiri, penghasilannya dengan asumsi batas standar UMR terdapat 91% diatas UMR dan 9% dibawah UMR.
5. Penilaian beberapa faktor keberhasilan program yang diatas belum ditetapkan indikator keberhasilannya sehingga belum dapat ditetapkan program tersebut berhasil atau tidak berhasil.
6. Untuk menentukan indikator keberhasilan dari masing-masing faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup, dibuat

rumusan faktor dan pembobotan masing-masingnya dengan menggunakan metoda AHP sehingga diperoleh rumusan efektifitas program pendidikan kecakapan hidup.

7. Rumusan efektifitas program pendidikan kecakapan hidup yaitu:

$$E_f = 0.75 \text{ Internal} + 0.25 \text{ Eksternal.}$$

6.2. Keterbatasan Studi

Hirarki faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup masih dapat dikembangkan lebih detail dalam bentuk butir-butir pertanyaan dalam kuisisioner monitoring dan evaluasi program PKH. Namun pada penelitian ini, penulis belum dapat menyusun instrumen tersebut.

6.3. Rekomendasi Kebijakan

Untuk mengurangi tingkat pengangguran sesuai dengan rencana strategis Kementerian Pendidikan Nasional, program pendidikan kecakapan hidup ini perlu ditindaklanjuti dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, dengan memperhatikan faktor-faktor:

1. Internal:
 - a. Kesesuaian kurikulum dengan penerapan kerja;
 - b. Bentuk evaluasi hasil belajar;
 - c. Verifikasi lapangan lembaga penyelenggara program;
 - d. Kualitas tim penilai proposal blockgrant;
 - e. Ketepatan sasaran program;
 - f. Penilaian proposal blockgrant.
2. Eksternal:
 - a. Tingkat kelulusan peserta didik;
 - b. Jaringan kemitraan yang dimiliki lembaga penyelenggara program PKH;
 - c. Persentase lulusan yang bekerja/usaha;
 - d. Proses penyelenggaraan program PKH;

- e. Minat peserta didik terhadap keterampilan yang diajarkan dalam program PKH;
- f. Standar gaji/upah lulusan yang ditetapkan oleh DUDI;
- g. Status calon peserta yang menganggur/miskin;
- h. Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran;
- i. Usia produktif bagi peserta didik;
- j. Tingkat pendidikan peserta didik; dan
- k. Ketersediaan layanan pasca penempatan/usaha.

Kementerian Pendidikan Nasional perlu menetapkan indikator keberhasilan masing-masing faktor diatas untuk mengetahui efektifitas program pendidikan kecakapan hidup yang diselenggarakannya.

Pengklasifikasian program sesuai dengan kriteria perlu dilakukan agar program tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan program. Selanjutnya pemilihan lokasi lembaga penyelenggara juga disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kerja di masing-masing daerah yang mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kemudian akses memperoleh pekerjaan perlu dibangun oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan atau lembaga penyelenggara dengan dunia usaha dan industri. Membangun kemitraan yang komitmen dan berkesinambungan akan menambah keberhasilan penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup.

Perlu pengawalan dan monitoring yang ketat terhadap lembaga-lembaga yang menjalankan program ini agar tidak terjadi lagi ketidakefektifan penyelenggaraan program. Melalui evaluasi dan pengawasan, teguran atau sanksi bisa diberikan kepada pejabat-pejabat yang menjalankan dan memanfaatkan program ini secara tidak benar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Bambang Permadi S, "AHP", PAU-EK-UI, Jakarta, 1992.

Bamberger, M&Cheema, S. (1993). *Case Study of Project Sustainability-Implication for Policy and Operation from Asian Experience (2nd)*. Washington DC: The World Bank.

Baumgartner, T.A., & Jackson, A.S. (1995). *Measurement for Evaluation: In Physical Education and Exercise Science (5th ed)*.

Brolin, D.E. 1989. *Life Centered Career Education: A Competency Based Approach*. Reston, VA: The Council for Exceptional Children.

Daniel L. Sufflebeam, dan Anthony J. Shinkfield.1986, *Systematic Evaluation: A Self Instructional guide to Theory and Practice*. Boston: Kluwer-nijhoff Publishing.

Djaali, dan Pudji Muljono, *Pengukuran dalam bidang pendidikan: Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta*, 2004.

G.F Madaus, M.S.Scriven, & D.L. Stufflebeam (eds). 1985. *Evaluation Model: Veiwpoints on educational and human service evaluation*. Boston: Kluwer-nijhoff Publishing, Hamalik, Oemar. 2001, *Tehnik Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: CV. Mandar Maju.

Griffin,P.,& Peter,N. (1991). *Educational Assessment and Reporting*. Sidney: Harcourt Brace Javanovich Publisher.

Haryanto, dkk. *Model Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) Berbasis Masyarakat Bagi Remaja Putus Sekolah Dalam Usaha Menciptakan Lapangan Kerja Di Wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta* Impresum : Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, 2006

Hiryanto dan Lutfi Wibawa, *Efektifitas Penyelenggaraan Program Kursus Para Profesi (KPP) Terhadap Pengurangan Angka Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008; 2009*.

<http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>

<http://www.penyelarasan.kemdiknas.go.id/>

Junaidi, Analisis Statistik Skripsi Tesis, on Desember 5, 2008 at 9:23 am

Kementerian Pendidikan Nasional, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kursus Wirausaha Kota (KWK); 2008.

Kementerian Pendidikan Nasional, Pedoman Blockgrant KWD; 2009.

Kementerian Pendidikan Nasional, Pedoman Blockgrant Kursus Para Profesi; 2009.

Nugraha Setiawan, Pengolahan dan Analisis Data, disampaikan pada Diklat Metodologi Penelitian Sosial, Parung – Bogor, 25 – 28 Mei 2005

Saaty Thomas L, *Decision Making for Leaders*, University of Pittsburgh, 1999/2000.

Siswo Wiratno. (2008). Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No. 072, tahun ke – 14, Mei, 2008.

Wartanto, Kebijakan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan; 2009.

LAMPIRAN 1
LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN
KECAKAPAN HIDUP TAHUN 2008-2009

No.	Provinsi	Jumlah Lembaga Penyelenggara Program								Jumlah
		KPP 2008	KPP 2009	KWK 2008	KWK 2009	KWD 2008	KWD 2009	PKH- LKP 2008	PKH- LKP 2009	
1	D.K.I. Jakarta	3	24	1	9			3	2	42
2	Jawa Barat	5	19	4	25	2	18	3	4	80
3	Banten	2	3		1		2			8
4	Jawa Tengah	6	10	4	11	2	3	9	1	46
5	D.I. Yogyakarta		1			2	2	1		6
6	Jawa Timur	3	24	5	9	4	6	4		55
7	Nanggroe Aceh D				1		1			2
8	Sumatera Utara	2		1	5	1	3			12
9	Sumatera Barat	1			11		6		2	20
10	Riau						1	1		2
11	Jambi		1				1			2
12	Sumatera Selatan			1	1				1	3
13	Bengkulu			2	2				1	5
14	Lampung					1	1			2
15	Kalimantan Barat		1		1		1	2		5
16	Kalimantan Timur				2		1			3
17	Sulawesi Utara	1			2		1			4
18	Gorontalo				2					2
19	Sulawesi Tengah			2	2					4
20	Sulawesi Selatan	2					1	1		4
21	Sulawesi Tenggara				1		1	1		3
22	Bali		1		1					2
23	Nusa Tenggara B	1	1		1					3
24	Nusa Tenggara T		1					1		2
25	Papua				1					1
	Jumlah	26	86	20	88	12	49	26	11	318

LAMPIRAN 2
OLAHAN DATA PENYEBARAN PESERTA DIDIK PROGRAM PKH
TAHUN 2008-2009

No.	Provinsi	Peserta Didik								Peserta Didik
		KPP 2008	KPP 2009	KWK 2008	KWK 2009	KWD 2008	KWD 2009	PKH-LKP 2008	PKH-LKP 2009	
1	D.K.I. Jakarta	95	1,919	20	155			128	80	2,397
2	Jawa Barat	135	1,139	80	648	40	285	105	150	2,582
3	Banten	70	160		15					245
4	Jawa Tengah	179	590	80	230		50	235	30	1,394
5	D.I. Yogyakarta		40			35	20	25		120
6	Jawa Timur	90	2,388	80	165	51	40	140		2,954
7	Nanggroe Aceh D				40					40
8	Sumatera Utara	40		20	110		20			190
9	Sumatera Barat	30			154				65	249
10	Riau						20	20		40
11	Kepulauan Riau									-
12	Jambi		20				20			40
13	Sumatera Selatan			20	15				100	135
14	Bangka Belitung									-
15	Bengkulu			35	40				30	105
16	Lampung					25	20			45
17	Kalimantan Barat		45		30		21	55		151
18	Kalimantan Tengah									-
19	Kalimantan Selatan									-
20	Kalimantan Timur				60					60
21	Sulawesi Utara	40			30					70
22	Gorontalo				50					50
23	Sulawesi Tengah			45	50					95
24	Sulawesi Selatan	45						20		65
25	Sulawesi Barat									-
26	Sulawesi Tenggara				20		20	30		70
27	Maluku									-
28	Maluku Utara									-
29	Bali		85		20					105
30	Nusa Tenggara Barat	26	75		20					121
31	Nusa Tenggara Timur		20					45		65
32	Papua				25					25
33	Papua Barat									-
	JUMLAH	750	6,481	380	1,877	151	516	803	455	11,413

LAMPIRAN 3

OLAHAN DATA PENYEBARAN LULUSAN PROGRAM PKH TAHUN 2008-2009

No.	Provinsi	Kelulusan Peserta Didik								Kelulusan
		KPP 2008	KPP 2009	KWK 2008	KWK 2009	KWD 2008	KWD 2009	PKH- LKP 2008	PKH- LKP 2009	
1	D.K.I. Jakarta	95	1,676	18	155			128	75	2,147
2	Jawa Barat	133	1,055	58	648	40	285	105	150	2,474
3	Banten	70	149		15					234
4	Jawa Tengah	175	516	64	230		50	235	22	1,292
5	D.I. Yogyakarta		40			35	20	25		120
6	Jawa Timur	90	2,053	58	165	51	40	140		2,597
7	Nanggroe Aceh Darussalam				40					40
8	Sumatera Utara	40		16	110		20			186
9	Sumatera Barat	30			154				65	249
10	Riau						20	20		40
11	Jambi		20				20			40
12	Sumatera Selatan			20	15				83	118
13	Bengkulu			30	40				30	100
14	Lampung					25	20			45
15	Kalimantan Barat		45		30		21	55		151
16	Kalimantan Timur				60					60
17	Sulawesi Utara	40			30					70
18	Gorontalo				50					50
19	Sulawesi Tengah			45	50					95
20	Sulawesi Selatan	45						20		65
21	Sulawesi Tenggara				20		20	30		70
22	Bali		80		20					100
23	Nusa Tenggara Barat	26	69		20					115
23	Nusa Tenggara Timur		20					45		65
25	Papua				25					25
	JUMLAH	744	5,723	309	1,877	151	516	803	425	10,548

LAMPIRAN 4

OLAHAN DATA PENYEBARAN LULUSAN PROGRAM PKH YANG USAHA MANDIRI TAHUN 2008-2009

No.	Provinsi	Lulusan Yang Usaha Mandiri								Usaha Mandiri
		KPP 2008	KPP 2009	KWK 2008	KWK 2009	KWD 2008	KWD 2009	PKH-LKP 2008	PKH-LKP 2009	
1	D.K.I. Jakarta	6	12						27	45
2	Jawa Barat	12	10	16	37		69		95	239
3	Banten	3	3		10					16
4	Jawa Tengah		6	16	97		10	5		134
5	D.I. Yogyakarta						20			20
6	Jawa Timur	8	11	31	12	5	22			89
7	Sumatera Utara			11	59		7			77
8	Sumatera Barat	2			52				40	94
9	Sumatera Selatan			20						20
10	Bengkulu			2	35					37
11	Lampung					10	11			21
12	Kalimantan Barat		2				21			23
13	Kalimantan Timur				55					55
14	Sulawesi Utara	15								15
15	Gorontalo				20					20
16	Sulawesi Tengah			15	20					35
17	Sulawesi Selatan	14								14
18	Sulawesi Tenggara				15					15
19	Bali				13					13
20	Nusa Tenggara Barat	6	2		2					10
21	Papua				14					14
	JUMLAH	66	46	111	441	15	160	5	162	1,006

LAMPIRAN 5

OLAHAN DATA PENYEBARAN LULUSAN PROGRAM PKH YANG BEKERJA PADA ORANG LAIN TAHUN 2008-2009

No.	Provinsi	Lulusan Yang Bekerja								Bekerja
		KPP 2008	KPP 2009	KWK 2008	KWK 2009	KWD 2008	KWD 2009	PKH- LKP 2008	PKH- LKP 2009	
1	D.K.I. Jakarta	70	1,635	14	155			128	48	2,050
2	Jawa Barat	96	1,020	39	591	30	190	105	3	2,074
3	Banten	67	127		5					199
4	Jawa Tengah	111	482	31	133		38	230		1,025
5	D.I. Yogyakarta		38			35		25		98
6	Jawa Timur	44	2,015	23	153	25	12	140		2,412
7	Nanggroe Aceh Darussalam				40					40
8	Sumatera Utara	36		5	31		10			82
9	Sumatera Barat	22			102				25	149
10	Riau						20	20		40
11	Jambi		20				20			40
12	Sumatera Selatan				15				83	98
13	Bengkulu			18	5				30	53
14	Lampung					15	9			24
15	Kalimantan Barat		41		30			55		126
16	Kalimantan Timur				5					5
17	Sulawesi Utara	17			30					47
18	Gorontalo				30					30
19	Sulawesi Tengah			25	30					55
20	Sulawesi Selatan	18						20		38
21	Sulawesi Tenggara				5		17	30		52
22	Bali		80		7					87
23	Nusa Tenggara Barat	10	62		18					90
24	Nusa Tenggara Timur		20					45		65
25	Papua				11					11
	JUMLAH	491	5,540	155	1,396	105	316	798	189	8,990

LAMPIRAN 6

OLAHAN DATA PENYEBARAN LULUSAN PROGRAM PKH YANG BELUM BEKERJA TAHUN 2008-2009

No.	Provinsi	Lulusan Yang Belum Bekerja / Lainnya								Belum Bekerja/ Lainnya
		KPP 2008	KPP 2009	KWK 2008	KWK 2009	KWD 2008	KWD 2009	PKH- LKP 2008	PKH- LKP 2009	
1	D.K.I. Jakarta	19	29	4	-	-	-	-	-	52
2	Jawa Barat	25	25	3	20	10	26	-	52	161
3	Banten	-	19	-	-	-	-	-	-	19
4	Jawa Tengah	64	28	17	-	-	2	-	22	133
5	D.I. Yogyakarta	-	2	-	-	-	-	-	-	2
6	Jawa Timur	38	27	4	-	21	6	-	-	96
7	Sumatera Utara	4	-	-	20	-	3	-	-	27
8	Sumatera Barat	6	-	-	-	-	-	-	-	6
9	Bengkulu	-	-	10	-	-	-	-	-	10
10	Kalimantan Barat	-	2	-	-	-	-	-	-	2
11	Sulawesi Utara	8	-	-	-	-	-	-	-	8
12	Sulawesi Tengah	-	-	5	-	-	-	-	-	5
13	Sulawesi Selatan	13	-	-	-	-	-	-	-	13
14	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	3	-	-	3
15	Nusa Tenggara Barat	10	5	-	-	-	-	-	-	15
	JUMLAH	187	137	43	40	31	40	-	74	552

LAMPIRAN 7

KUISIONER FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

KUESIONER

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Nonformal Kementerian Pendidikan Nasional

A. Identitas Informan Ahli	
Nama	:
Jabatan – Institusi	:
Alamat institusi	:
No.HP	:
Email	:

B. Petunjuk Pengisian

Contreng (√) kecenderungan yang Anda pilih

Alternatif A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Alternatif B
											√							

Cara penilaian perbandingan berpasangan

1. Bila kedua elemen **sama penting**, misalnya beri nilai 1, artinya bahwa kedua elemen tersebut (A dan B) mempunyai tingkat kepentingan yang sama.
2. Bila elemen yang satu **sedikit lebih penting** dibanding yang lain dalam mempengaruhi elemen di atasnya, beri nilai 3, artinya terdapat pertimbangan atau pengalaman yang mendukung bahwa satu elemen dianggap sedikit lebih penting dibanding elemen lainnya. Bila A dianggap sedikit lebih penting, maka dikatakan A 3 kali lebih penting daripada B.
3. Bila elemen **yang satu lebih penting dibanding yang lain**, beri nilai 5, artinya terdapat pertimbangan atau pengalaman bahwa satu elemen dianggap lebih penting dibanding elemen lainnya. Bila A dianggap lebih penting, maka dikatakan A 5 kali lebih penting daripada B.

4. Bila elemen yang satu **jelas sangat penting dibanding yang lain**, beri nilai 7, artinya terdapat pertimbangan atau pengalaman bahwa satu elemen dianggap jauh lebih penting dibanding elemen lainnya. Bila A dianggap jauh lebih penting, maka dikatakan A 7 kali lebih penting daripada B.
5. Bila elemen yang satu **mutlak lebih penting** dibanding yang lain, beri nilai 9, artinya terdapat pertimbangan atau pengalaman bahwa satu elemen dianggap jauh lebih penting dibanding elemen lainnya. Bila A dianggap mutlak lebih penting, maka dikatakan A 9 kali lebih penting daripada B.

Ringkasan penjelasan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Skor	Definisi	Penjelasan
1	Sama penting	A dan B sama penting
3	Sedikit lebih penting	A sedikit lebih penting dari B
5	Agak lebih penting	A agak lebih penting dari B
7	Jauh lebih penting	A jauh lebih penting dari B
9	Mutlak lebih penting	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Nilai antara angka diatas	Ragu-ragu dalam menentukan skala misal 6 antara 5 dan 7

C. Pertanyaan

1. Dalam dua **kriteria/faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup**, kriteria mana yang Anda anggap paling penting:

Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Faktor Internal																		Faktor Eksternal

2. Dalam kriteria **Faktor Internal**, sub kriteria/sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	Lebih Penting									1	Lebih Penting									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional																		Proses penentuan lembaga penyelenggara program PKH		

3. Dalam kriteria **Faktor Eksternal**, sub kriteria/sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	Lebih Penting									1	Lebih Penting									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
Peserta Didik																		Penyelenggara program PKH		
Peserta Didik																		Dunia Usaha dan Industri		
Penyelenggara program PKH																		Dunia Usaha dan Industri		

4. Dalam kriteria **Faktor Internal dan Sub Kriteria Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional**, sub sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	Lebih Penting									Lebih Penting									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ketepatan sasaran program																		Kesesuaian kurikulum dengan penerapan kerja	
Ketepatan sasaran program																		Bentuk evaluasi hasil belajar	
Kesesuaian kurikulum dengan penerapan kerja																		Bentuk evaluasi hasil belajar	

5. Dalam kriteria **Faktor Internal dan Sub Kriteria Proses Penentuan Lembaga Penyelenggara Program PKH**, sub-sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	Lebih Penting									Lebih Penting									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Penilaian proposal blocgrant																		Verifikasi lapangan	
Penilaian proposal blocgrant																		Kualitas tim penilai	

Sub Kriteria	Lebih Penting									Lebih Penting									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Verifikasi lapangan																		Kualitas tim penilai	

6. Dalam kriteria **Faktor Eksternal dan Sub Kriteria Peserta Didik**, sub sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	Lebih Penting									Lebih Penting									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Usia produktif																		Pengangguran/miskin	
Usia produktif																		Tingkat pendidikan	
Usia produktif																		Minat terhadap bidang yang diajarkan	
Pengangguran/miskin																		Tingkat pendidikan	
Pengangguran/miskin																		Minat terhadap bidang yang diajarkan	
Tingkat pendidikan																		Minat terhadap bidang yang diajarkan	

7. Dalam kriteria **Faktor Eksternal dan Sub Kriteria Penyelenggara Program PKH**, sub-sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting										Lebih Penting →										Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran																		Proses Penyelenggara program PKH			
Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran																		Tingkat kelulusan peserta didik			
Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran																		Jaringan kemitraan yang dimiliki			
Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran																		Persentase lulusan yang bekerja/usaha			
Proses Penyelenggara program PKH																		Tingkat kelulusan peserta didik			
Proses Penyelenggara program PKH																		Jaringan kemitraan yang dimiliki			
Proses Penyelenggara program PKH																		Persentase lulusan yang bekerja/usaha			
Tingkat kelulusan peserta didik																		Jaringan kemitraan yang dimiliki			
Tingkat kelulusan peserta didik																		Persentase lulusan yang bekerja/usaha			
Jaringan kemitraan yang dimiliki																		Persentase lulusan yang bekerja/usaha			

8. Dalam kriteria **Faktor Eksternal dan Sub Dunia Usaha dan Industri**, sub sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	Lebih Penting									Lebih Penting									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ketersediaan peluang kerja/usaha																		Standar gaji/upah yang ditetapkan terhadap lulusan program PKH	
Ketersediaan peluang kerja/usaha																		Ketersediaan layanan pasca penempatan/ usaha	
Standar gaji/upah yang ditetapkan terhadap lulusan program PKH																		Ketersediaan layanan pasca penempatan/ usaha	

----- TERIMA KASIH -----

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Bambang Permadi S, "AHP", PAU-EK-UI, Jakarta, 1992.

Bamberger, M&Cheema, S. (1993). *Case Study of Project Sustainability-Implication for Policy and Operation from Asian Experience (2nd)*. Washington DC: The World Bank.

Baumgartner, T.A., & Jackson, A.S. (1995). *Measurement for Evaluation: In Physical Education and Exercise Science (5th ed)*.

Brolin, D.E. 1989. *Life Centered Career Education: A Competency Based Approach*. Reston, VA: The Council for Exceptional Children.

Daniel L. Sufflebeam, dan Anthony J. Shinkfield.1986, *Systematic Evaluation: A Self Instructional guide to Theory and Practice*. Boston: Kluwer-nijhoff Publishing.

Djaali, dan Pudji Muljono, *Pengukuran dalam bidang pendidikan: Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta*, 2004.

G.F Madaus, M.S.Scriven, & D.L. Stufflebeam (eds). 1985. *Evaluation Model: Veiwpoints on educational and human service evaluation*. Boston: Kluwer-nijhoff Publishing, Hamalik, Oemar. 2001, *Tehnik Pengukuran dan Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: CV. Mandar Maju.

Griffin,P.,& Peter,N. (1991). *Educational Assessment and Reporting*. Sidney: Harcourt Brace Javanovich Publisher.

Haryanto, dkk. *Model Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) Berbasis Masyarakat Bagi Remaja Putus Sekolah Dalam Usaha Menciptakan Lapangan Kerja Di Wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta* Impresum : Yogyakarta, Fakultas Ilmu Pendidikan, 2006

Hiryanto dan Lutfi Wibawa, *Efektifitas Penyelenggaraan Program Kursus Para Profesi (KPP) Terhadap Pengurangan Angka Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008; 2009*.

<http://dansite.wordpress.com/2009/03/28/pengertian-efektifitas/>

<http://www.penyelarasan.kemdiknas.go.id/>

Junaidi, Analisis Statistik Skripsi Tesis, on Desember 5, 2008 at 9:23 am

Kementerian Pendidikan Nasional, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Kursus Wirausaha Kota (KWK); 2008.

Kementerian Pendidikan Nasional, Pedoman Blockgrant KWD; 2009.

Kementerian Pendidikan Nasional, Pedoman Blockgrant Kursus Para Profesi; 2009.

Nugraha Setiawan, Pengolahan dan Analisis Data, disampaikan pada Diklat Metodologi Penelitian Sosial, Parung – Bogor, 25 – 28 Mei 2005

Saaty Thomas L, *Decision Making for Leaders*, University of Pittsburgh, 1999/2000.

Siswo Wiratno. (2008). Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan No. 072, tahun ke – 14, Mei, 2008.

Wartanto, Kebijakan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan; 2009.

LAMPIRAN 1
LEMBAGA PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN
KECAKAPAN HIDUP TAHUN 2008-2009

No.	Provinsi	Jumlah Lembaga Penyelenggara Program								Jumlah
		KPP 2008	KPP 2009	KWK 2008	KWK 2009	KWD 2008	KWD 2009	PKH- LKP 2008	PKH- LKP 2009	
1	D.K.I. Jakarta	3	24	1	9			3	2	42
2	Jawa Barat	5	19	4	25	2	18	3	4	80
3	Banten	2	3		1		2			8
4	Jawa Tengah	6	10	4	11	2	3	9	1	46
5	D.I. Yogyakarta		1			2	2	1		6
6	Jawa Timur	3	24	5	9	4	6	4		55
7	Nanggroe Aceh D				1		1			2
8	Sumatera Utara	2		1	5	1	3			12
9	Sumatera Barat	1			11		6		2	20
10	Riau						1	1		2
11	Jambi		1				1			2
12	Sumatera Selatan			1	1				1	3
13	Bengkulu			2	2				1	5
14	Lampung					1	1			2
15	Kalimantan Barat		1		1		1	2		5
16	Kalimantan Timur				2		1			3
17	Sulawesi Utara	1			2		1			4
18	Gorontalo				2					2
19	Sulawesi Tengah			2	2					4
20	Sulawesi Selatan	2					1	1		4
21	Sulawesi Tenggara				1		1	1		3
22	Bali		1		1					2
23	Nusa Tenggara B	1	1		1					3
24	Nusa Tenggara T		1					1		2
25	Papua				1					1
	Jumlah	26	86	20	88	12	49	26	11	318

LAMPIRAN 2
OLAHAN DATA PENYEBARAN PESERTA DIDIK PROGRAM PKH
TAHUN 2008-2009

No.	Provinsi	Peserta Didik								Peserta Didik
		KPP 2008	KPP 2009	KWK 2008	KWK 2009	KWD 2008	KWD 2009	PKH-LKP 2008	PKH-LKP 2009	
1	D.K.I. Jakarta	95	1,919	20	155			128	80	2,397
2	Jawa Barat	135	1,139	80	648	40	285	105	150	2,582
3	Banten	70	160		15					245
4	Jawa Tengah	179	590	80	230		50	235	30	1,394
5	D.I. Yogyakarta		40			35	20	25		120
6	Jawa Timur	90	2,388	80	165	51	40	140		2,954
7	Nanggroe Aceh D				40					40
8	Sumatera Utara	40		20	110		20			190
9	Sumatera Barat	30			154				65	249
10	Riau						20	20		40
11	Kepulauan Riau									-
12	Jambi		20				20			40
13	Sumatera Selatan			20	15				100	135
14	Bangka Belitung									-
15	Bengkulu			35	40				30	105
16	Lampung					25	20			45
17	Kalimantan Barat		45		30		21	55		151
18	Kalimantan Tengah									-
19	Kalimantan Selatan									-
20	Kalimantan Timur				60					60
21	Sulawesi Utara	40			30					70
22	Gorontalo				50					50
23	Sulawesi Tengah			45	50					95
24	Sulawesi Selatan	45						20		65
25	Sulawesi Barat									-
26	Sulawesi Tenggara				20		20	30		70
27	Maluku									-
28	Maluku Utara									-
29	Bali		85		20					105
30	Nusa Tenggara Barat	26	75		20					121
31	Nusa Tenggara Timur		20					45		65
32	Papua				25					25
33	Papua Barat									-
	JUMLAH	750	6,481	380	1,877	151	516	803	455	11,413

LAMPIRAN 3

OLAHAN DATA PENYEBARAN LULUSAN PROGRAM PKH TAHUN 2008-2009

No.	Provinsi	Kelulusan Peserta Didik								Kelulusan
		KPP 2008	KPP 2009	KWK 2008	KWK 2009	KWD 2008	KWD 2009	PKH- LKP 2008	PKH- LKP 2009	
1	D.K.I. Jakarta	95	1,676	18	155			128	75	2,147
2	Jawa Barat	133	1,055	58	648	40	285	105	150	2,474
3	Banten	70	149		15					234
4	Jawa Tengah	175	516	64	230		50	235	22	1,292
5	D.I. Yogyakarta		40			35	20	25		120
6	Jawa Timur	90	2,053	58	165	51	40	140		2,597
7	Nanggroe Aceh Darussalam				40					40
8	Sumatera Utara	40		16	110		20			186
9	Sumatera Barat	30			154				65	249
10	Riau						20	20		40
11	Jambi		20				20			40
12	Sumatera Selatan			20	15				83	118
13	Bengkulu			30	40				30	100
14	Lampung					25	20			45
15	Kalimantan Barat		45		30		21	55		151
16	Kalimantan Timur				60					60
17	Sulawesi Utara	40			30					70
18	Gorontalo				50					50
19	Sulawesi Tengah			45	50					95
20	Sulawesi Selatan	45						20		65
21	Sulawesi Tenggara				20		20	30		70
22	Bali		80		20					100
23	Nusa Tenggara Barat	26	69		20					115
23	Nusa Tenggara Timur		20					45		65
25	Papua				25					25
	JUMLAH	744	5,723	309	1,877	151	516	803	425	10,548

LAMPIRAN 4

OLAHAN DATA PENYEBARAN LULUSAN PROGRAM PKH YANG USAHA MANDIRI TAHUN 2008-2009

No.	Provinsi	Lulusan Yang Usaha Mandiri								Usaha Mandiri
		KPP 2008	KPP 2009	KWK 2008	KWK 2009	KWD 2008	KWD 2009	PKH-LKP 2008	PKH-LKP 2009	
1	D.K.I. Jakarta	6	12						27	45
2	Jawa Barat	12	10	16	37		69		95	239
3	Banten	3	3		10					16
4	Jawa Tengah		6	16	97		10	5		134
5	D.I. Yogyakarta						20			20
6	Jawa Timur	8	11	31	12	5	22			89
7	Sumatera Utara			11	59		7			77
8	Sumatera Barat	2			52				40	94
9	Sumatera Selatan			20						20
10	Bengkulu			2	35					37
11	Lampung					10	11			21
12	Kalimantan Barat		2				21			23
13	Kalimantan Timur				55					55
14	Sulawesi Utara	15								15
15	Gorontalo				20					20
16	Sulawesi Tengah			15	20					35
17	Sulawesi Selatan	14								14
18	Sulawesi Tenggara				15					15
19	Bali				13					13
20	Nusa Tenggara Barat	6	2		2					10
21	Papua				14					14
	JUMLAH	66	46	111	441	15	160	5	162	1,006

LAMPIRAN 5

OLAHAN DATA PENYEBARAN LULUSAN PROGRAM PKH YANG BEKERJA PADA ORANG LAIN TAHUN 2008-2009

No.	Provinsi	Lulusan Yang Bekerja								Bekerja
		KPP 2008	KPP 2009	KWK 2008	KWK 2009	KWD 2008	KWD 2009	PKH- LKP 2008	PKH- LKP 2009	
1	D.K.I. Jakarta	70	1,635	14	155			128	48	2,050
2	Jawa Barat	96	1,020	39	591	30	190	105	3	2,074
3	Banten	67	127		5					199
4	Jawa Tengah	111	482	31	133		38	230		1,025
5	D.I. Yogyakarta		38			35		25		98
6	Jawa Timur	44	2,015	23	153	25	12	140		2,412
7	Nanggroe Aceh Darussalam				40					40
8	Sumatera Utara	36		5	31		10			82
9	Sumatera Barat	22			102				25	149
10	Riau						20	20		40
11	Jambi		20				20			40
12	Sumatera Selatan				15				83	98
13	Bengkulu			18	5				30	53
14	Lampung					15	9			24
15	Kalimantan Barat		41		30			55		126
16	Kalimantan Timur				5					5
17	Sulawesi Utara	17			30					47
18	Gorontalo				30					30
19	Sulawesi Tengah			25	30					55
20	Sulawesi Selatan	18						20		38
21	Sulawesi Tenggara				5		17	30		52
22	Bali		80		7					87
23	Nusa Tenggara Barat	10	62		18					90
24	Nusa Tenggara Timur		20					45		65
25	Papua				11					11
	JUMLAH	491	5,540	155	1,396	105	316	798	189	8,990

LAMPIRAN 6

OLAHAN DATA PENYEBARAN LULUSAN PROGRAM PKH YANG BELUM BEKERJA TAHUN 2008-2009

No.	Provinsi	Lulusan Yang Belum Bekerja / Lainnya								Belum Bekerja/ Lainnya
		KPP 2008	KPP 2009	KWK 2008	KWK 2009	KWD 2008	KWD 2009	PKH- LKP 2008	PKH- LKP 2009	
1	D.K.I. Jakarta	19	29	4	-	-	-	-	-	52
2	Jawa Barat	25	25	3	20	10	26	-	52	161
3	Banten	-	19	-	-	-	-	-	-	19
4	Jawa Tengah	64	28	17	-	-	2	-	22	133
5	D.I. Yogyakarta	-	2	-	-	-	-	-	-	2
6	Jawa Timur	38	27	4	-	21	6	-	-	96
7	Sumatera Utara	4	-	-	20	-	3	-	-	27
8	Sumatera Barat	6	-	-	-	-	-	-	-	6
9	Bengkulu	-	-	10	-	-	-	-	-	10
10	Kalimantan Barat	-	2	-	-	-	-	-	-	2
11	Sulawesi Utara	8	-	-	-	-	-	-	-	8
12	Sulawesi Tengah	-	-	5	-	-	-	-	-	5
13	Sulawesi Selatan	13	-	-	-	-	-	-	-	13
14	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	3	-	-	3
15	Nusa Tenggara Barat	10	5	-	-	-	-	-	-	15
	JUMLAH	187	137	43	40	31	40	-	74	552

LAMPIRAN 7

KUISIONER FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN PROGRAM PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

KUESIONER

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pendidikan Kecakapan Hidup Nonformal Kementerian Pendidikan Nasional

A. Identitas Informan Ahli	
Nama	:
Jabatan – Institusi	:
Alamat institusi	:
No.HP	:
Email	:

B. Petunjuk Pengisian

Contreng (√) kecenderungan yang Anda pilih

Alternatif A	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Alternatif B
											√							

Cara penilaian perbandingan berpasangan

1. Bila kedua elemen **sama penting**, misalnya beri nilai 1, artinya bahwa kedua elemen tersebut (A dan B) mempunyai tingkat kepentingan yang sama.
2. Bila elemen yang satu **sedikit lebih penting** dibanding yang lain dalam mempengaruhi elemen di atasnya, beri nilai 3, artinya terdapat pertimbangan atau pengalaman yang mendukung bahwa satu elemen dianggap sedikit lebih penting dibanding elemen lainnya. Bila A dianggap sedikit lebih penting, maka dikatakan A 3 kali lebih penting daripada B.
3. Bila elemen **yang satu lebih penting dibanding yang lain**, beri nilai 5, artinya terdapat pertimbangan atau pengalaman bahwa satu elemen dianggap lebih penting dibanding elemen lainnya. Bila A dianggap lebih penting, maka dikatakan A 5 kali lebih penting daripada B.

4. Bila elemen yang satu **jelas sangat penting dibanding yang lain**, beri nilai 7, artinya terdapat pertimbangan atau pengalaman bahwa satu elemen dianggap jauh lebih penting dibanding elemen lainnya. Bila A dianggap jauh lebih penting, maka dikatakan A 7 kali lebih penting daripada B.
5. Bila elemen yang satu **mutlak lebih penting** dibanding yang lain, beri nilai 9, artinya terdapat pertimbangan atau pengalaman bahwa satu elemen dianggap jauh lebih penting dibanding elemen lainnya. Bila A dianggap mutlak lebih penting, maka dikatakan A 9 kali lebih penting daripada B.

Ringkasan penjelasan diatas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Skor	Definisi	Penjelasan
1	Sama penting	A dan B sama penting
3	Sedikit lebih penting	A sedikit lebih penting dari B
5	Agak lebih penting	A agak lebih penting dari B
7	Jauh lebih penting	A jauh lebih penting dari B
9	Mutlak lebih penting	A mutlak lebih penting dari B
2,4,6,8	Nilai antara angka diatas	Ragu-ragu dalam menentukan skala misal 6 antara 5 dan 7

C. Pertanyaan

1. Dalam dua **kriteria/faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pendidikan kecakapan hidup**, kriteria mana yang Anda anggap paling penting:

Kriteria	← Lebih Penting								Lebih Penting →								Kriteria	
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Faktor Internal																		Faktor Eksternal

4. Dalam kriteria **Faktor Internal dan Sub Kriteria Kebijakan Kementerian Pendidikan Nasional**, sub sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	Lebih Penting									Lebih Penting									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ketepatan sasaran program																		Kesesuaian kurikulum dengan penerapan kerja	
Ketepatan sasaran program																		Bentuk evaluasi hasil belajar	
Kesesuaian kurikulum dengan penerapan kerja																		Bentuk evaluasi hasil belajar	

5. Dalam kriteria **Faktor Internal dan Sub Kriteria Proses Penentuan Lembaga Penyelenggara Program PKH**, sub-sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	Lebih Penting									Lebih Penting									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Penilaian proposal blocgrant																		Verifikasi lapangan	
Penilaian proposal blocgrant																		Kualitas tim penilai	

Sub Kriteria	Lebih Penting									Lebih Penting									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Verifikasi lapangan																		Kualitas tim penilai	

6. Dalam kriteria **Faktor Eksternal dan Sub Kriteria Peserta Didik**, sub sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	Lebih Penting									Lebih Penting									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Usia produktif																		Pengangguran/miskin	
Usia produktif																		Tingkat pendidikan	
Usia produktif																		Minat terhadap bidang yang diajarkan	
Pengangguran/miskin																		Tingkat pendidikan	
Pengangguran/miskin																		Minat terhadap bidang yang diajarkan	
Tingkat pendidikan																		Minat terhadap bidang yang diajarkan	

7. Dalam kriteria **Faktor Eksternal dan Sub Kriteria Penyelenggara Program PKH**, sub-sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	← Lebih Penting										Lebih Penting →										Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran																		Proses Penyelenggara program PKH			
Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran																		Tingkat kelulusan peserta didik			
Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran																		Jaringan kemitraan yang dimiliki			
Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran																		Persentase lulusan yang bekerja/usaha			
Proses Penyelenggara program PKH																		Tingkat kelulusan peserta didik			
Proses Penyelenggara program PKH																		Jaringan kemitraan yang dimiliki			
Proses Penyelenggara program PKH																		Persentase lulusan yang bekerja/usaha			
Tingkat kelulusan peserta didik																		Jaringan kemitraan yang dimiliki			
Tingkat kelulusan peserta didik																		Persentase lulusan yang bekerja/usaha			
Jaringan kemitraan yang dimiliki																		Persentase lulusan yang bekerja/usaha			

8. Dalam kriteria **Faktor Eksternal dan Sub Dunia Usaha dan Industri**, sub sub kriteria/sub sub faktor mana yang Anda anggap paling penting:

Sub Kriteria	Lebih Penting									Lebih Penting									Sub Kriteria
	9	8	7	6	5	4	3	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Ketersediaan peluang kerja/usaha																		Standar gaji/upah yang ditetapkan terhadap lulusan program PKH	
Ketersediaan peluang kerja/usaha																		Ketersediaan layanan pasca penempatan/ usaha	
Standar gaji/upah yang ditetapkan terhadap lulusan program PKH																		Ketersediaan layanan pasca penempatan/ usaha	

----- TERIMA KASIH -----